

2022

DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'la atas segala rahmat dan karunia-NYA, Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara telah berhasil melaksanakan Program dan Kegiatan yang diamanahkan dalam Tahun Anggaran 2022. Dispermades PPKB telah melaksnakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa serta urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk mendukung visi dan misi Kepala Daerah yaitu mewujudkan **Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera** sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2017-2022.

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir capaian RPJMD Tahun 2017-2022. Berbagai kendala dan tantangan dihadapi dalam pencapaian target, termasuk Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 - 2021. Namun demikian Dispermades PPKB telah melaksanakan berbagai inovasi dan kebijakan sehingga pelaksanaan program dan kegiatan terlaksana dengan baik. Selain melaksanakan program kebijakan Kepala Daerah, Dispermades PPKB juga berperan aktif dalam program dan kebijakan nasional diantaranya berkaitan dengan Dana Desa, Pendampingan eks - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) serta Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana Perpres 72 Tahun 2021.

Laporan kinerja Tahun 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang mencakup sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2017-2022 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Laporan kinerja juga memuat capaian progam dan kegiatan serta anggaran yang mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga kinerja organisasi tergambar lebih jelas.

Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan dan mitra kerja yang telah mendukung tugas dan fungsi Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara selama Tahun 2022. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara yang telah menunjukkan dedikasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggungjawabnya. Semoga Allah SWT, senantiasa meridhoi usaha kita bersama.

Banjarnegara, 28 Januari 2023

LENDRO C. SIYONO, SE, MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681130 199703 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi.....	3
3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.....	3
4. Struktur Organisasi.....	6
5. Keadaan Internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.....	4
B. Permasalahan dan Isu Strategis	7
C. Sistematika LKjIP	9
BAB II. PERJANJIAN KINERJA.....	10
A. Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab Banjarnegara.....	10
1. Visi Bupati Banjarnegara.....	10
2. Misi Bupati Banjarnegara.....	11
B. Perjanjian Kinerja.....	12
BAB II. AKUNTABILITAS KINERJA.....	18
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
Sasaran 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa	20
Sasaran 2. Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga pemerintahan desa	33
Sasaran 3. Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat	41
Sasaran 4. Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	47
Sasaran 5. Meningkatnya kualitas data dan informasi serta data mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan	52
Sasaran 6. Meningkatnya kesertaan KB.....	57
Sasaran 7. Meningkatnya cakupan kesertaan Tribina dan UPPKS	90
Sasaran 8. Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.....	99
Sasaran 9. Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).....	106
B. Realisasi Anggaran.....	115
C. Capaian Kinerja Lainnya	122
BAB IV. PENUTUP.....	123
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2022	6
Tabel 1.2	Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022	6
Tabel 1.3	Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Golongan Tahun 2022	7
Tabel 2.1	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021	12
Tabel 2.2	Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjarnegara Tahun 2022	13
Tabel 2.3	Rincian Anggaran Per Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022	14
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah	18
Tabel 3.2	Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022	19
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022	20
Tabel 3.4	Rekapitulasi Status Perkembangan Desa Berdasarkan IDM Tahun 2018-2022	21
Tabel 3.5	Rekapitulasi Dana Desa Tahun 2018-2022	22
Tabel 3.6	Rekapitulasi Desa Tertinggal yang Meningkatkan Menjadi Berkembang Tahun 2022	23
Tabel 3.7	Rekapitulasi Penambahan Strata Desa Maju Tahun 2022	24
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2018-2022	24
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Persentase Tingkat Perkembangan Desa Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah	26
Tabel 3.10	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Tingkat Perkembangan Desa	27
Tabel 3.11	Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat dan Anggota BPD Tahun 2022	33
Tabel 3.12	Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat dan Anggota BPD Tahun 2018-2022	34
Tabel 3.13	Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat dan Anggota BPD dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	35

Tabel 3.14	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat dan Anggota BPD	36
Tabel 3.15	Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Perkembangan BUMDes Tahun 2022	41
Tabel 3.16	Rekapitulasi BUMDesa Berdasarkan Klasifikasinya Tahun 2022	42
Tabel 3.17	Realisasi Kinerja Persentase tingkat perkembangan BUMDes Tahun 2018-2022	42
Tabel 3.18	Realisasi Kinerja Persentase tingkat perkembangan BUMDes Membandingkan dengan Target Jangka Menengah	43
Tabel 3.19	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Tingkat Perkembangan BUMDes	44
Tabel 3.20	Realisasi Kinerja Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022	47
Tabel 3.21	Capaian Kinerja Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018-2022	48
Tabel 3.22	Capaian Kinerja Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	49
Tabel 3.23	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat	51
Tabel 3.24	Realisasi Kinerja Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/kelurahan Tiap Tahun pada Tahun 2022	53
Tabel 3.25	Realisasi Kinerja Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun pada Tahun 2018-2022	53
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	54
Tabel 3.27	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun	54
Tabel 3.28	Realisasi Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2022	58
Tabel 3.29	Realisasi Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) Per Kecamatan Tahun 2022 .	58
Tabel 3.30	Capaian Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2018-2022	59
Tabel 3.31	Capaian Kinerja Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	61
Tabel 3.32	Realisasi Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan Target Provinsi Jawa Tengah	61

Tabel 3.33	Realisasi Kinerja Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan dengan Target Nasional	61
Tabel 3.34	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Angka Kelahiran Total (TFR)	63
Tabel 3.35	Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2022	67
Tabel 3.36	Realisasi Kinerja Persentase KB Aktif Per Kecamatan Tahun 2022	68
Tabel 3.37	Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2018-2022	69
Tabel 3.38	Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	70
Tabel 3.39	Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten di Wilayah Sekitar Banjarnegara	70
Tabel 3.40	Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif dibandingkan dengan Target Provinsi Jawa Tengah	71
Tabel 3.41	Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif dibandingkan dengan Target Nasional	71
Tabel 3.42	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Peserta KB Aktif	72
Tabel 3.43	Persentase PUS peserta KB MKJP Tahun 2022	74
Tabel 3.44	Realisasi Kinerja Persentase PUS peserta KB MKJP Per Kecamatan Tahun 2022	75
Tabel 3.45	Realisasi Kinerja Persentase PUS peserta KB MKJP Tahun 2018-2022 ...	75
Tabel 3.46	Realisasi Kinerja Persentase PUS peserta KB MKJP Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	76
Tabel 3.47	Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB MKJP Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten di Wilayah Sekitar Banjarnegara	77
Tabel 3.48	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase PUS Peserta KB MKJP	78
Tabel 3.49	Capaian Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) Tahun 2021	80
Tabel 3.50	Realisasi Kinerja Unmeet Need Per Kecamatan Tahun 2022	81
Tabel 3.51	Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>) Tahun 2017 - 2021	81
Tabel 3.52	Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>) Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	82
Tabel 3.53	Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>) Kabupaten Banjarnegara dibandingkan Kabupaten di Wilayah Sekitar Banjarnegara	82

Tabel 3.54	Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) Dibandingkan dengan Target Provinsi	83
Tabel 3.55	Realisasi Cakupan Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need) Dibandingkan dengan Target Nasional	83
Tabel 3.56	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak terpenuhi (unmeet Need)	84
Tabel 3.57	Realisasi Kinerja Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) Tahun 2022	86
Tabel 3.58	Realisasi Kinerja Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun Tahun 2018 - 2022	87
Tabel 3.59	Realisasi Kinerja Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (>20 tahun) Membandingkan dengan Target Jangka Menengah	88
Tabel 3.60	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Menurunnya PUS Usia 15-19 tahun (<20 tahun)	89
Tabel 3.61	Realisasi Kinerja Persentase Kesertaan Anggota Tribina Tahun 2022	92
Tabel 3.62	Realisasi Kinerja Persentase Kesertaan Anggota Tribina Tahun 2018 - 2022	93
Tabel 3.63	Realisasi Kinerja Persentase Kesertaan Anggota Tribina Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	93
Tabel 3.64	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Kesertaan Anggota Tribina	94
Tabel 3.65	Realisasi Kinerja Cakupan Sasaran PUS yang menjadi Anggota UPPKS Keluarga Sejahtera Tahun 2022	97
Tabel 3.66	Realisasi Kinerja Cakupan Sasaran PUS yang menjadi Anggota UPPKS Keluarga Sejahtera Tahun 2018 - 2022	98
Tabel 3.67	Realisasi Kinerja Cakupan Sasaran PUS yang menjadi Anggota UPPKS Keluarga Sejahtera dibandingkan dengan target Jangka Menengah	98
Tabel 3.68	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Cakupan Sasaran PUS yang menjadi Anggota UPPKS Keluarga Sejahtera	99
Tabel 3.69	Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	101
Tabel 3.70	Realisasi Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022	102
Tabel 3.71	Realisasi Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2022 ..	102
Tabel 3.72	Realisasi Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah	103
Tabel 3.73	Nilai Masing-masing Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat	103

Tabel 3.74	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	104
Tabel 3.75	Realisasi Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022	108
Tabel 3.76	Realisasi Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018-2022	109
Tabel 3.77	Realisasi Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibandingkan dengan target Jangka Menengah	109
Tabel 3.78	Nilai Sistem SAKIP Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara Tahun 2018-2022	104
Tabel 3.79	Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja pada Dokumen SAKIP 2022 ..	110
Tabel 3.80	Penilaian Komponen Pengukuran Kinerja pada Dokumen SAKIP 2022 ...	111
Tabel 3.81	Penilaian Komponen Pelaporan Kinerja pada Dokumen SAKIP 2022	112
Tabel 3.82	Penilaian Komponen Evaluasi Internal pada Dokumen SAKIP 2022	112
Tabel 3.83	Penilaian Komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Dokumen SAKIP 2022	113
Tabel 3.84	Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	114
Tabel 3.85	Rincian Program dan Kegiatan, Pagu, serta Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022	118
Tabel 3.86	Rekapitulasi Perhitungan Konsistensi Penyerapan Anggaran Dispermades PPKB tahun 2022	122

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjarnegara...	5
Gambar 3.1	Rekapitulasi Desa Berdasarkan IDM di Kab. Banjarnegara Tahun 2018-2022	21
Gambar 3.2	Rekapitulasi Besaran Dana Desa Desa Kab. Banjarnegara Tahun 2018-2022	23
Gambar 3.3	Capaian Persentase Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2018-2022	25
Gambar 3.4	Jumlah Desa Berkembang dan Maju di Kab. Banjarnegara Tahun 2018-2022	25
Gambar 3.5	Jumlah Desa Berdasarkan Strata IDM di Kab.Banjarnegara Tahun 2022	26
Gambar 3.6	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD Tahun 2018 – 2022	35
Gambar 3.7	Persentase Tingkat Perkembangan BUMDes Tahun 2018 - 2022	43
Gambar 3.8	Capaian Kinerja Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018-2022	49
Gambar 3.9	TFR Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022	59
Gambar 3.10	Angka Kelahiran Total Kab. Banjarnegara Tahun 2018 - 2022	60
Gambar 3.11	Jumlah Kelahiran Total Kab. Banjarnegara Tahun 2018 - 2022	60
Gambar 3.12	Jumlah Penduduk Kab. Banjarnegara Tahun 2018 - 2022	60
Gambar 3.13	TFR Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022	68
Gambar 3.14	Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2018-2022.....	69'
Gambar 3.15	Persentase Peserta KB Aktif di Kab. Banjarnegara dan Kab/kota sekitar	70
Gambar 3.16	Persentase PUS peserta KB MKJP Tahun 2018-2021	76
Gambar 3.17	Persentase PUS Peserta KB MKJP di Kab. Banjarnegara dan Kab/kota sekitar	81
Gambar 3.18	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>) Tahun 2018-2022	64
Gambar 3.19	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>) Kabupaten Banjarnegara dibandingkan Kabupaten di Wilayah Sekitar	83
Gambar 3.20	Realisasi Kinerja Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) Tahun 2018-2022	88

Gambar 3.21	Realisasi Kinerja Persentase Kesertaan Anggota Tribina Tahun 2018-2022	93
Gambar 3.22	Realisasi Kinerja Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera Tahun 2018-2022	98
Gambar 3.23	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Dispermades PPKB	102
Gambar 3.24	Nilai SAKIP Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara Tahun 2018-2022	109
Gambar 3.25	Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2019 - 2022	123

BAB I. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Latar Belakang

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 6 Tahun 2014). Pembangunan desa memiliki peran yang penting mengingat sebagian besar wilayah merupakan perdesaan. Keberdayaan dan kemandirian desa berkontribusi besar terhadap ketahanan nasional.

Dalam undang-undang desa mengamanatkan dua hal yang dilaksanakan secara kolaboratif, yaitu pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan tersebut diarahkan untuk memajukan perekonomian masyarakat desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan merupakan mandat yang cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan. Pembangunan desa dan kawasan perdesaan akan lebih optimal dengan memanfaatkan sumberdaya dan potensi lokal sehingga mempunyai keunggulan komparatif dan daya saing dengan didukung oleh teknologi tepat guna.

Pemerintah melalui PP Nomor 11 Tahun 2021 mendorong Desa untuk membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu wadah mengelola usaha, memanfaatkan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan dan atau jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi di kawasan perdesaan melalui BUMDesa/BUMDesa Bersama diharapkan menunjang pertumbuhan ekonomi dan masyarakat perdesaan dan kemandirian desa.

Kementerian Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal memotret kemandirian desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM) berdasarkan Permendes PDTT nomor Nomor 2 Tahun 2016. Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. IDM disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.

Penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat dan desa telah berdampak positif terhadap peningkatan perkembangan desa berdasarkan klasifikasi IDM. Peningkatan ekonomi masyarakat dicapai melalui perkembangan BUMDes dan BUMDes Bersama, lembaga ekonomi masyarakat dan pengembangan kawasan perdesaan.

Dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat, Dispermades PPKB melaksanakan pendampingan terhadap kebijakan nasional transformasi eks - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat - Mandiri Perdesaan (PNPM - MP) menjadi BUMDes Bersama sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta Pokok Pikiran Permendes PD TT Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM MPD Menjadi BUM Desa Bersama.

Dalam mendukung terwujudnya ketahanan nasional perlu didukung oleh pengendalian perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. (UU No. 52 Tahun 2009).

Perkembangan penduduk dan pembangunan keluarga tidak lagi dipahami secara sempit sebagai usaha untuk mempengaruhi pola dan arah demografi semata, tetapi sasarannya jauh lebih luas, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat baik dalam arti fisik maupun non fisik termasuk spiritual. Dampak perubahan dinamika kependudukan akan terasa dalam jangka waktu yang lama, sehingga seringkali kepentingannya diabaikan. Luasnya cakupan masalah kependudukan menyebabkan pembangunan kependudukan harus dilakukan secara lintas sektor dan lintas bidang.

Penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan pembangunan harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan karena jumlah penduduk yang besar dengan kualitas rendah dan pertumbuhan yang cepat akan memperlambat tercapainya kondisi yang ideal antara kuantitas dan kualitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas dilakukan upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional.

Penyelenggaraan program pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah pengaruh pada positif terkendalinya angka kelahiran total. Terkendalinya angka kelahiran total menjadi sangat penting dalam peningkatan kualitas penduduk dan derajat kesehatan masyarakat. Peningkatan kualitas penduduk dan derajat kesehatan masyarakat disisi lain memiliki tantangan yang berkaitan dengan isu strategis stunting. OPD KB memiliki peran aktif melalui Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, dimana OPD KB ditunjuk sebagai Ketua Pelaksana Percepatan penurunan Stunting.

2. Dasar Hukum Berdirinya Organisasi

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- d. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

Dispermades PPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dispermades PPKB menyelenggarakan fungsi :

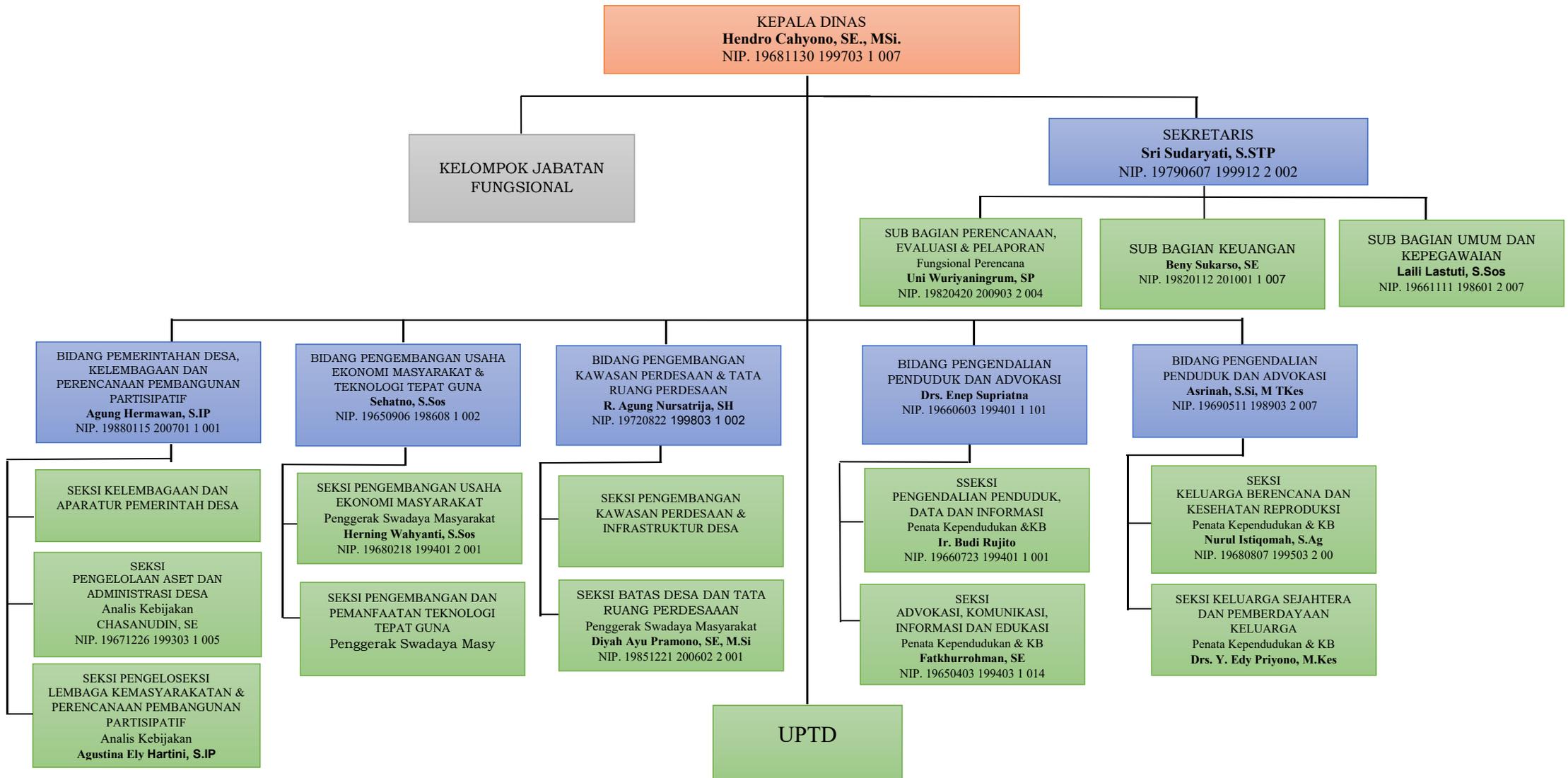
- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara merupakan dinas Tipe A yang dipimpin oleh Kepala Setingkat Eselon II, dibantu oleh Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Bidang (Eselon III) dan 14 (empat belas) Kepala Seksi dan Sub Bagian (Eselon IV) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2018. Namun sejak Bulan Desember Tahun 2021, struktur organisasi mengalami perubahan terkait penyederhanaan birokrasi demi terselenggaranya fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien. Penyederhanaan birokrasi sebagaimana dimaksud yaitu transformasi Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional sebagaimana diatur dalam Permenpan dan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Sebanyak 10 Pegawai Eselon IV telah dilantik ke dalam jabatan Fungsional Perencana, Analisis Kebijakan Penggerak Swadaya Masyarakat serta Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana pada tanggal 31 Desember 2021. Sedangkan 4 (empat) jabatan Eselon IV lainnya tidak mengalami perubahan yaitu Sub Bagian Keuangan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa dan Seksi Pengembangan Kawasan perdesaan dan Infrastruktur Desa. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara

5. Keadaan Internal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Keluarga Berencana

a) Komposisi Pegawai DISPERMADES PPKB menurut status kepegawaian

Komposisi sumberdaya manusia (pegawai) yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan status kepegawaian sebagai berikut :

Tabel 1.1. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2022

No	Status Kepegawaian	Jumlah		Total
		L	P	
1	2	3	4	5
1.	PNS	21	15	36
2.	PTT	-	1	1
3.	THL	11	17	28
Jumlah		32	33	65

Sumber : Dispermades PPKB, 2022

Komposisi pegawai yang ada pada DISPERMADES PPKB tahun 2022 berdasarkan status kepegawaian jumlah terbesar yaitu PNS masih sebesar 36 orang, kemudian disusul THL sebanyak 28 orang dan PTT 1 orang. Pada awal tahun 2022 jumlah ASN sebanyak 40 pegawai, namun berkurang karena adanya mutasi pegawai sebanyak 3 orang dan pensiun sebanyak 1 orang. Terdapat kekosongan 2 jabatan Eselon IV yaitu Seksi Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa dan Seksi Pengembangan Kawasan perdesaan dan Infrastruktur Desa karena mutasi dan belum ada yang menggantikan.

b) Komposisi Pegawai DISPERMADES PPKB menurut tingkat pendidikan

Komposisi sumberdaya manusia (pegawai) yang ada pada Dispermades PPKB berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.2. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	2	3	4	5	6	7
1	SD Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMP Sederajat	2	0	0	0	2
3	SMA Sederajat	8	1	10	8	27
4	D3	0	1	1	4	6
5	S1	10	8	6	0	24
6	S2	2	4	0	0	6
Jumlah		22	14	17	12	65

Sumber : Dispermades PPKB, 2022

Berdasarkan Tabel 1.2, komposisi pegawai yang ada di Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 berdasarkan pendidikan jumlah terbanyak yaitu pendidikan SMA sebanyak 27, disusul S1 dengan jumlah 24 orang, S: 2 sebanyak 6 orang. Jenjang pendidikan yang tinggi merupakan potensu yang baik dalam mendukung kinerja instansi.

- c) Komposisi Pegawai DISPERMADES PPKB menurut pangkat dan golongan ruang

Komposisi pegawai berdasarkan golongan di DISPERMADES PPKB Tahun 2022 pada Tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1.3. Komposisi Pegawai Dispermades PPKB Berdasarkan Golongan Tahun 2022

No	Pangkat	Golongan	L	P	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
2	Pembina Tk. I	IV/b	2	-	2
3	Pembina	IV/a	4	3	7
4	Penata Tk. I	III/d	5	4	9
5	Penata	III/c	-	2	2
6	Penata Muda Tk.I	III/b	-	1	1
7	Penata Muda	III/a	3	3	6
8	Pengatur Tingkat I	II/d	5	1	6
9	Pengatur	II/c	1	-	1
10	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	2	-	1
11	Pengatur Muda	II/a	-	-	1
12	Juru Tk.I	I/d	-	-	-
13	Juru	I/c	-	-	-
14	PTT	-	0	1	1
15	THL	-	11	17	28
Jumlah			35	35	65

Sumber : Dispermades PPKB, 2022

Berdasarkan Tabel 1.3, pegawai berdasarkan golongan di DISPERMADES PPKB, jumlah terbanyak pada golongan III sebanyak 23 orang, kemudian disusul golongan IV dan golongan II dengan jumlah yang sama masing-masing 9 orang. Pegawai dengan golongan ruang yang tinggi memiliki kompetensi yang lebih tinggi sehingga merupakan potensi dan kontribusi positif bagi kinerja organisasi.

B. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Setelah mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan perangkat daerah ditinjau dari : gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada Renstra

K/L, sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah Provinsi, implikasi RTRW bagi pelayanan perangkat daerah, dan implikasi KLHS bagi pelayanan perangkat daerah. Setelah dianalisis terhadap permasalahan sebagaimana tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara menentukan isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Masih rendahnya desa dengan strata maju/mandiri dan masih banyaknya desa dengan strata tertinggal/sangat tertinggal;
2. Masih rendahnya kualitas pengelolaan pemerintahan desa, yang ditandai dengan :
 - a. Belum dipahaminya proses perencanaan pembangunan oleh aparat desa serta kelembagaan masyarakat dan desa;
 - b. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan aparatur pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa;
 - c. Masih rendahnya kualitas pengelolaan keuangan desa;
 - d. Masih rendahnya pengelolaan informasi desa;
3. Masih rendahnya kemandirian desa dalam partisipasi pembangunan di Kabupaten Banjarnegara, yang ditunjukkan dengan :
 - a. Masih rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di perdesaan;
 - b. Belum adanya regulasi penataan ruang kawasan perdesaan sebagai rujukan pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. Masih sedikitnya desa yang memiliki kepastian hukum tentang batas wilayah desa;
 - d. Masih kurangnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dalam pembangunan desa.
4. Masih rendahnya pendapatan ekonomi masyarakat dan desa yang ditunjukkan dengan:
 - a. Kurangnya pemahaman dari desa akan pentingnya kerjasama antar desa;
 - b. Rendahnya kualitas pasar desa, sebagai salah satu simpul ekonomi;
 - c. Kurang optimalnya manajemen pengelolaan BUMDes;
 - d. Belum semua desa memiliki lembaga ekonomi masyarakat / BUMDes;
 - e. Belum terdokumentasinya dan kurangnya implementasi kreativitas dan inovasi teknologi tepat guna;

5. Kuantitas dan kualitas data rinci keluarga belum tersedia secara optimal;
6. Belum tersedianya hasil kajian dalam rangka mendukung pembangunan berwawasan kependudukan;
7. Belum terkendalinya Total Fertility Rate (TFR);
8. Masih banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) tidak ber-KB;
9. Masih rendahnya cakupan Pemakaian Metode Kontrasepsi Jangka Panjang;
10. Masih cukup tingginya jumlah perempuan menikah dibawah usia 20 tahun;
11. Masih rendahnya sasaran yang menjadi anggota kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera;
12. Masih rendahnya sasaran yang menjadi anggota kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS), khususnya pada kelompok UPPKS yang Miskin.

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP

Sistematika penyusunan laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Bercana Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Gambaran Umum
- B. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi
- D. Sistematika Penyusunan LKJIP

BAB II. PERJANJIAN KINERJA

- A. Visi dan Misi Kepala Daerah
- B. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Akuntabilitas Kinerja
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II. PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. VISI

Visi pembangunan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati yang disampaikan pada saat proses pemilihan Kepala Daerah. Visi tersebut adalah sebagai berikut:

“Banjarnegara Bermartabat dan Sejahtera”

Dalam menerjemahkan visi tersebut dilakukan melalui penjelasan tiap-tiap pokok visi yang ada di dalamnya, dimana terdapat 2 (dua) pokok visi, yaitu:

1. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang bermartabat

Kata bermartabat menurut kamus besar bahasa indonesia berarti mempunyai martabat, dimana kata martabat berarti tingkat harkat kemanusiaan atau harga diri. Kata bermartabat merujuk pada kondisi terpenuhinya harkat kemanusiaan yang tercermin oleh terpenuhinya hak asasi setiap individu di Kabupaten Banjarnegara. Kata ini juga menunjukkan adanya persamaan hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh masyarakat Banjarnegara.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui pemenuhan kewajiban negara terhadap hak dasar warganya maka setiap warga Banjarnegara dapat meningkatkan harkatnya sebagai manusia dan dapat bersanding dengan masyarakat daerah lain baik di level regional maupun nasional secara terhormat. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya kondusivitas daerah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Banjarnegara.

2. Kabupaten Banjarnegara menjadi kabupaten yang sejahtera

Menurut kamus besar bahasa indonesia kata sejahtera dapat diartikan aman sentosa dan makmur. Aman sentosa mengandung makna bebas dari segala kesukaran sedang makmur dapat diartikan serba kecukupan. Secara lebih luas, sejahtera memiliki makna terpenuhinya aspek-aspek fisik, spiritual, emosional, intelektual, ekonomi, sosial, budaya, dan ekologis, sehingga sejahtera merupakan suatu keadaan hidup yang berkualitas.

Dengan pokok visi ini, diharapkan melalui peningkatan pembangunan secara berkelanjutan maka dapat terwujud hasil-hasil pembangunan yang berkualitas dan merata. Untuk mencapai hal tersebut, maka peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat yang tercermin melalui reformasi birokrasi harus terus dilakukan. Hal tersebut memiliki arti penting, karena pemerintahan yang berwibawa bukan hanya menghasilkan produk pemerintahan yang baik, namun juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan serta meningkatnya tata kelola pemerintahan. Pada prosesnya pencapaian pokok visi tersebut harus memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, berpedoman pada RTRW, dan mengendalikan alih fungsi lahan.

2. MISI

Misi-misi Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 adalah :

1. Mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, damai dan demokratis;
2. Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan konsep tata kelola yang baik;
3. Mewujudkan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berbasis pada pengembangan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, produktif, transparan dan akuntabel dengan tenaga profesional;
5. Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2018, menyebutkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mendukung pencapaian misi pembangunan jangka menengah daerah :

1. Misi Ke 2 (dua), : **“Mewujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan berdasarkan konsep tata kelola yang baik”**, dengan tujuan Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa didukung strategi kebijakan meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa;

2. Misi Ke 5 (lima), : “**Mewujudkan kemartabatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan cakupan pemenuhan hak dasar**”, dengan tujuan Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas dan sasaran Meningkatkan kualitas dan di dukung Strategi Kebijakan Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan.

B. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Tujuan strategis Dispermades PPKB dalam rangka mendukung pencapaian misi Kepala Daerah, yaitu (1). Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, (2). Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat melalui perkembangan BUMDes, penerapan teknologi tepat guna serta mengembangkan jenjang ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat, (3). Mewujudkan partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat, (4). Mewujudkan pertumbuhan penduduk seimbang, (5). Menurunkan angka kelahiran (6). Meningkatkan parstisipasi keluarga dalam mengikuti kegiatan Tribina dan UPPKS, (7). Terwujudnya pelayanan prima (8). serta Meningkatnya kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis jangka menengah, ditetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja tahunan Dispermades PPKB sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Tahun 2027-2022 dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022. Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari kepala Daerah kepada unit kerja dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dokumen Perjanjian Tahun Kinerja Tahun 2022 Kepala Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara mengalami satu kali penyesuaian yaitu pada anggaran perubahan Tahun 2022. Penyesuaian tersebut tidak berpengaruh terhadap target indikator namun hanya pada besaran alokasi anggaran untuk optimalisasi kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Uraian	Perjanjian Kinerja Murni	Perjanjian Kinerja Perubahan
1	2	3	4
1.	Indikator Kinerja :		
	a. Persentase tingkat perkembangan desa	3%	3%
	b. Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	90%	90%

No	Uraian	Perjanjian Kinerja Murni	Perjanjian Kinerja Perubahan
1	2	3	4
	c. Persentase tingkat perkembangan BUMDes	70%	70%
	d. Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	30%	30%
	e. Angka Kelahiran Total (TFR)	2,30	2,30
	f. Persentase peserta KB aktif	79,24%	79,24%
	g. Persentase PUS peserta KB MKJP	28,75%	28,75%
	h. Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	6,99%	6,99%
	i. Menurunnya PUS usia 19 tahun (<20 Tahun)	2,87%	2,87%
	j. Persentase kesertaan anggota tribina	44,12%	44,12%
	k. Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera	25,36%	25,36%
	l. Nilai surey kepuasan masyarakat	79	79
	m. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	BB (66)	BB (66)
2.	Anggaran	Rp21.537.630.120	Rp22.523.948.490

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) indikator. Indikator kinerja mengacu dan pada tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara. Ringkasan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2. Penetapan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Banjarnegara Tahun 2022

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa	1.1 Persentase tingkat perkembangan desa	3%
2.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa	2.1 Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	90%
3.	Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat	3.1 Persentase tingkat perkembangan BUMDes	70%
4.	Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	4.1 Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	30%
5.	Meningkatnya Kualitas data dan informasi serta Data Mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan	6.1 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan tiap tahun	100%
6.	Meningkatnya kesertaan KB	7.1 Angka Kelahiran Total (TFR) 7.2 Persentase peserta KB aktif	2,30 79,24%

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target	
1	2	3	4	
		7.3	Persentase PUS peserta KB MKJP	28,75%
		7.4	Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	6,99%
		7.5	Menurunnya PUS usia 19 tahun (<20 Tahun)	2,87%
7.	Meningkatnya cakupan kesertaan Tribina dan UPPKS	8.1	Persentase kesertaan anggota tribina	43,12%
		8.2	Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera	25,36%
8.	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	9.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79
9.	Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	10.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (66)

Sumber : Perjanjian Kinerja Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Indikator kinerja Kepala Dinas Tahun 2022 tersebut kemudian diturunkan menjadi indikator kinerja pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara. Dengan adanya penjenjangan perjanjian kinerja ini diharapkan terdapat kesinambungan antara target kinerja kepala dengan pejabat dibawahnya.

Dukungan anggaran berdasarkan pada Dokumen Pelaksana Anggaran Perubahan (DPAP) Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memperoleh anggaran untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan sebesar Rp22.523.948.490,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp10.691.966.090,00 dan DAK Sub Bidang KB sebesar Rp11.831.982.400,00. Anggaran Sub Bidang KB terbagi menjadi 1).DAK Non Fisik (BOKB) sebesar Rp9.462.966.090,00, 2).DAK Fisik Reguler sebesar Rp2.065.039.400,00 dan 3).DAK Fisik Penugasan sebesar Rp330.000.000,00. Rincian anggaran Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara sebagai berikut :

Tabel 2.3 Rincian Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp6.212.608.135,00
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000,00
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00
	2. Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.500.000,00
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.516.462.250,00
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.415.322.250,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPKD	101.140.000,00
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	499.129.800,00
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.600.000,00
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	416.529.800,00
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.431.000,00
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.431.000,00
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	904.823.485,00
	1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	904.823.485,00
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	214.761.600,00
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Peeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.940.000,00
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.001.600,00
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.820.000,00
B.	Program Penataan Desa	22.500.000,00
7.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	22.500.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	22.500.000,00
C.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	10.000.000,00
8.	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	10.000.000,00
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10.000.000,00
D.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.025.207.955,00
9.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.025.207.955,00
	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	500.000,00
	2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	3.000.000,00
	3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000,00
	4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.485.127.955,00
	5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	278.000.000,00
	6. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	19.500.000,00
	7. Fasilitasi Pengangkatan dan Peberhentian Perangkat Desa	1.000.000,00
	8. Fasilitasi Pengusulan Profil Desa	196.080.000,00
	9. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5.000.000,00
	10. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	13.000.000,00
	11. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.000.000,00
	12. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	1.000.000,00
	13. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.000.000,00
	14. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	500.000,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
E.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	393.150.000,00
10.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	393.150.000,00
	1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RT, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	108.000.000,00
	2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10.000.000,00
	3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	14.000.000,00
	4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Teknologi Tepat Guna	110.000.000,00
	5. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	-
	6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	151.150.000,00
F.	Program Pengendalian Penduduk	301.230.000,00
11.	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	3.000.000,00
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	3.000.000,00
12.	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	298.230.000,00
	1. Perumusan Parameter Kependudukan	3.000.000,00
	2. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	27.630.000,00
	3. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian apangan dan Pelayanan KB	267.600.000,00
G.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.711.672.400,00
13.	Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.262.015.000,00
	1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	4.375.000,00
	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00
	3. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	70.640.000,00
	4. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	312.000.000,00
	5. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	810.000.000,00
	6. Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,00
14.	Kegiatan Pendayagunaan Teaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.334.400.000,00
	1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.334.400.000,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
15.	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.183.757.400,00
	1. Pengendalian Pendistribusian Aat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.150.000,00
	2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka panjang (MKJP)	1.072.039.000,00
	3. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan KB	3.000.000,00
	4. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.065.668.000,00
	5. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.900.000,00
	6. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	2.000.000,00
16.	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daserah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	931.500.000,00
	1. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	931.500.000,00
H.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.847.580.000,00
17.	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.847.580.000,00
	1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	330.000.000,00
	2. Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.000.000,00
	3. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.000.000,00
	4. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.509.580.000
	5. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.000.000,00
	6. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2.000.000,00
Jumlah		22.523.948.490,00

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2022 merupakan gambaran pencapaian sasaran ataupun tujuan, sebagai penjabaran visi dan misi, arah kebijakan dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja Dispermades PPKB bisa dilihat melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), realisasi anggaran maupun capaian kinerja lainnya.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun anggaran 2022, Dispermades PPKB telah menetapkan 9 (sembilan) sasaran. Ke 9 (sembilan) sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan 14 (empat belas) indikator kinerja. Capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi, perbandingan realisasi dengan tahun sebelumnya, perbandingan dengan target jangka menengah, permasalahan dan solusi serta analisis efisiensi sumberdaya.

Dalam rangka melaksanakan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan perangkat daerah sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1.	Lebih dari 100%	Sangat baik
2.	75 - 100	Baik
3.	55 - 74%	Cukup
4.	Kurang dari 55%	Kurang

Realisasi sampai akhir tahun 2022 menunjukkan bahwa dari 14 indikator tersebut, rata-rata capaian kinerja tercapai dengan sangat baik (121,93%) dan efisien dalam penyerapan anggaran (94,90%). Realisasi kinerja dan penyerapan anggaran tahun anggaran 2022 disajikan sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rincian singkat realisasi kinerja masing-masing indikator sasaran Dispermades PPKB Tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2. Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA				
		URAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	1.1	Persentase tingkat perkembangan desa	3%	5,80%	193,33%
2	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga pemerintahan desa	2.1	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	90%	97,34%	108,16%
3	Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat	3.1	Persentase tingkat perkembangan BUMDes	70%	84,05%	120,07%
4	Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	4.1	Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	30%	36,96%	123,20%
5	Meningkatnya kualitas data dan informasi serta data mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan	5.1	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun	100%	100%	100%
6	Meningkatnya kesertaan KB	6.1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,30	1,75	131,43%
		6.2	Persentase peserta KB aktif	79,24%	77,20%	97,43%
		6.3	Persentase PUS peserta KB MKJP	28,75%	32,42%	112,77%
		6.4	Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	6,99%	6,99%	100,00%
		6.5	Menurunnya PUS usia 19 tahun (<20 Tahun)	2,87%	1,45%	197,93%
7	Meningkatnya cakupan kesertaan Tribina dan UPPKS	7.1	Persentase kesertaan anggota tribina	44,12%	44,17%	100,11%
		7.2	Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera	25,36%	25,47%	100,43%
8	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	8.1	Nilai surey kepuasan masyarakat	79	82,865	104,89%
9	Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	9.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B (66)	BB (77,42)	117,30%
Rata-rata capaian						121,93%

Sumber : Data DispermadesPPKB Diolah, 2022

Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengelolaan Pemerintahan Desa

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase tingkat perkembangan desa. Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat perkembangan desa. Status kemajuan dan kemandirian desa adalah ukuran pengklasifikasian desa dalam rangka menentukan intrvensi baik anggaran maupun kebijakan pembangunan desa.

Perangkat indikator yang dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju Desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa. Indeks Desa Membangun menggambarkan perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial.

Pemutakhiran stasus Indeks Desa Membangun Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tanggal 11 Juli 2022. Adapun realisasi tingkat perkembangan desa tahun 2022 di Kabupaten Banjarnegara dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.3. Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase tingkat perkembangan desa	3%	5,80%	193,33%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Capaian kinerja persentase tingkat perkembangan desa diperoleh penghitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah desa berkembang tahun } n - \text{Jumlah Desa Berkembang tahun } n - 1}{\text{Jumlah desa berkembang tahun } n - 1} \times 100\%$$

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 061/1071 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Banjarnegara

$$= \frac{\text{Jumlah desa berkembang tahun 2021} - \text{Jumlah Desa Berkembang tahun 2020}}{\text{Jumlah desa berkembang tahun 2021}} \times 100\%$$

$$= \frac{(64 - 44) + (199 - 207)}{207} \times 100\%$$

$$= \frac{12}{207} \times 100\%$$

$$= 5,80\%$$

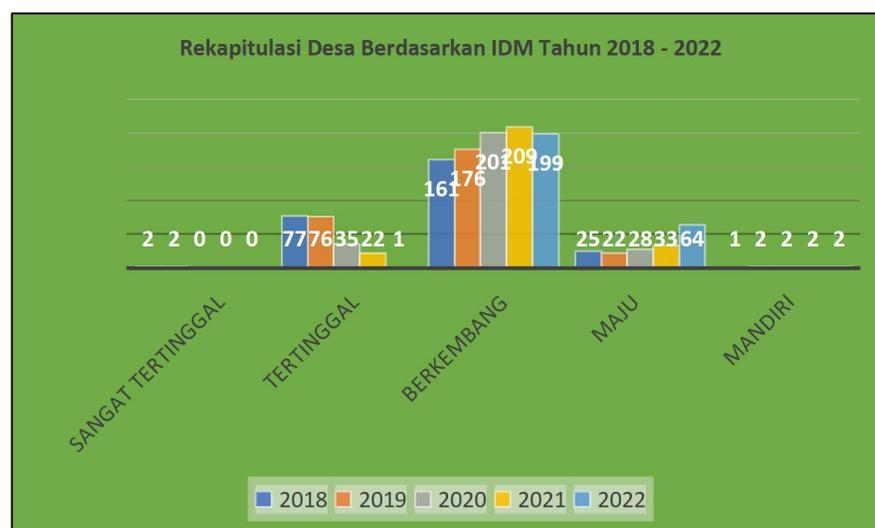
Berdasarkan data di atas, realisasi capaian kinerja sebesar 5,80% sudah memenuhi target yang telah ditetapkan sebesar 3%. Hal tersebut menunjukkan jumlah desa yang berkembang melebihi target yang ditetapkan. Rekapitulasi jumlah desa berdasarkan strata Indeks Desa Membangun di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 3.4. Rekapitulasi Status Perkembangan Desa Berdasarkan IDM Tahun 2018-2022

Tahun	Indeks Desa Membangun					Jumlah
	Sangat tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri	
2018	2	64	176	22	2	266
2019	0	35	201	28	2	266
2020	0	22	209	33	2	266
2021	0	13	207	44	2	266
2022	0	1	199	64	2	266

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Berdasarkan tabel di atas, selama kurun waktu 2018-2022 status perkembangan desa mengalami perkembangan yang sangat baik. Desa Sangat tertinggal menjadi tidak ada, desa tertinggal tersisa satu desa serta desa berkembang serta maju mengalami peningkatan yang cukup banyak. Namun demikian, jumlah desa mandiri belum mengalami peningkatan dari jumlah dua desa yaitu Desa Mandiraja Kulon Kecamatan Mandiraja dan Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa. Rekapitulasi desa berdasarkan strata Indeks Desa Membangun di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 - 2022 digambarkan pada grafik sebagai berikut :



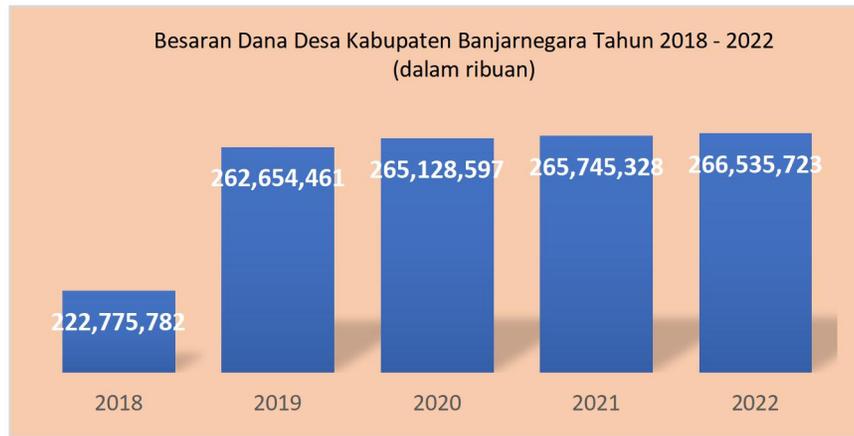
Gambar 3.1. Rekapitulasi Desa Berdasarkan IDM di Kab. Banjarnegara Tahun 2018-2022

Status perkembangan desa bersifat dinamis, artinya selain bisa meningkat namun bisa juga menurun. Meskipun status perkembangan desa umumnya meningkat karena didukung oleh Dana Desa. Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Alokasi Dana Desa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 sebesar Rp266.535.723.000,00 dimana pengelolaannya diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomo 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Alokasi Dana Desa Tahun 2022 naik dibandingkan tahun 2021 yaitu Rp265.745.328.000,00 sehingga kenaikan sebesar Rp790.395.000,00. Rekapitulasi Dana Desa Tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 3.5. Rekapitulasi Dana Desa Tahun 2018-2022

No	Kecamatan	Tahun (Dalam ribuan)				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Susukan	12.141.902	14.265.032	14.778.049	14.523.750	8.441.784
2.	Purwareja Klampok	6.234.126	7,688,023	7.417.299	7.931.135	16.590.820
3.	Mandiraja	12.944.338	15.021.772	15.417.431	16.909.556	14.837.377
4.	Purwanegara	11.694.338	13.182.109	13.553.389	15.302.273	16.675.367
5.	B a w a n g	12.697.783	15.855.663	15.965.451	17.892.956	3.967.452
6.	Banjarnegara	3.359.961	3.975.479	3.832.127	4067.968	10.794.997
7.	S i g a l u h	10.312.189	11.629.223	11.651.922	11.292.849	15.194.633
8.	Madukara	13.164.152	15.131.598	15.338.965	15.605.698	15.190.636
9.	Banjarmangu	13.332.118	15.329.763	15.614.269	15.699.949	9.733.816
10.	Wanadadi	8.147.649	9.597.433	9.460.292	9.404.022	10.919.771
11.	R a k i t	8.625.735	10.092.511	10.529.412	10.486.767	19.922.897
12.	Punggelan	15.860.340	18.967.159	19.148.895	18.759.766	12.664.618
13.	Karangkoobar	11.086.576	13.909.949	13.646.070	13.434.591	15..355.837
14.	Pagentan	13.194.240	15.537.360	16.013639	15.669.848	17.233.240
15.	Pejawaran	15.078.515	18.182.921	181.06.618	16.659.230	8.928.303
16.	B a t u r	6.844,951	8.577.547	86.11.191	8.488.235	19.139.746
17.	Wanayasa	15.697.460	18.318.383	190.35.310	17.791.138	16.514.795
18.	Kalibening	15.069.005	17.635.484	171.60.577	16.543.965	8.607.279
19.	Pandanarum	7.965.446	9.646.911	93.16.934	9.017.347	10.454.337
20.	Pagedongan	8.324.494	10.109.141	105.30.757	10.264.285	8.441.784
Jumlah		222.775.782	262.654.461	265.128.597	265.745.328	266.535.723

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022



Gambar 3.2. Rekapitulasi Besaran Dana Desa di Kab. Banjarnegara Tahun 2018-2022

Berdasarkan data di atas, dukungan Dana Desa meningkat dari tahun ke tahun. Diharapkan mampu mempercepat pembangunan di perdesaan, mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan status perkembangan desa.

Pada tahun 2021 terdapat 13 desa dengan strata tertinggal dan 12 desa diantaranya meningkat menjadi berkembang. Sedangkan 1 desa masih tetap tertinggal yaitu Desa Sirkandi Kecamatan Purwareja Klampok. Secara umum, Indeks Ketahanan Ekonomi di Desa Sirkandi masih sangat rendah diantaranya dikarenakan belum tersedianya akses perdagangan/pasar, masih terdapat akses jalan yang rusak, akses transportasi (angkutan umum) yang melewati desa belum tersedia, dan permasalahan lainnya. Adapun rekapitulasi desa tertinggal yang meningkat menjadi desa berkembang sebagai berikut :

Tabel 3.6. Rekapitulasi Desa Tertinggal yang Meningkatkan Menjadi Berkembang Tahun 2022

No	Desa	Kecamatan	Strata Desa		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	
1.	Karangjati	Susukan	Tertinggal	Berkembang	Naik
2.	Sawal	Sigaluh	Tertinggal	Berkembang	Naik
3.	Paweden	Karangkobar	Tertinggal	Berkembang	Naik
4.	Gumelar	Karangkobar	Tertinggal	Berkembang	Naik
5.	Purwodadi	Karangkobar	Tertinggal	Berkembang	Naik
6.	Slatri	Karangkobar	Tertinggal	Berkembang	Naik
7.	Pasuruhan	Karangkobar	Tertinggal	Berkembang	Naik
8.	Karanggondang	Karangkobar	Tertinggal	Berkembang	Naik
9.	Ambal	Karangkobar	Tertinggal	Berkembang	Naik
10.	Binangun	Karangkobar	Tertinggal	Berkembang	Naik
11.	Kalibombong	Kalibening	Tertinggal	Berkembang	Naik
12.	Sinduaji	Pandanarum	Tertinggal	Berkembang	Naik

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Tidak seperti tahun sebelumnya dimana terdapat desa yang menurun stratanya, Tahun 2022 tidak ada desa yang menurun stratanya. Peningkatan strata selain menjadi berkembang, juga menjadi maju. Rekapitulasi berkembang yang naik menjadi desa maju sebagai berikut :

Tabel 3.7. Rekapitulasi Penambahan Strata Desa Maju Tahun 2022

No	Desa	Kecamatan	Strata Desa		Keterangan
			Sebelum	Sesudah	
1.	Banjengan	Mandiraja	Berkembang	Maju	Naik
2.	Kebakalan	Mandiraja	Berkembang	Maju	Naik
3.	Mertasari	Purwanegara	Berkembang	Maju	Naik
4.	Binorong	Bawang	Berkembang	Maju	Naik
5.	Blambangan	Bawang	Berkembang	Maju	Naik
6.	Bojanegara	Sigaluh	Berkembang	Maju	Naik
7.	Bandingan	Sigaluh	Berkembang	Maju	Naik
8.	Pagelak	Madukara	Berkembang	Maju	Naik
9.	Banjarkulon	Banjarmangu	Berkembang	Maju	Naik
10.	Kasilib	Wanadadi	Berkembang	Maju	Naik
11.	Medayu	Wanadadi	Berkembang	Maju	Naik
12.	Adipasir	Rakit	Berkembang	Maju	Naik
13.	Karangkobor	Karangkobor	Berkembang	Maju	Naik
14.	Lekasana	Karangkobor	Berkembang	Maju	Naik
15.	Kasmaran	Pagentan	Berkembang	Maju	Naik
16.	Diengkulon	Batur	Berkembang	Maju	Naik
17.	Susukan	Wanayasa	Berkembang	Maju	Naik
18.	Pesantren	Wanayasa	Berkembang	Maju	Naik
19.	Kebutuhjurang	Pagedongan	Berkembang	Maju	Naik
20.	Pesangkalan	Pagedongan	Berkembang	Maju	Naik

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022. Prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk program dan kegiatan yaitu (1). Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, (2). Program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, dan (3). Mitigasi dan penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan desa. Pada prioritas ketiga termasuk didalamnya untuk dukungan desa dan relawan desa aman COVID-19 sebesar paling rendah 8 persen.

Realisasi kinerja persentase tingkat perkembangan desa tahun 2022 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8. Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	5	6
1	Persentase tingkat perkembangan desa	9% (176 desa)	14,20% (201 desa)	3,98% (209 desa)	4,31 (216 desa)	5,80 (219 desa)

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Realisasi persentase tingkat perkembangan desa tahun 2018 sampai dengan 2022 digambarkan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 3.3. Capaian Persentase Tingkat Perkembangan Desa Tahun 2018-2022

Berdasarkan Tabel 3.8, capaian persentase tingkat perkembangan desa tertinggi pada tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan masih banyak desa stratanya menjadi berkembang atau maju yaitu sebanyak 64 desa sedangkan pada tahun berikutnya jumlah desa yang ditingkatkan stratanya hanya 22 desa dan sebagian besar terletak pada daerah dengan aksesibilitas yang kurang baik dibandingkan daerah lainnya serta pada daerah rawan bencana. Peningkatan jumlah desa berkembang dan maju tahun 2018 sampai dengan 2022 disajikan pada gambar 3.3.



Gambar 3.4. Jumlah Desa Berkembang di Kab. Banjarnegara Tahun 2018-2022

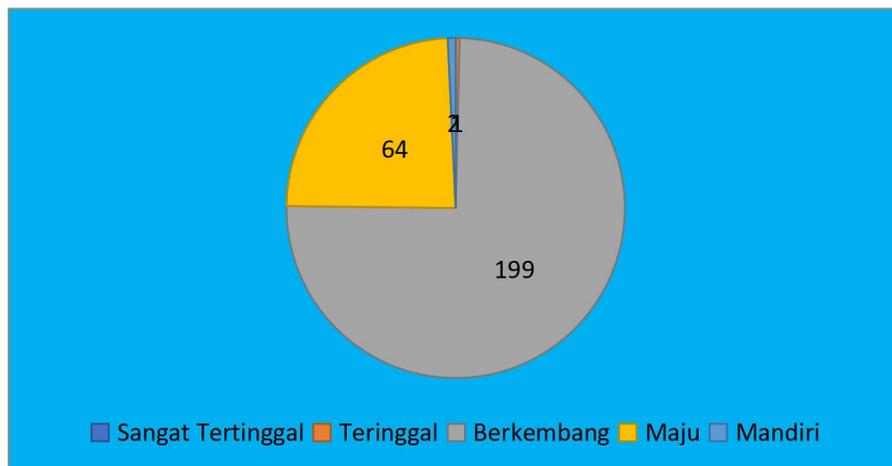
Capaian kinerja persentase tingkat perkembangan desa dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Persentase Tingkat Perkembangan Desa Dibandingkan Dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2022	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Persentase tingkat perkembangan desa	3%	5,80%	193,33%

Sumber :Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3.9, realisasi kinerja persentase tingkat perkembangan desa sudah mencapai target akhir Renstra tahun 2022. Gambaran jumlah desa berdasarkan strata Indeks Desa Membangun di Kabupaten Banjarnegara saat ini digambarkan pada gambar 3.3.



Gambar 3.5. Jumlah Desa Berdasarkan Strata IDM di Kab.Banjarnegara Tahun 2022

Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator :

1. Pemahaman desa terkait PMK Nomor 190 Tahun 2021 sudah cukup baik, khususnya pada indikator wajib yang mempunyai bobot tinggi dalam meraih Alokasi Kinerja, yakni perubahan skor dan perubahan status desa dalam IDM. Hal ini berpengaruh pada pengisian indikator penilaian yang lebih obyektif;
2. Data dan informasi dasar IDM dijadikan acuan program pembangunan desa untuk peningkatan strata IDM;
3. Adanya upaya desa dalam mengatur strategi kenaikan Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan / Ekologi;
4. Terciptanya konsolidasi yang efektif antara Dispermades, Aparat kecamatan dan Tim Pendamping Profesional yang didukung Pendamping Desa maupun Pendamping Lokal Desa dalam mendata dan menginput potensi desa.

Upaya mempertahankan capaian :

1. Melaksanakan pendampingan kepada desa terutama berkaitan dengan indikator-indikator yang masih rendah dan berpengaruh pada peningkatan strata desa untuk sebagai bahan pertimbangan dalam proses perencanaan pembangunan berikutnya;
2. Melakukan pendampingan dan evaluasi intensif terkait proses pengisian indikator IDM sehingga hasil penilaian strata desa lebih akurat sehingga bisa sebagai bahan evaluasi;
3. Bekerjasama dengan pimpinan wilayah setempat yaitu Camat serta instansi terkait untuk bersama-sama secara intensif mengawal proses pembangunan desa agar desa semakin maju dan mandiri.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator persentase tingkat perkembangan desa digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10. Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Tingkat Perkembangan Desa

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	22.500.000	17	3%	22.350.000	17	5,80%	99,33	100	193,33 %
	Sub Kegiatan Fasilitas Sarana Prasarana Desa	22.500.000			22.350.000			99,33		
2.	Kegiatan Fasilitas Kerjasama antar Desa	10.000.000			9.750.000			97,50		
	Sub Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan	10.000.000			9.750.000			97,50		
2	Kegiatan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa	29.500.000			28.958.000			98,16		
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	19.500.000			19.050.000			97,69		
	Sub Kegiatan Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.000.000			9.908.000			99,08		
3	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerakdi Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Hukum Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Asat yang Sama dalam Daerah Kabupaetn/Kota	393.150.000			391.452.900			99,57		
	Sub Kegiatan Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Dewa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	108.000.000			107.562.900			99,60		

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10.000.000			9.979.000			98,78		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	14.000.000			13.690.000			97,7		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	110.000.000			109.521.000			99,56		
	Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	152.150.000			150.700.000			99,70		
		455.150.000	17	3%	452.510.900	17	5,80%	99,42	100	193,33

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Penghitungan analisis atas efisiensi sumberdaya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (1 - \frac{RAK_{ke i} / RVK_{ke i}}{PAK_{ke i} / TVK_{ke i}}) \times 100\%}{n}$$

Sumber : PMK Nomor 249 tahun 2011

Keterangan :

- E : Efisiensi
- RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran
- PAK : Pagu Anggaran per Keluaran
- RVK : Realisasi volume Keluaran
- TVK : Target volume Keluaran
- N : Jumlah jenis keluaran

Berdasarkan rumus di atas, efisiensi untuk indikator SAKIP sebagai berikut :

$$E = \frac{(1 - \frac{452.510.900/5,80}{455.150.000/3}) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - \frac{77.846.551,72}{151.716.666,67}) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - 0,5131) \times 100\%}{1}$$

$$E = 48,69\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terdapat efisiensi pemanfaatan sumber data sebanyak 48,69 persen. Hal tersebut berarti dengan sumberdaya yang ada dibandingkan dengan capaian keluaran yang dicapai diperoleh efisiensi sebesar 48,69 persen.

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 17 orang terdiri dari Golongan IV (3 orang), Golongan III (S1 : 7 orang), Golongan II (1 orang) dan 6 orang THL. Ketujuh belas pelaksana tersebut merupakan potensi sumber daya manusia dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dengan sumber daya yang tersedia meskipun capaian belum memenuhi target. Selain itu, desa didampingi oleh 6 orang Tenaga Ahli Desa, 16 orang Pendamping Desa Teknik Infrastruktur dan 32 orang Pendamping Desa Pemberdayaan.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja persentase tingkat perkembangan desa tahun 2021 sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa.

Realisasi capaian program yaitu Persentase tingkat swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa sebesar 36,96 persen. Program Penataan Desa didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa, dengan output - - Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan TMMD sebanyak Rp846.300.000,00. Rincian swadaya melalui kegiatan sebagai berikut :

- Terlaksananya TMMD Sengkuyung I di Desa Petir Kec. Purwanegara pada tanggal 11 Mei 2022 - 09 Juni 2022;
- Terlaksananya TMMD Sengkuyung II di Desa Sarwodadi Kec. Pejawaran pada tanggal 26 Juli 2022 - 24 Agustus 2022;
- Terlaksananya TMMD Sengkuyung III di Desa Badakarya Kec. Punggelan pada tanggal 11 Oktober 2022 - 09 November 2022;
- Jumlah desa yang didampingi dalam pengelolaan bantuan keuangan provinsi (infrastruktur) sebanyak 335 titik (166 Desa);
- Jumlah Desa yang difasilitasi Bantuan Keuangan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) sebanyak 46 titik (46 desa);
- Jumlah Desa yang difasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (Bansus) sebanyak 244 titik.

Kegiatan Pendamping TNI Manunggal Membangun Desa mendukung dimensi sosial yaitu solidaritas sosial dalam masyarakat desa.

2. Program Peningkatan Kerjasama Desa.

Realisasi capaian program yaitu tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar sebanyak 100 persen. Program Peningkatan Kerjasama Desa

didukung oleh Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa - Sub Kegiatan : Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dengan output sebagai berikut :

- a. Jumlah aparatur pemerintah desa yang dilatih pemetaan kawasan sebanyak 20 Orang (Pada tanggal 29 Maret 2022 di Aula Dispermades PPKB (Depan Kantor BPPKAD dengan peserta Kasi PMD dan Unsur BKAD Kecamatan serta Tenaga Ahli/Pendamping Desa untuk wilayah Kecamatan Sigaluh, Banjarnangu, Pejawaran dan Kalibening).
- b. Jumlah dokumen kawasan perdesaan yang tersusun sebanyak 4 Dokumen untuk Kawasan Perdesaan Rukun Bersama Kec. Pejawaran (Perdes Tentang Kerjasama Desa, SK Lembaga Kerjasama Desa (LKD), SK Perwakilan Desa dalam BKAD, Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades) tentang Kerjasama Antar Desa) dengan didukung kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Terlaksananya Rapat Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan pada tanggal 11 Februari 2022 di Ruang Kepala Dispermades PPKB;
 - 2) Verifikasi Lapangan Usulan Kawasan Perdesaan di Kec. Pejawaran pada tanggal 22 Juni 2022 di Balai Desa Pejawaran;
 - 3) Evaluasi kegiatan KAWISESA pada tanggal 29 Juni 2022 di Balai Desa Randegan Kec. Sigaluh);
 - 4) Penetapan Kawasan Perdesaan Rukun Bersama sebagai Pembangunan Kawasan Perdesaan berdasarkan SK Bupati Nomor 050/553 Tahun 2022.

Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan mendukung indeks ekonomi dalam IDM melalui terciptanya keragaman produksi masyarakat dan keterbukaan wilayah.

3. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Realisasi capaian program sebagai berikut :

- a) Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD sebesar 97,34 persen;
- b) Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebesar 97,34 persen.;
- c) Persentase kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan mandiri sebesar 90,22 persen.;
- d) Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa sebanyak 92,10 persen.

Dalam mencapai tingkat perkembangan desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa didukung oleh kegiatan

- a) Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa, dengan outpiut sebagai berikut :

- 1) jumlah desa yang dilatih/terdampingi manajemen BUMDes sebanyak 40 BUMDesa (pada tanggal 15-16 Juni 2022 di Rumah Makan Bu Lies, Jl. Raya Sigaluh Desa Singamerta - Sigaluh dengan tiap desa sejumlah 2 peserta sehingga total 80 peserta);
- 2) Jumlah UPK PNPM-MP yang terpantau pengolaannya sebanyak 20 UPK, melalui
 - ❖ Rakor pada tanggal 22 September 2022 untuk Ketua dan Sekretaris UPK terkait Transformasi UPK Menjadi BUMDes di Aula Dispermades PPKB, Jl. A Yani No. 2 Banjarnegara;
 - ❖ Rakor pada pada tanggal 27 dan 29 September 2022 dan penyusunan Draft Rancangan AD/ART BUMDesa Bersama Transformasi UPK Eks PNPM MPd.
- b) Sub Kegiatan : Fasilitasi Ealuasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, dengan output Jumlah desa berprestasi sebanyak 3 desa berdasarkan SK Bupati Nomor : 140/438 Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022 sebagai berikut :
 - 1) Juara I : Desa Beji Kec. Banjarmangu;
 - 2) Juara II : Desa Pagentan Kec. Pagentan;
 - 3) Juara III : Desa Clapar Kec. Madukara.

Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - mendukung dimensi ekonomi desa penilaian strata desa yaitu diantaranya (1) sebagai salah satu wadah terciptanya keberagaman produksi masyarakat desa, (2) tersedianya akses pusat pelayanan perdagangan bagi bidang BUMDes perdagangan serta (3) tersedianya akses Lembaga keuangan/perkreditan bagi BUMDes yang melaksanakan simpan pinjam serta memotret perkembangan desa secara lebih obyektif.

4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.

Realisasi capaian program sebagai berikut :

- a. Meningkatnya strata posyandu purnama sebanyak 55,51 persen;
- b. Persentase peningkatan peranan kaum perempuan daam pembangunan di desa sebanyak 55 persen.

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat didukung Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota melalui beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan output sebagai berikut :
 - ❖ Jumlah Posyandu yang difasilitasi sebanyak 57 Posyandu di Kecamatan Wanadadi pada Belanja Barang yang diserahkan kepada masyarakat / lembaga berupa Batik Tradisional pada tanggal 28 September 2022;
 - ❖ Jumlah lembaga karang taruna yang difasilitasi sebanyak 1 lembaga Karang Taruna Tri Bhakti Desa Depok Kec. Bawang Berupa Hibah Uang sebesar Rp30.000.000,00 pada tanggal 28 Juli 2022.
- 2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat, dengan output kegiatan sebagai berikut :
 - ❖ Jumlah LP3M (Lembaga Perencana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat) yang dilatih sebanyak 25 orang (lembaga) pada tanggal 25 Mei 2022 di Gedung PKK Kab. Banjarnegara;
 - ❖ Jumlah lembaga PKK yang dilatih sebanyak 256 orang;
 - ❖ Jumlah BP-SPAMS yang didampingi/dilatih sebanyak 27 desa di 10 kecamatan (Kec. Wanayasa, Karangobar, Batur, Kalibening, Pejawaran, Punggelan, Susukan, Mandiraja, Rakit dan Pagentan). Pembinaan dilaksanakan melalui kunjungan lapangan di masing-masing BPSPAM tanggal 23 Mei s.d 23 Juni 2023.
- 3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, dengan output yaitu Jumlah desa yang dilatih/terdampingi ketrampilan unit usaha BUMDes sebanyak 40 BUMDes (Pasar Desa) (Pada tanggal 5-6 Juli 2022 di Rumah Makan Bu Lies Jl. Raya Sigaluh - Singamerta untuk Pengelola Pasar Desa.
- 4) Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, dengan output yaitu
 - a) Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa/Kel yang dibina sebanyak 16 desa dan 2 kelurahan atau sebanyak 20 peserta pada tanggal 30 Agustus 2022 di di Rumah Makan Bu Lies, Jl. Raya Sigaluh Desa Singamerta - Sigaluh;
 - b) Monitoring Posyantekdes ke 15 Desa di 13 Kecamatan melalui kunjungan langsung ke masing-masing desa mulai tanggal 13 September s.d 30 September 2022;

- c) Jumlah karya peserta yang memenuhi kriteria TTG dan dilaksanakan fasilitasi pengadaan sebanyak 3 unit early warning sistem (EWS) deteksi banjir.
- 5) Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, dengan output sebagai berikut ;
- ❖ Jumlah TP PKK Desa / Kelurahan yang dibina sebanyak 36 desa/kelurahan;
 - ❖ Jumlah rapat koordinasi pleno TP PKK Kabupaten dan kecamatan sebanyak 12 kali (Januari-Desember 2022).

Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota mendukung Indeks Ketahanan Sosial yaitu akses posyandu (peningkatan kapasitas dan evaluasi posyandu), akses air bersih (peningkatan kapasitas pengurus BP-SPAM) serta mendukung Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan melalui tanggap bencana.

Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Dan Lembaga Pemerintahan Desa

Sasaran meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga pemerintahan desa diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD. Adapun pencapaian target sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.11. Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat dan Anggota BPD Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	90%	97,34%	108,16%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Realisasi persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Jumlah Perangkat Desa baru yang dilatih :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Perangkat desa baru yang dilatih}}{\sum \text{Perangkat desa baru hasil proses pengisian}} \times 100\% \\
 &= \frac{722 + 110 + 40}{660} \times 100\% \\
 &= 132,12\%
 \end{aligned}$$

2. Jumlah Kepala Desa Baru yang dilatih

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{Kepala desa baru yang dilatih}}{\sum \text{Kepala desa baru hasil pemilihan}} \times 100\% \\
 &= \frac{64 + 195 + 14}{266} \times 100\% \\
 &= \frac{273}{266} \times 100\% \\
 &= 102,63\%
 \end{aligned}$$

3. Jumlah anggota BPD yang dilatih dan difasilitasi :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sum \text{anggota BPD yang sudah dilatih dan difasilitasi}}{\sum \text{anggota BPD}} \times 100\% \\
 &= \frac{266 + 105 + 198 + 266 + 266}{1.901} \times 100\% \\
 &= \frac{835 + 266}{1.901} \times 100\% \\
 &= 57,92\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh rata-rata sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{132,12\% + 102,63\% + 57,92\%}{3} \\
 &= \frac{272,62\%}{3} \\
 &= 97,34\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja sudah memenuhi target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 lebih banyak dilaksanakan pelatihan/pendampingan kepada aparat baik berkaitan tugas pokok dan fungsi, pembinaan, peraturan baris berbaris serta pengelolaan keuangan desa oleh kejaksaan serta kode etik aparat pemerintahan desa. Dispermades PPKB juga memfasilitasi penyusunan produk hukum terkait desa, pendampingan penyusunan dokumen RKPDesa dan APBDesa, fasilitasi pengelolaan keuangan desa, penyelenggaraan pekan olah raga desa, fasilitasi pengangkatan dan pemberhetian perangkat desa, pembinaa laporan kepala desa serta fasilitasi profil desa untuk 8 Desa di Kecamatan Purwareja Klampok.

Selain pelatihan diatas, dilaksanakan pelatihan anggota BPD sebanyak 266 desa se Kabupaten Banjarnegara. Pelatihan tersebut terkait optimalisasi kinerja BPD, Isu-isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Desa serta Mekanisme Pengawasan Desa.

Realisasi kinerja persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD Tahun 2017-2021 disajikan dalam Tabel dibawah ini.

Tabel 3.12. Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat dan Anggota BPD Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	59,5%	59,84%	86,19%	90,87%	97,34%

Data : Dispermades PPKB Diolah, 2022

Pada Tabel 3.12, capaian 2022 mengalami peningkatan karena terfasilitasinya peningkatan kapasitas baik perangkat desa maupun anggota BPD pada tiap tahunnya selama kurun waktu tahun 2018 - 2022. Selain itu, Dispermades PPKB lebih intensif dalam pendampingan aparat pemerintah desa dalam rangka pendampingan penyusunan dan monitoring administrasi desa maupun fasilitasi penyelesaian permasalahan terkait disiplin perangkat desa dan anggota BPD. Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD Tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada gambar 3.5 sebagai berikut.



Gambar 3.6. Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD Tahun 2018 – 2022

Realisasi kinerja persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.13. Realisasi Kinerja Persentase Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat dan Anggota BPD dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2022	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	90%	97,34%	108,16%

Sumber :Data DispermadesPPKB Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3.13, realisasi persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD pada tahun 2022 sudah memenuhi target Renstra tahun 2022. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan capaian persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD sangat optimal dan untuk dipertahankan dan ditingkatkan kinerjanya.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Terlaksananya pendampingan dan peningkatan kapasitas perangkat desa dan anggota BPD;
2. Melakukan koordinasi aktif kepada berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi maupun wilayah terutama aparat kecamatan terkait dengan pembinaan aparatur pemerintahan desa;
3. Penguatan dan pemanfaatan informasi teknologi untuk pendampingan aparatur pemerintahan desa;
4. Pendampingan dan pembinaan secara berkelanjutan terkait perangkat desa dan anggota BPD;
5. Adanya pendampingan dan koordinasi yang berkelanjutan baik oleh aparat pemerintah kabupaten maupun dibantu oleh Tim Tenaga Ahli bagi Desa sebanyak 6 orang, Pendamping Desa (PD) sebanyak 48 orang dan Pendamping Lokal Desa (PLD) sebanyak 65 orang sehingga menjangkau seluruh wilayah desa di Kabupaten Banjarnegara.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Terus mengupayakan berbagai terobosan teknis lapangan dalam pendampingan dan fasilitasi kepada perangkat desa dan anggota BPD;
2. Meningkatkan dan memperluas kerjasama dengan berbagai pihak sesuai dengan kewenangan dalam pendampingan dan fasilitasi kepada perangkat desa dan anggota BPD;
3. Meningkatkan koordinasi secara rutin dan intens dengan pendamping desa dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.14. Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perangkat dan Anggota BPD

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian %		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.	Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Administrasi pemerintahan Desa	4.005.207.955	9 orang	90%	3.922.655.164	9 orang	97,34%	97,94	100	108,16

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian %		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	3.000.000			2.994.000		99,80			
2.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000			9.900.000		99,00			
3.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.485.127.955			3.408.826.664		97,81			
4.	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur pemerintah Desa	278.000.000			277.977.800		99,99			
5.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.000.000			1.000.000		100			
6.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	196.080.000			190.076.700		96,94			
7.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5.000.000			4.972.000		99,44			
8.	Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	13.000.000			13.000.000		100			
9.	Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.000.000			3.000.000		100			
10.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	1.000.000			1.000.000		100			
11.	Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.000.000			9.908.000		99,08			

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Penghitungan analisis atas efisiensi sumberdaya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut :

$$E = \sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke\ i} / RVK_{ke\ i}}{PAK_{ke\ i} / TVK_{ke\ i}} \right) \times 100\% / n$$

Sumber : PMK Nomor 249 tahun 2011

Keterangan :

E : Efisiensi

RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran

- PAK : Pagu Anggaran per Keluaran
 RVK : Realisasi volume Keluaran
 TVK : Target volume Keluaran
 N : Jumlah jenis keluaran

Berdasarkan rumus di atas, efisiensi untuk indikator SAKIP sebagai berikut :

$$E = \frac{(1 - \frac{3.922.655.164/97,34}{4.005.207.955/90}) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - \frac{40.298.491,51}{44.502.310,61}) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - 0,9055) \times 100\%}{1}$$

$$E = 9,45\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terdapat efisiensi pemanfaatan sumber data sebanyak 9,45 persen. Hal tersebut berarti dengan sumberdaya yang ada dibandingkan dengan capaian keluaran yang dicapai diperoleh efisiensi sebesar 9,45 persen.

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 9 orang PNS terdiri dari Golongan IV (1 orang), Golongan III (S1 : 5 orang) serta 3 orang lainnya Tenaga Harian Lepas (THL). Ketiga pelaksana tersebut merupakan potensi sumber daya manusia dan telah melaksanakan tugas secara optimal dengan sumber daya yang tersedia meskipun capaian belum memenuhi target. Selain itu, desa didampingi oleh 6 orang Tenaga Ahli Desa, 16 orang Pendamping Desa Teknik Infrastruktur dan 32 orang Pendamping Desa Pemberdayaan.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam dokumen perencanaan jangka menengah, capaian kinerja persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD didukung 1 (satu) program dengan 1 (kegiatan) kegiatan sebagai berikut :

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Realisasi capaian program sebagai berikut :

1. Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD sebesar 97,34 persen;
2. Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa sebesar 97,34 persen;
3. Persentase kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dengan mandiri sebesar 90,22 persen;
4. Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa sebanyak 92,10 persen.

Program Administrasi Pemerintahan Desa didukung satu kegiatan yaitu Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa

1. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa, dengan output yaitu jumlah produk hukum desa yang difasilitasi sebanyak 4 regulasi yaitu Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa, Peraturan Bupati tentang Penyusunan APBDes, SPM Desa, Peraturan Bupati Peran Desa dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi.
2. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa, dengan output sebagai berikut :
 - a. Jumlah kader PMD yang difasilitasi sebanyak 20 orang beserta Kasi PMD sebanyak 20 orang pada Rakor tanggal 02 Juni 2022 di Gedung Dekranasda Kab Banjarnegara;
 - b. Jumlah Tim Penyusun RKPDes yang didampingi sebanyak 266 desa.
3. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan output sebagai berikut :
 - a. Jumlah desa yang dimonitoring dan dievaluasi administrasi keuangan desa sebanyak 266 desa s.d Desember 2022 (Triwulan IV);
 - b. Jumlah desayang didampingi dalam pengelolaan dana desa Tahap 1 (266 desa), Tahap 2 (266 desa), Tahap 3 (264 desa) dan BLT Triwulan I (266 desa), BLT Triwulan II (266 desa), BLT Triwulan III (266 desa), BLT Triwulan IV (266 desa). Pagu Dana Desa sebesar Rp266.535.723.000,00;
 - c. Jumlah desa yang didampingi dalam pengelolaan alokasi dana desa s.d Tahap III (266 desa) sebesar Rp100.108.091.650,00;
 - d. Jumlah desa yang didampingi sistem informasi keuangan desa (Siskeudes) sebanyak 266 desa s.d bulan Desember 2022;
 - e. Jumlah desa yang didampingi dalam pengelolaan bantuan keuangan kabupaten (BPJS) s.d Desember 2022 (12 bulan) sebesar Rp3.218.860.964,00.
4. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, dengan Output sebagai berikut :
 - a. Jumlah perangkat Desa yang dilatih sebanyak 40 orang pada tanggal 12-13 Mei 2022 di Aula Sasana Bhakti Praja Lt 1 Setda Kab. Banjarnegara;
 - b. Jumlah tim perangkat desa berprestasi dalam pekan olahraga desa sebanyak 9 Tim pada Pekan Olahraga Desa Aparatur Pemerintah Desa tgl. 7 - 25 Nov 2022 sebagai berikut :
 - 1) Cabang Olahraga Mini Soccer : Kec. Kalibening, Pejawaran, Wanayasa;
 - 2) Cabang Olahraga Voli Putri : Kec. Madukara, Wanadadi, Pejawaran;
 - 3) Cabang Olahraga Sepakbola : Kec. Kalibening, Pejawaran, Mandiraja.
 - c. Jumlah desa yang melaksanakan pencanangan desa anti korupsi Tingkat Provinsi sebanyak 1 Desa yaitu Desa Sijenggung Kec. Banjarmangu pada tanggal 15 Desember 2022.

5. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dengan output sebagai berikut :
 - a. Jumlah perangkat desa yang difasilitasi pengangkatan sebanyak 12 orang (9 Perangkat Desa dan 1 Kepala Desa);
 - b. Jumlah perangkat desa yang difasilitasi pemberhentian sebanyak 12 orang (10 Perangkat Desa dan 3 Kepala Desa).
6. Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Profil Desa, dengan output Jumlah desa yang difasilitasi penyusunan profil desa sebanyak 8 desa di Kecamatan Purwareja Klampok berupa Softwared aplikasi SID dan PC.
7. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa, dengan output Jumlah desa yang difasilitasi dalam penyelesaian permasalahan tanah kas desa sebanyak 5 desa yaitu Desa Tajungtirta Kec. Punggelan dan Desa Jatilawang Kec. Wanayasa, Desa Banjarmangu Kec. Banjarmangu, Desa Purwasaba Kec. Mandiraja dan Desa Aribaya Kec. Punggelan.
8. Sub Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD, dengan output Jumlah anggota BPD yang dilatih sebanyak 266 orang pada tanggal 20-21 Juli 2022 di Aula Sasana Abdi Praja Lantai 3 Setda Banjarnegara terkait optimalisasi kinerja BPD, Isu-isu Strategis dalam Perencanaan Pembangunan Desa serta Mekanisme Pengawasan Desa.
9. Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa, dengan output Jumlah desa yang terfasilitasi penataan batas desa sebanyak dengan rincian :
 - a) Revisi Raperbub 53 desa sudah diajukan ke bagian Hukum Setda Banjarnegara;
 - b) Revisi Raperbub 12 kelurahan sudah disampaikan untuk diproses lebih lanjut ke Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kab. Banjarnegara.
10. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa, dengan output Jumlah dokumen penyusunan LPPDes sebanyak 14 dokumen.
11. Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan, dengan output Jumlah desa berprestasi sebanyak 3 desa berdasarkan SK Bupati Nomor : 140/438 Tahun 2022 tanggal 20 Mei 2022 sebagai berikut :
 1. Juara I : Desa Beji Kecamatan Banjarmangu;
 2. Juara II : Desa Pagentan Kecamatan Pagentan;
 3. Juara III : Desa Clapar Kecamatan Madukara.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan Ekonomi Masyarakat

Sasaran meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase tingkat perkembangan BUMDes. Indikator ini untuk mengetahui jumlah desa yang memiliki BUMDes yang aktif dan berkembang. Adapun pencapaian target dari indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.15. Realisasi Kinerja Persentase Tingkat Perkembangan BUMDes Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase tingkat perkembangan BUMDes	70%	84,05%	120,07%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Persentase tingkat perkembangan BUMDes diperoleh melalui penghitungan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} &= \frac{\sum \text{BUMDes yang berkembang dan aktif}}{\sum \text{BUMDes yang sudah ditetapkan dengan perdes}} \times 100\% \\ &= \frac{216}{257} \times 100\% \\ &= 84,05\% \end{aligned}$$

Berdasarkan data di atas, realisasi capaian persentase perkembangan BUMDes melebihi target yang ditetapkan. Pada Tahun 2022, jumlah BUMDesa yang sudah terbentuk sebanyak 257 unit, sehingga masih terdapat 9 desa yang belum memiliki BUMDesa. Jumlah BUMDes meningkat sebanyak 10 unit dibandingkan tahun 2021 yang masih berjumlah 247. Jumlah BUMDesa berkembang dan aktif sebanyak 216, meningkat sebanyak 19 BUMDesa dari tahun sebelumnya 207 unit BUMDesa. Penambahan jumlah BUMDes yang berkembang dan aktif sebanyak 50 unit. Peningkatan tersebut menunjukkan ekonomi perdesaan berkembang dengan baik dan diharapkan BUMDesa semakin berkontribusi dan peningkatan pendapatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan desa.

Kebijakan pengembangan BUMDesa di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan BUMDesa. Pada Tahun 2022, Dispermades PPKB telah melaksanakan peningkatan kapasitas untuk sebanyak 40 BUMDesa. Pelatihan tersebut terkait administrasi keuangan, pengelolaan BUMDesa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta Pokok Pikiran Permendes PDTT Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan, Pengelola Kegiatan DBM eks PNPM MPD Menjadi BUM Desa Bersama. Saat ini telah terbentuk 19 BUMDesa Bersama transformasi DBM eks PNPM Mandiri Perdesaan dan tinggal 1 kecamatan yaitu Kecamatan Pagedongan yang masih menunggu Reviu Inspektorat sebagai salah satu tahapan transformasi.

Perkembangan BUMDesa selain dukungan dari Pemerintah Desa selaku Penasehat maupun aparat Kabupaten, juga didukung oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendes PDTT serta Pihak Ketiga. Pada tahun 2022 dukungan Kemendes PDTT berupa bantuan permodalan sebanyak masing-masing Rp75.000.000,00 untuk 5 BUMDesa yaitu (1) BUMDes Jtasentika Desa Karangjambe Kec. Wanadadi, (2) BUMDes Reja Mukti Desa Rejasari Kec. Banjarmangu, (3) BUMDes Wira Daya Mukti Desa Bondolharjo Kec. Punggelan, (4) BUMDes Tampomas Giri Mulya Desa Gentansari Kec. Pagedongan serta (5) BUMDes Candra Dimuka Desa Pekasiran Kec. Batur. Kemendes juga memberikan bantuan permodalan sebesar Rp500.000.000,00 untuk BUMDes Pandawa Desa Dieng Kulon Kec. Batur. Dukungan dari Pihak Ketiga terhadap pengembangan unit usaha BUMDesa diantaranya sebagai berikut :

1. Launcing Bumdes Laku Pandai Dengan Bank Jateng;
2. Kerjama Dengan Samsat Banjarnegara Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor;
3. Kerja Sama Dan Pelatihan Terpadu Bagi Bumdes Dengan BNI 46;
4. Mengirim Peserta Sekolah Bumdes Kerja Sama Dengan Balai Besar Latihan Masyarakat Kemendes Yogyakarta Bagi Bumdes Pengelola Desa Wisata.

Berdasarkan Permendes PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengenmabgan dan Pengadaan barang/atau JasaBUMDesa/BUMDesama, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diklasifikasikan dalam empat tingkat perkembangan, yaitu Dasar, Tumbuh, Berkembang, dan Maju. Masing-masing tingkat perkembangan memiliki skor yang berbeda. Semakin tinggi skor yang diperoleh menunjukkan semakin baik pula perkembangan Bumdes di suatu desa. Rekapitulasi BUMDesa berdasarkan klasifikasinya ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.16.Rekapitulasi BUMDesa Berdasarkan Klasifikasinya Tahun 2022

No	Tahun	Dasar	Tumbuh	Berkembang	Maju	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	2022	139	116	2	0	257

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Realisasi kinerja persentase tingkat perkembangan BUMDes dibandingkan tahun sebelumnya disajikan pada Tabel 3.16.

Tabel 3.17.Realisasi Kinerja Persentase tingkat perkembangan BUMDes Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase tingkat perkembangan BUMDes	68,35%	69,57%	82,20%	83,80%	84,05%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Realisasi Persentase tingkat perkembangan BUMDes Tahun 2018 - 2022 ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 3.7. Persentase Tingkat Perkembangan BUMDes Tahun 2018 - 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian persentase tingkat perkembangan BUMDesa mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin banyak desa yang mampu mengelola potensi sumber daya ekonomi secara optimal. BUMDes juga bisa sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa dan menambah keragaman produksi masyarakat. Realisasi Kinerja Persentase tingkat perkembangan BUMDes Membandingkan dengan Target Jangka Menengah disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.18. Realisasi Kinerja Persentase tingkat perkembangan BUMDes Membandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2022	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Persentase tingkat perkembangan BUMDes	70%	84,05%	120,07

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Realisasi persentase perkembangan BUMDes tahun 2021 dibandingkan target akhir Renstra Tahun 2022 sudah mencapai target. Semakin besar tingkat perkembangan BUMDesa diharapkan semakin banyak desa yang mandiri secara ekonomi dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Dukungan, fasilitasi dan motivasi baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya pengembangan ekonomi pedesaan dalam hal ini pengembangan BUMDes. Implementasi dukungan yang sudah diberikan diantaranya berupa peningkatan kapasitas dan penyertaan modal BUMDes;
2. Pendampingan, pembinaan dan peningkatan kapasitas pengurus BUMDes oleh aparat Dispermades PPKB, kecamatan, tenaga profesional ahli pendamping desa serta

- pendamping lokal desa sehingga memberikan support dan dampak yang positif bagi perkembangan BUMDes. Dispermades PPKB melaksanakan pendampingan;
3. Dukungan dan support dari Kepala Desa setempat selaku penasehat sekaligus pengambil kebijakan desa serta tokoh masyarakat sangat berpengaruh terhadap perkembangan unit usaha BUMDesa;
 4. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan menjalankan usaha BUMDes yang mana berbagai kegiatan saat ini berbasis digital sehingga BUMDes senantiasa mampu melaksanakan pembaruan dan mengikuti perkembangan.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Meningkatkan motivasi, pendidikan, pelatihan dan pendampingan pengelolaan manajemen dan unit usaha BUMDes bagi aparat pemerintah desa dan pengelola BUMDes;
2. Mengoptimalkan pendampingan dan fasilitasi identifikasi potensi sumberdaya ekonomi perdesaan dalam rangka pembentukan maupun pengembangan BUMDes;
3. Meningkatkan penjangkaran, identifikasi dan aplikasi Teknologi Tepat Guna (TTG) agar pengelolaan sumberdaya sosial dan ekonomi perdesaan optimal, efisien dan berhasil guna;
4. Mendorong dan menghimbau kepada para Kepala Desa selaku pengambil kebijakan agar pengembangan BUMDes termasuk dalam prioritas pembangunan desa ;

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator persentase tingkat perkembangan BUMDes digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.19. Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Tingkat Perkembangan BUMDes

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	19.500.000	7	70%	14.900.500	7	84,05%	99,14%	100%	120,07%
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan lembaga Kerjasama antar Desa	19.500.000			19.050.000					
2	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah kabupaten/Kota serta	124.000.000			123.211.000					

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota									
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	14.000.000			13.690.000					
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	110.000.000			109.521.000					
		143.500.000	7	70%	142.261.000	7	84,05%	99,14%	100%	120,07%

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Penghitungan analisis atas efisiensi sumberdaya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke i} / RVK_{ke i}}{PAK_{ke i} / TVK_{ke i}} \right) \times 100\%}{n}$$

Sumber : PMK Nomor 249 tahun 2011

Keterangan :

- E : Efisiensi
- RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran
- PAK : Pagu Anggaran per Keluaran
- RVK : Realisasi volume Keluaran
- TVK : Target volume Keluaran
- N : Jumlah jenis keluaran

Berdasarkan rumus di atas, efisiensi untuk indikator SAKIP sebagai berikut :

$$E = \frac{\left(1 - \frac{142.261.000/85,04}{143.500.000/70} \right) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{\left(1 - \frac{1.692.576}{2.050} \right) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{\left(1 - 0,8256 \right) \times 100\%}{1}$$

$$E = 17,44\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terdapat efisiensi pemanfaatan sumber data sebanyak 17,44 persen. Hal tersebut berarti dengan sumberdaya yang ada dibandingkan dengan capaian keluaran yang dicapai diperoleh efisiensi sebesar 17,44 persen.

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 7 orang terdiri dari Golongan IV (S1: 2 orang), Golongan III (S1 : 1 orang), Golongan 2 (SLTA : 2 orang) dan 2 orang THL. Keseluruhan pelaksana tersebut merupakan sumber daya yang potensial dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja. Selain itu, desa didampingi oleh 6 orang Tenaga Ahli Desa, 16 orang Pendamping Desa Teknik Infrastruktur dan 32 orang Pendamping Desa Pemberdayaan.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja persentase tingkat perkembangan BUMDes yaitu Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dan Program Pengembangan Data/Informasi. Output dari masing-masing kegiatan pendukung sebagai berikut :

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Realisasi capaian program yaitu Persentase desa yang memiliki lembaga ekonomi masyarakat (BUMDes) yang terukur secara skill dan manajerial sebesar 96,62 persen (257 BUMDesa).

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa - Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa, dengan output sebagai berikut:

- 1) Jumlah desa yang dilatih/terdampingi manajemen BUMDes sebanyak 40 BUMDesa (pada tanggal 15-16 Juni 2022 di Rumah Makan Bu Lies, Jl. Raya Sigaluh Desa Singamerta - Sigaluh dengan tiap desa sejumlah 2 peserta sehingga total 80 peserta);
- 2) Jumlah UPK PNPM-MP yang terpantau pengelolaannya sebanyak 20 UPK, melalui
 - ❖ Rakor pada tanggal 22 September 2022 untuk Ketua dan Sekretaris UPK terkait Transformasi UPK Menjadi BUMDes di Aula Dispermades PPKB, Jl. A Yani No. 2 Banjarnegara;
 - ❖ Rakor pada tanggal 27 dan 29 September 2022 dan penyusunan Draft Rancangan AD/ART BUMDesa Bersama Transformasi UPK Eks PNPM MPd.

2. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Realisasi capaian program yaitu Persentase tersedianya dokumentasi kreativitas dan inovasi sebanyak 73,33 persen.

Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta

Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota, terdiri dari :

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa memiliki output kegiatan sebagai berikut :
 - Jumlah desa yang dilatih/terdampingi ketrampilan unit usaha BUMDes sebanyak 40 BUMDes (Pasar Desa) (Pada tanggal 5-6 Juli 2022 di Rumah Makan Bu Lies Jl. Raya Sigaluh - Singamerta untuk Pengelola Pasar Desa.
- b. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - 1) Jumlah Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) Desa/Kel yang dibina sebanyak 16 desa dan 2 kelurahan atau sebanyak 20 peserta pada tanggal 30 Agustus 2022 di di Rumah Makan Bu Lies, Jl. Raya Sigaluh Desa Singamerta - Sigaluh;
 - 2) Monitoring Posyantekdes ke 15 Desa di 13 Kecamatan melalui kunjungan langsung ke masing-masing desa mulai tanggal 13 September s.d 30 September 2022;
 - 3) Jumlah karya peserta yang memenuhi kriteria TTG dan dilaksanakan fasilitasi pengadaan sebanyak 3 unit early warning sistem (EWS) deteksi banjir.

Sasaran 4 : Meningkatnya Partisipasi Kemandirian dan Keberdayaan Masyarakat

Sasaran meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat diukur dengan indikator kinerja Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat.

Indikator persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat dipilih untuk mengetahui jumlah swadaya masyarakat desa terhadap program pemberdayaan masyarakat. Realisasi kinerja persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini. Tabel 3.20. Realisasi Kinerja Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	30%	36,96%	123,20%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Realisasi persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat pada tahun 2021 diperoleh dengan penghitungan sebagai berikut :

1. Persentase swadaya Pendamping TNI Manunggal Membangun Desa

$$= \frac{\sum \text{swadaya masy yang mendukung program pemberdayaan masy desa}}{\sum \text{anggaran yang mendukung program pemberdayaan masyarakat desa}} \times 100\%$$

$$= \frac{846.900.000}{2.290.000.000} \times 100\%$$

$$= 36,96\%$$

Berdasarkan data di atas, persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat mencapai target yang telah di tetapkan. Hal tersebut menunjukkan kemandirian dan solidaritas sosial masyarakat dalam pembangunan di perdesaan semakin meningkat. Pada Tahun 2022, teknis pelaksanaan dalam pengumpulan swadaya masyarakat yaitu melalui Program Penataan Desa, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa - Fasilitas Sarana Prasarana Desa melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang dilaksanakan di 3 tahap/lokasi (sengkuyung) yaitu Sengkuyung I (Desa Petir Kec. Purwanegara), Sengkuyung II (Desa Sarwodadi Kec. Pejawaran) dan Sengkuyung III (Desa Badakarya Kec. Punggelan).

Komponen swadaya masyarakat bisa dalam bentuk tenaga kerja, konsumsi, material dan hibah tanah. Jenis pekerjaan pada sengkuyung I, Sengkuyung II dan Sengkuyung III yaitu pembangunan jalan, rabat beton, talud, jembatan dan drainase. Pada sengkuyung III diperoleh swadaya lebih besar dari sengkuyung lainnya. Hal ini karena pada sengkuyung II jenis pekerjaannya yaitu pembangunan jembatan dan pembuka akses jalan baru yang semula jalan setapak menjadi jalan besar menyesuaikan lebar jembatan 3 meter. Dimana jembatan tersebut menghubungkan atau mempermudah akses desa Sarwodadi Kecamatan Pejawaran dengan Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa. Dalam pembangunan atau pelebaran jalan tersebut terdapat hibah tanah masyarakat di sepanjang pembangunan jalan tersebut dan hibah sewa alat berat, sehingga diperoleh nilai swadaya yang besar dibandingkan lainnya. Sedangkan pada Sengkuyung I dan Sengkuyung III komponen swadaya hanya di tenaga kerja, konsumsi dan material. Jumlah swadaya pada Sengkuyung I sebesar Rp212.000.000,00, Sengkuyung II sebesar Rp328.300.000,00 dan Sengkuyung III sebesar Rp306.000.000,00. Capaian kinerja persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada Tabel sebagai berikut :

Tabel 3.21. Capaian Kinerja Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	36%	40,75%	27,81%	36,95%	36,96%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Capaian Kinerja Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018-2022 ditunjukkan pada Gambar 3.8.



Gambar 3.8. Capaian Kinerja Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2018-2022

Kegiatan keswadayaan pada tahun 2022 hanya dilaksanakan melalui satu kegiatan yaitu Fasilitasi Sarana Prasarana Desa melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), sedangkan pada tahun – tahun sebelumnya didukung juga oleh kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM). Kegiatan BBGRM merupakan kegiatan keswadayaan yang dilaksanakan secara serentak pada tiap kabupaten secara nasional. Namun karena masih dalam pencegahan dan penanganan COVID-19, sehingga BBGRM ditiadakan yang rencananya dilaksanakan pada Bulan April 2022 di Desa Rejasari Kecamatan Banjarmangu. Capaian Kinerja Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.22. Capaian Kinerja Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2021	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	30 %	36,96%	123,20%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa salah satu tujuan pengaturan desa yaitu mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi guna kesejahteraan bersama. Semakin besar partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat, desa memiliki modal sosial yang semakin tinggi. Modal sosial merupakan salah satu aspek penilaian dalam penentuan status perkembangan desa, semakin tinggi modal sosial maka memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan status perkembangan desa.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Tradisi gotong-royong di desa-desa, terutama desa lokus TMMD masih kuat sehingga warga sukarela memberikan lahan / tanah dan sewa alat berat bagi pelebaran ruas jalan TMMD;
2. Warga menyadari bahwa manfaat insfrastruktur jalan bagi suatu wilayah cukup penting sehingga bersedia memberikan dukungan baik material maupun tenaga kerja demi memperoleh jalan yang lebar bagi kemudahan aksesibilitas;
3. Didorong kepentingan sosial ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi (transaksi perdagangan hasil bumi) maupun memudahkan aktivitas ke sekolah dan kesehatan;
4. Sinergitas yang besar TNI dan masyarakat dalam pembangunan di masyarakat perdesaan sehingga pelaksanaan kegiatan keswadayaan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana;
5. Dukungan dari Pimpinan Daerah dan seluruh *stakeholder* baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan di lapangan. Hal tersebut merupakan sumbangsih dan pendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar;

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian sebagai berikut :

1. Kegiatan pemberdayaan sangat didukung oleh tradisi gotong royong yang kuat. Oleh karena itu secara berkesinambungan menguatkan semangat kegotong - royongan yang ada di desa sekaligus memperkenalkan kepada generasi muda akan pentingnya kegotong - royongan dalam mewujudkan kemandirian desa dalam pembangunan;
2. Senantiasa melibatkan TNI, pimpinan wilayah, instansi pemerintah, tokoh masyarakat maupun unsur-unsur penggerak masyarakat lainnya dalam setiap kegiatan pembangunan di perdesaan sehingga masyarakat tertarik untuk berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan pembangunan desa;
3. Meningkatkan upaya-upaya menanamkan dan melestarikan nilai-nilai solidaritas sosial masyarakat sebagai salah satu modal sosial dalam mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan;
4. Memanfaatkan teknologi informasi dalam mengenalkan nilai-nilai kegotong royongan baik media cetak maupun media elektronik sehingga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat sesuai segmentasi sasaran;
5. Terus - menerus melaksanakan kegiatan rutin di tingkat masyarakat yang didalamnya terdapat penggerakkan, pelestarian dan pengenalan nilai-nilai kegotong - royongan seperti TNI Manunggal Mambangun Desa, Bulan Bhakti Gotong Royong, dan lain-lain.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator persentase tingkat perkembangan desa digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.23. Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Swadaya Masyarakat yang Mendukung Program Pemberdayaan Masyarakat

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	
1.	Program Penataan Desa Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	22.500.000	4	30%	22.350.000	4	36,96%	100%	100%	123,20%
	Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	22.500.000			22.350.000					

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2021

Penghitungan analisis atas efisiensi sumberdaya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke\ i} / RVK_{ke\ i}}{PAK_{ke\ i} / TVK_{ke\ i}} \right) \times 100\%}{n}$$

Sumber : PMK Nomor 249 tahun 2011

Keterangan :

- E : Efisiensi
- RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran
- PAK : Pagu Anggaran per Keluaran
- RVK : Realisasi volume Keluaran
- TVK : Target volume Keluaran
- N : Jumlah jenis keluaran

$$E = \frac{\left(1 - \frac{22.350.000/36,96}{22.500.000/30} \right) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{\left(1 - \frac{604.708}{750.000} \right) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{\left(1 - 0,8063 \right) \times 100\%}{1}$$

$$E = 19,37\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terdapat efisiensi pemanfaatan sumber data sebanyak 19,37 persen. Hal tersebut berarti dengan sumberdaya yang ada dibandingkan dengan capaian keluaran yang dicapai diperoleh efisiensi sebesar 19,37 persen.

Sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 5 orang PNS terdiri dari Golongan IV (S1 : 1 orang), Golongan III (S2 : 1 orang, S1 : 1 orang, dan 2 orang

THL. Keseluruhan pelaksana tersebut telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat tahun 2022 sebagai berikut :

1. Program Penataan Desa

Realisasi capaian program yaitu Persentase tingkat swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa sebesar 36,96 persen.

Program Penataan Desa didukung oleh Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa - Sub Kegiatan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa, dengan output yaitu

a. Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung pelaksanaan TMMD sebanyak Rp846.300.000,00. Rincian swadaya melalui kegiatan sebagai berikut :

- ❖ Terlaksananya TMMD Sengkuyung I di Desa Petir Kec. Purwanegara pada tanggal 11 Mei 2022 - 09 Juni 2022;
- ❖ Terlaksananya TMMD Sengkuyung II di Desa Sarwodadi Kec. Pejawaran pada tanggal 26 Juli 2022 - 24 Agustus 2022;
- ❖ Terlaksananya TMMD Sengkuyung III di Desa Badakaya Kec. Punggelan pada tanggal 11 Oktober 2022 - 09 November 2022;

b. Jumlah desa yang didampingi dalam pengelolaan bantuan keuangan provinsi (ifrastruktur) sebanyak 335 titik (166 Desa);

c. Jumlah Desa yang difasilitasi Bantuan Keuangan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) sebanyak 46 titik (46 desa);

d. Jumlah Desa yang difasilitasi Bantuan Keuangan Khusus (Bansus) sebanyak 244 titik.

Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas data dan informasi serta data mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan

Sasaran meningkatnya kualitas data dan informasi serta data mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun. Indikator ini dipilih untuk mengetahui data mikro keluarga memuat informasi individu dan anggota keluarga yang mencakup aspek demografi di Kabupaten Banjarnegara. Adapun realisasi kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.24. Realisasi Kinerja Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/kelurahan Tiap Tahun pada Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun	100%	100%	100%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan data di atas, realisasi kinerja cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun mencapai 100 persen. Total jumlah Kepala Keluarga yang dilaksanakan pendataan sejumlah 304.405 KK.

Penyediaan informasi data mikro keluarga untuk memotret gambaran kependudukan di Kabupaten Banjarnegara. Selanjutnya data mikro keluarga menjadi dasar penentuan arah kebijakan dalam rangka peningkatan dan pemerataan pembangunan di tahun berikutnya. Melalui informasi data mikro keluarga bisa diketahui seberapa jauh hasil program pembangunan yang telah dilaksanakan pada seluruh wilayah sehingga bisa diketahui wilayah mana yang menjadi prioritas pembangunan.

Berdasarkan hasil pendataan, diperoleh beberapa gambaran hasil program KKBPK diantaranya untuk peserta KB Aktif, kecamatan dengan persentase terendah yaitu kec. Purwareja Klampok (62,47%), Kec. Purwanegara (69,74%), Kec. Banjarnegara (72,19%), Kec. Wanadadi (72,89%) dan Kec. Pagedongan (73,72%). Selain itu pada data absolut Tahun 2022, pengantin diperoleh jumlah usia yang menikah kurang dari 20 tahun sebanyak 1.330 orang dimana jumlah terbanyak yaitu di kec. Wanayasa (115 orang), Kec. Kalibening (112 orang) dan Kec. Wanayasa (110 orang). Berdasarkan hasil data mikro keluarga selanjutnya digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengabambilan arah kebijakan pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Realisasi kinerja cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun pada Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.25.

Tabel 3.25. Realisasi Kinerja Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun pada Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun	100% (305.928 KK)	100% (304.733 KK)	100% (337.883 KK)	100% (304.305 KK)	100% (304.405 KK)

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan data di atas, capaian kinerja cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun dapat mencapai target 100 persen dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2021, secara serentak BKKBN melaksanakan pendataan keluarga yang dilaksanakan mulai tanggal 1 April - Juni 2021. Sedangkan untuk Tahun 2022, dilaksanakan pemutakhiran pendataan keluarga dengan bantuan institusi

Masyarakat Pedesaan (IMP) baik Pembantu KB Desa (PPKBD) (278 orang), Sub PPKBD (1.343 orang) maupun Kelompok KB (5.493 orang). Informasi data mikro keluarga memuat data indikator kependudukan, indikator pembangunan keluarga dan indikator *stunting*. Capaian kinerja cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiapdesa/kelurahan tiap tahun dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 3.29.

Tabel 3.26. Capaian Kinerja Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga Disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2021	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun	100%	100%	100%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

Komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat dalam hal ini BKKBN yang melaksanakan fasilitasi pendataan keluarga, Petugas Lapangan KB, pengurus RT, RW, aparat desa dan kecamatan serta petugas pendataan PPKBD dan sub PPKBD dalam penyusunan dan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala pada setiap jenjang pendataan pada seluruh wilayah serta meningkatkan koordinasi dan pendampingan petugas pendataan sehingga kuantitas dan kualitas data yang tersusun akurat dan tepat waktu.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.27. Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Cakupan Penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga disetiap Desa/Kelurahan Tiap Tahun

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	301.230.000	3	100%	280.989.776	3	100%	93,28%	100%	100%
1.	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kabupaten Penduduk	3.000.000			3.000.000					
	Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	3.000.000			3.000.000					

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	Kegiatan Pemetaan perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerahkabupaten/Kota	298.230.000			277.989.776					
	Sub Kegiatan Penyusunan Paramater Kependudukan	3.000.000			3.000.000					
	Sub Kegiatan Penyediaan data dan Informasi Keluarga	27.630.000			27.630.000					
	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	267.600.000			247.359.776					

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Penghitungan analisis atas efisiensi sumberdaya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke\ i} / RVK_{ke\ i}}{PAK_{ke\ i} / TVK_{ke\ i}}\right) \times 100\%}{n}$$

Sumber : PMK Nomor 249 tahun 2011

Keterangan :

- E : Efisiensi
- RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran
- PAK : Pagu Anggaran per Keluaran
- RVK : Realisasi volume Keluaran
- TVK : Target volume Keluaran
- N : Jumlah jenis keluaran

$$E = \frac{\left(1 - \frac{280.989.776/100}{301.230.000/100}\right) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{\left(1 - \frac{2.809.898}{3.012.300}\right) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - 0,9328) \times 100\%}{1}$$

$$E = 6,72\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terdapat efisiensi pemanfaatan sumber data sebanyak 6,72 persen. Hal tersebut berarti dengan sumberdaya yang ada dibandingkan dengan capaian keluaran yang dicapai diperoleh efisiensi sebesar 6,72 persen.

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 3 orang PNS Golongan III (S1 : 2 orang, SLTA : 1 orang) dan 1 orang THL. Dalam pelaksanaan tugas pengumpulan data di lapangan dibantu oleh Petugas Penyuluh KB, Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) dan Petugas Sub Pembantu Pembina KB Desa (Sub PPKBD) di

20 kecamatan. Keseluruhan pelaksana tersebut telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun dicapai melalui Program Pengendalian Penduduk. Realisasi capaian program yaitu sebagai berikut :

1. Persentase kepala keluarga yang dilakukan pendataan mikro keluarga sebanyak 100%
2. Persentase pemetaan pengendalian penduduk dan KB sebesar 100 persen;
3. Persentase informasi KKBPK sebesar 100 persen;
4. Persentase IMP Mandiri di desa/kelurahan sebesar 32,37 persen;
5. Persentase pemuka masyarakat dan agama yang mendukung program KB dan melakukan KIE sebesar 78,68 persen.

Program Pengendalian Penduduk didukung dua kegiatan, dengan rincian kegiatan pendukung sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kabupaten Penduduk Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal, dengan output Jumlah implementasi pendidikan kependudukan jalur formal dan non formal yang terlaksana sebanyak 2 kali (sekolah) pada :
 - a. Terlaksananya rakor Sekolah Siaga Kependudukan di SMK Taman Siswa Banjarnegara pada tanggal 20 Juli 2022;
 - b. Terlaksananya rakor Sekolah Siaga Kependudukan di SMA Muhammadiyah 1 Banjarnegara pada tanggal 21 Juli 2022;
2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten.Kota Sub Kegiatan Perumusan Parameter Kependudukan, dengan output yaitu keluaran Jumlah feed back (laporan bulanan) sebanyak 12 dokumen (bulan Januari s.d Desember 2022).
3. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga, dengan output Jumlah kepala keluarga beresiko stunting yang dilakukan pendataan sebanyak 5.526 Rumah Tangga.
4. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB, dengan output Jumlah fasilitasi pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan pelayanan KB sebanyak 20 paket pada 20 Balai KB untuk 12 bulan (Januari - Desember 2022).

Sasaran 6 : Meningkatnya Kesertaan KB

Sasaran meningkatnya kesertaan KB, diukur dengan 4 (empat) indikator kinerja sebagai berikut :

- a. Angka Kelahiran Total (TFR).
- b. Persentase peserta KB aktif.
- c. Persentase PUS peserta KB MKJP
- d. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need).
- e. Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun).

Adapun pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Angka Kelahiran Total (TFR)

Angka kelahiran total adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya (15-49 tahun). Angka kelahiran total memiliki peran penting dalam pengendalian jumlah penduduk maupun optimalisasi pembangunan khususnya untuk saat ini dalam mendukung terciptanya periode bonus demografi yang lebih panjang. Bonus demografi merupakan kondisi dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia tidak produktif (dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun). Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banjarnegara, pada tengah tahun 2022 jumlah penduduk usia produktif sebanyak 68,62 persen dan 31,38 persen sisanya termasuk dalam usia tidak produktif. Berdasarkan data tersebut, maka rasio ketergantungan atau beban tanggungan sebesar 45,73 persen. Rasio 45,73 persen artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung 45 - 46 penduduk tidak produktif.

Periode bonus demografi dapat memiliki periode yang lebih panjang apabila TFR dapat ditekan sehingga dalam jangka panjang. Apabila TFR bisa ditekan maka penambahan jumlah penduduk usia tidak produktif yang menjadi beban bisa menurun atau dijaga agar tidak lebih tinggi dibandingkan proporsi penduduk produktif. Menurunnya TFR akan meningkatkan jumlah usia produktif karena mengurangi proporsi jumlah usia tidak produktif. Usia produktif merupakan modal pembangunan yang sangat besar dengan disertai peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Target TFR Nasional Tahun 2022 sebesar 2,21, target provinsi Jawa Tengah sebesar 2,00 sedangkan target TFR Kabupaten Banjarnegara sebesar 2,3. Realisasi kinerja indikator Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Banjarnegara tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.28.

Tabel 3.28. Realisasi Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,30	1,75	131,43%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Angka Kelahiran Total (TFR) dicapai berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{Jumlah Anak Lahir Tahun } N}{\sum \text{Jumlah Penduduk Tengah Tahun}/1000} \times 140$$

(Sumber : Keputusan Bupati Nomor 061/1071 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Banjarnegara)

$$= \frac{13.042}{1.042.318} \times 140$$

$$= 1,75$$

Keterangan :

- 1) Sumber data jumlah kelahiran : Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara
- 2) Sumber data jumlah penduduk : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banjarnegara

Berdasarkan data di atas, realisasi Angka Kelahiran Total sudah memenuhi bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Angka Kelahiran Total 1,75 artinya rata-rata wanita sampai dengan akhir masa reproduksinya melahirkan 1 - 2. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, TFR menunjukkan tren yang menguat. Hal tersebut tidak terlepas dari keberhasilan penggerakan dan KIE KB yang mampu meningkatkan prevalensi penggunaan kontrasepsi modern, peningkatan jumlah peserta KB aktif dan tercapainya target PUS usia 15-19 tahun. Capaian TFR kabupaten tersebut merupakan kontribusi dari capaian seluruh kecamatan yang tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.29. Realisasi Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) Per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Total	Jumlah Penduduk	TFR
1	2	3	4	5
1.	Susukan	790	64.485	1,72
2.	Purwareja Klampok	563	48.493	1,63
3.	Mandiraja	1.097	80.794	1,90
4.	Purwanegara	1.036	84.197	1,72
5.	Bawang	756	64.981	1,63
6.	Banjarnegara	795	69.997	1,59
7.	Pagedongan	564	43.539	1,81
8.	Sigaluh	331	32.545	1,42
9.	Madukara	523	46.595	1,57
10.	Banjarmangu	541	46.678	1,62
11.	Wanadadi	438	34.736	1,77
12.	Rakit	705	55.351	1,78
13.	Punggelan	1.161	90.144	1,80
14.	Karangkobor	404	32.115	1,76
15.	Pagentan	511	39.238	1,82
16.	Pejawaran	643	45.093	2,00
17.	Batur	614	41.687	2,06

No	Kecamatan	Jumlah Kelahiran Total	Jumlah Penduduk	TFR
1	2	3	4	5
18.	Wanayasa	689	50.954	1,89
19.	Kalibening	612	47.418	1,81
20.	Pandanarum	269	23.278	1,62
		13.042	1.042.318	1,75

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022



Gambar 3.9. TFR Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

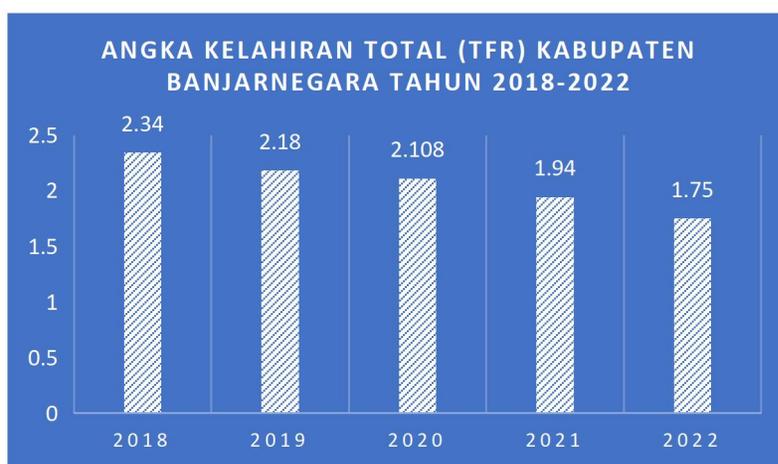
Berdasarkan data di atas, angka TFR kecenderungan tinggi pada wilayah atas atas dengan angka tertinggi 2,06 pada Kecamatan Batur. Sedangkan, angka TFR terendah terdapat di wilayah bawah yaitu Kecamatan Sigaluh. Berdasarkan gambaran wilayah tersebut, TFR dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah, tingkat pendidikan, kesejahteraan masyarakat, aksesibilitas dan juga kebijakan pembangunan pemerintah.

Capaian kinerja Angka Kelahiran Total dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada Tabel 3.32.

Tabel 3.30. Capaian Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,34	2,18	2,108	1,94	1,75

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022



Gambar 3.10. Angka Kelahiran Total Kab. Banjarnegara Tahun 2018 - 2022

Berdasarkan tabel di atas, Angka Kelahiran Total memiliki trend yang menurun. Mulai 2018 angka kelahiran total menurun sampai dengan Tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan keberhasilan Program KKBPK dalam menurunkan angka TFR. Komponen penyusun TFR yaitu jumlah penduduk dan jumlah kelahiran. Gambaran jumlah penduduk dan kelahiran di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 - 2022 ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 3.11. Jumlah Kelahiran Total Kab. Banjarnegara Tahun 2018 - 2022



Gambar 3.12. Jumlah Penduduk Kab. Banjarnegara Tahun 2018 - 2022

Realisasi kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.31. Capaian Kinerja Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2022	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,30	1,75	131,43%

Sumber :Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3.32, Capaian Angka Kelahiran Total (TFR) tahun 2022 dibandingkan target capaian akhir Renstra pada tahun 2022 sudah melebihi target dengan capaian 131,43 persen. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. Realisasi Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan Target Provinsi Jawa Tengah disajikan pada Tabel 3.34.

Tabel 3.32. Realisasi Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan Nasional Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Banjarnegara	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,21	1,75	126,29

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan data di atas, realisasi Angka Kelahiran Total (TFR) Kabupaten Banjarnegara di atas realisasi Provinsi Jawa Tengah dengan capaian 126,29 persen. Realisasi Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan dengan target nasional disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 3.33. Realisasi Kinerja Kinerja Angka Kelahiran Total (TFR) dibandingkan dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Target Nasional 2022	Realisasi 2022	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,10	1,75	120

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3.34, Realisasi Angka Kelahiran Total (TFR) tahun 2022 dibandingkan nasional, Kabupaten Banjarnegara sudah memenuhi target nasional dengan capaian 120 persen.

Berdasarkan tabel di atas, capaian angka TFR Kab.Banjarnegara Tahun 2022 di atas capaian provinsi dan nasional. Capaian tersebut bisa sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan program Keluarga Berencana dalam rangka pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Banjarnegara.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Terlaksananya kegiatan Promosi dan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) Program KKBPK kepada masyarakat baik melalui media cetak, elektronik maupun luar ruangan;
2. Tercukupinya kebutuhan alat dan obat kontrasepsi melalui penyediaan, pemetaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi secara tepat waktu dan sasaran kepada 56 fasilitas kesehatan baik pemerintah maupun swasta yang tersebar di 20 kecamatan se Kabupaten Banjarnegara;
3. Peningkatan pembinaan pelayanan KB Pasca persalinan dan keguguran melalui pembinaan kesehatan reproduksi;
4. Peningkatan pendewasaan usia kawin pertama untuk memperpendek masa fertilitas perempuan. Median usia perkawinan pertama tahun 2022 yaitu 27 tahun serta persentase PUS kurang dari 20 tahun sebanyak 1,88 persen;
5. Ketersediaan sarana prasarana pelayanan KB bagi Petugas Penyuluh KB dalam melaksanakan pelayanan pembinaan KB;
6. Pelayanan yang tepat sasaran dan pembinaan yang berkesinambungan mulai dari Petugas Penyuluh KB, Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD sehingga pembinaan dan penggerakan KB menjangkau seluruh wilayah;
7. Meningkatnya pengetahuan SDM terutama bidan desa dalam memberikan KIE KB Pasca Persalinan;
8. Kesadaran pasangan usia subur yang semakin tinggi dalam penggunaan alat kontrasepsi modern sehingga tingkat kegagalan semakin rendah;
9. Model pengembangan Kampung KB Berkualitas yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga di kampung tersebut.

Tantangan dalam pencapaian :

1. Persentase KB Aktif belum memenuhi target 79,24 persen. Meskipun meningkat dari tahun sebelumnya, persentase KB aktif hanya mencapai 77,20 persen;
2. Persentase PUS usia < 20 tahun meningkat yaitu sebesar 1,88 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 sebesar 1,724;
3. Jumlah tenaga lapangan penyuluh KB sangat kurang. Saat ini dari 278 desa banyak tersedia 35 PLKB, sehingga satu orang petugas PLKB mengampu 8 - 9 desa/kelurahan.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung kegiatan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) melalui berbagai media;
2. Pemetaan kebutuhan serta menjaga ketersediaan alat kontrasepsi pada setiap KKB di Kabupaten Banjarnegara;

3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan KB dalam rangka optimalisasi kinerja Program Keluarga Berencana;
4. Peningkatan kapasitas untuk bidan desa dalam pelaksanaan KIE KB Pasca Persalinan;
5. Optimalisasi kinerja dan pendidikan keluarga berencana pada Kampung KB;
6. Rapat Koordinasi operasional secara berkala pelaksanaan program KKBPK melalui pelaksanaan rakorcam, rakordes dan mini lokakarya;
7. Koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak baik instansi/Lembaga/Mitra Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara, Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Pusat;
8. Integrasi lintas sektor dalam pengembangan kampung KB berkualitas.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator Angka Kelahiran Total (TFR) digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.34. Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Angka Kelahiran Total (TFR)

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	3.527.915.000	9	2,30	3.039.267.040	9	1,75	94,43%	100%	131,34%
1	Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.262.015.000			1.236.806.840			98		
	Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000			4.374.900			100		
	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000			24.995.900			99,98		
	Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000			70.590.000			99,93		
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	312.000.000			307.380.000			99,52		
	Sub Kegiatan Pengelolaan	810.000.000			792.116.040			97,79		

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KB	40.000.000			37.350.000			93,00		
2	Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.334.400.000			1.334.400.000			100		
	Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.334.400.000			1.334.400.000			100		
3	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	931.500.000			903.630.000			97,01		
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	931.500.000			903.630.000			97,01		

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Penghitungan analisis atas efisiensi sumberdaya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke\ i} / RVK_{ke\ i}}{PAK_{ke\ i} / TVK_{ke\ i}} \right) \times 100\%}{n}$$

Sumber : PMK Nomor 249 tahun 2011

Keterangan :

- E : Efisiensi
- RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran
- PAK : Pagu Anggaran per Keluaran
- RVK : Realisasi volume Keluaran
- TVK : Target volume Keluaran
- N : Jumlah jenis keluaran

$$E = \frac{\left(1 - \frac{3039267040/2,3}{3527915000/1,75} \right) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{\left(1 - \frac{1.321.420.452}{2.015.951.429} \right) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - 0,6555) \times 100\%}{1}$$

$$E = 34,45\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terdapat efisiensi pemanfaatan sumber data sebanyak 34,45 persen. Hal tersebut berarti dengan sumberdaya yang ada dibandingkan dengan capaian keluaran yang dicapai diperoleh efisiensi sebesar 34,45 persen.

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 12 orang PNS terdiri dari Golongan IV (S2 : 2 orang, S1 : 1 orang) Golongan III (S1 : 4 orang, SLTA : 2 orang), 1 orang PTT dan 2 orang THL. Selain itu dalam pelaksanaan penggerakan dan pelayanan KB di lapangan, Dispermades PPKB didukung oleh petugas Penyuluh KB sebanyak 311 orang yang tersebar di 20 kecamatan se-Kab. Banjarnegara.

Selain aparat kabupaten dan penyuluh KB pelaksanaan Program KB juga dibantu oleh 278 orang Pembantu KB Desa (PPKBD), 1.343 orang Sub PPKBD (Tingkat RW) dan 513 Kelompok KB (Tingkat RT) dan keseluruhan pelaksana tersebut merupakan potensi sumberdaya dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program yang mendukung Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu Program Keluarga Berencana dengan 2 (dua) kegiatan. Output dari masing-masing kegiatan pendukung sebagai berikut :

Program Pembinaan Keluarga Berencana

1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal, terdiri dari 6 sub kegiatan. Rincian output sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja, dengan output Jumlah stakeholder dan mitra kerja yang mendukung program KB dan melakukan KIE sebanyak 2 mitra dalam launching DAHSAT di Desa Pingit Kec. rakit pd tgl. 20 September 2022.;

b. Sub Kegiatan : Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal, dengan output :

- Pelaksanaan Rapat minilokakarya di Kampung KB sebanyak 54 kali
- Jumlah X Banner sebanyak 20 buah;
- Jumlah bendera layur KB sebanyak 12 meter;
- Jumlah souvenir/cendera mata sebanyak 180 buah.

c. Sub Kegiatan : Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang, dengan output

- 1) Jumlah komunikasi informasi edukasi (KIE) pendewasaan PUP lewat media tradisional sebanyak 14 paket (Kec. Pagedongan (2), Karangobar (3), Sigaluh (2), Pandanarum (2), Rakit (1) dan Purwareja Klampok (1) dan Banjarmangu (2));

- 2) Jumlah spot radio (iklan masyarakat) sebanyak 1.600 siar (POP FM dan Suara Banjarnegara);
 - 3) Jumlah baliho yang dipelihara sebanyak 142 meter (17 baliho terdiri dari 14 baliho kecamatan dan 3 baliho kabupaten).
- d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok), dengan output Jumlah regulasi/kebijakan yang difasilitasi untuk dilaksanakan program KKBPK sebanyak 240 regulasi.
- e. Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK, dengan output Jumlah audit stunting yang dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan tahapan sebagai berikut ;
- 1) Audit Kasus Stuning Kesatu
 - ❖ Terlaksananya rapat Koordinasi Audit Stunting pada tanggal 21 Juni 2022 di RSUD Hj. Anna Lasmanah Kab. Banjarnegara;
 - ❖ Terlaksananya identifikasi dan seleksi Audit Kasus Stunting pada tanggal 15 Juli 2022;
 - ❖ Terlaksananya Audit Kasus Stunting pada tanggal 13 September 2022.
 - 2) Audit Kasus *Stunting* Kedua
 - ❖ Terlaksananya identifikasi Audit Kasus Stunting pada tanggal 10 Oktober 2022;
 - ❖ Terlaksananya audit kasus stunting pada tanggal 19 Oktober 2022;
 - ❖ Terlaksananya penyusunan Rencana Tindak Lanjut Audit Kasus Stunting pada tanggal 20 Oktober 2022.
2. Kegiatan Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
- a. Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP), dengan output sebagai berikut :
 - Jumlah fasilitasi pembinaan KIE Program KKBPK oleh Sub PPKBD dan Sub PPKBD sebanyak 26.688 orang kali kegiatan dari target 26.688;
 - Jumlah IMP aktif sebanyak 278 orang;
 - Jumlah IMP Mandiri sebanyak 90 IMP.
3. Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB, dengan output :
- 1) Jumlah kelompok kerja (Pokja) di Kampung KB yang difasilitasi/dibina sebanyak 266 kali;

- 2) Jumlah kelompok kegiatan ketahanan keluarga di Kampung KB yang difasilitasi/dibina sebanyak 432 kali.

b. Persentase Peserta KB Aktif.

Indikator Persentase Peserta KB Aktif untuk mengetahui jumlah peserta KB aktif di Kabupaten Banjarnegara. Peserta KB aktif dalam hal ini yaitu Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan alat/cara KB modern berupa sterilisasi wanita (MOW), sterilisasi pria (MOP), Pil, IUD, Suntik, Susuk KB (Implant) dan kondom. Persentase Peserta KB Aktif dihitung berdasarkan jumlah pasangan usia subur yang menggunakan alat kontrasepsi moder dibagi jumlah PUS keseluruhan dan dinyatakan dalam satuan persen. Realisasi kinerja indikator Persentase Peserta KB Aktif pada tahun 2022 diukur dengan cara membandingkan target dan realisasi capaian yang disajikan pada Tabel 3.37.

Tabel 3.35. Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase Peserta KB Aktif	79,24%	77,20%	97,43%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Indikator Peserta KB Aktif dicapai berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\sum \text{Peserta KB Aktif}}{\sum \text{Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$$

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 061/1071 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Banjarnegara

$$= \frac{140.967}{182.602} \times 100\%$$

$$= 77,20\%$$

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2022 sebanyak 77,20 persen pasangan usia subur di Kabupaten Banjarnegara yang menggunakan alat kontrasepsi modern. Realisasi persentase peserta KB aktif tersebut, meskipun belum memenuhi target yang telah ditetapkan namun tergolong capaian kinerja baik dengan persentase capaian capaian 97,43 persen. Capaian kinerja persentase KB aktif meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 76,09 persen. Distribusi persentase KB aktif per kecamatan di Kabupaten Banjarnegara ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.36. Realisasi Kinerja Persentase KB Aktif Per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Peserta KB Aktif	Jumlah PUS	Persentase KB Aktif
1	2	3	4	5
1.	Susukan	7.934	10.623	74,69%
2.	Purwareja Klampok	4.495	7.195	62,47%
3.	Mandiraja	10.573	13.398	78,91%
4.	Purwanegara	9.693	13.899	69,74%
5.	Bawang	9.440	11.674	80,86%
6.	Banjarnegara	7.560	10.472	72,19%
7.	Sigaluh	3.999	5.439	73,52%
8.	Madukara	6.016	7.734	77,79%
9.	Banjarmangu	7.335	8.827	83,10%
10.	Wanadadi	4.257	5.840	72,89%
11.	Rakit	7.777	9.788	79,45%
12.	Punggelan	12.570	16.240	77,40%
13.	Karangkoobar	4.910	6.060	81,02%
14.	Pagentan	7.846	9.554	82,12%
15.	Pejawaran	6.537	7.953	82,20%
16.	Batur	5.869	7.385	79,47%
17.	Wanayasa	8.286	9.685	85,55%
18.	Kalibening	6.657	8.609	77,33%
19.	Pandanarum	3.813	4.719	80,80%
20.	Pagedongan	5.400	7.508	71,92%
		140.967	182.602	77,20%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022



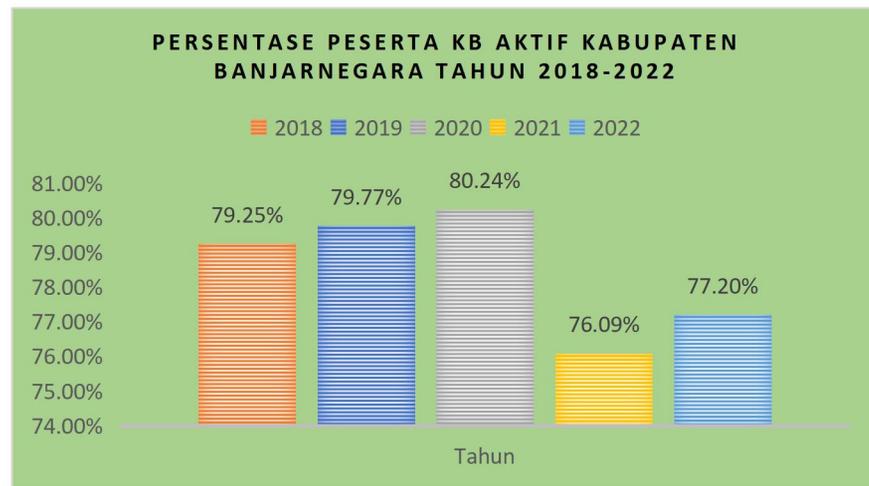
Gambar 3.13. TFR Berdasarkan Kecamatan Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, persentase KB aktif tertinggi cenderung pada wilayah atas yaitu kecamatan Wanayasa, Banjarnangu, Pagentan dan Pejawaran. Sedangkan persentase KB aktif terendah cenderung pada wilayah kecamatan bawah yaitu Purwareja Klampok, Purwanegara dan Kec. Pagedongan. Realisasi kinerja indikator persentase KB aktif tahun 2018 – 2022 disajikan pada Tabel 3.38.

Tabel 3.37. Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peserta KB Aktif	79,25	79,77	80,24	76,09	77,20

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022



Gambar 3.14. Persentase Pesera KB Aktif Tahun 2018 - 2022

Berdasarkan Tabel 3.38, realisasi kinerja persentase KB aktif di Kabupaten Banjarnegara dari tahun mengalami penurunan pada tahun 2021. Sebagaimana diketahui capaian tahun 2021 dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 dimana berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri untuk wilayah Jawa dan Bali secara berkala terdapat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sesuai dengan kriteria level situasi pandemi dalam rangka pengendalian penyebaran COVID-19. Pengaruh pandemi COVID terhadap pelayanan KB diantaranya :

1. PUS enggan pergi ke faskes untuk pelayanan KB;
2. Terdapat pembatasan hari dan jumlah pelayanan KB;
3. Fasilitas Kesehatan lebih fokus melaksanakan pencegahan dan penanganan COVID-19;
4. Pelaksanaan KB Momentum yang sebelumnya dilaksanakan untuk pelayanan banyak akseptor dan terpusat pada satu tempat, pada masa pandemi dilaksanakan dengan penerapan protokol serta pembatasan pelayanan;
5. Tenaga kesehatan harus menggunakan alat pelindung diri dan deteksi dini COVID-19, yang berdampak pada penambahan anggaran.

Realisasi kinerja persentase KB aktif dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada sebagai berikut .:

Tabel 3.38. Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2021	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Persentase Peserta KB Aktif	79,24%	77,20%	97,43%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3.39, menunjukkan bahwa realisasi kinerja persentase KB aktif Tahun 2022 belum memenuhi target tahunan bahkan target akhir Renstra dengan capaian 97,4 persen. Selama jangka waktu Tahun 2018 - 2022, pada tiga tahun pertama selalu memenuhi target jangka menengah. Namun pada dua tahun terakhir (2021 dan 2022), capaian persentase KB Aktif tidak memenuhi target meskipun dengan kinerja yang termasuk baik karena realisasi capaian lebih dari 90 persen. Perbandingan realisasi kinerja peserta KB aktif dengan Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten di wilayah sekitar disajikan pada dibawah ini.

Tabel 3.39. Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten di Wilayah Sekitar Banjarnegara

No	Indikator Kinerja	Banjarnegara	Purbalingga	Banyumas	Kebumen	Cilacap
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Peserta KB Aktif	77,20%	72,44%	65,14%	65,04%	63,60%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2021



Gambar 3.15. Persentase Pesera KB Aktif di Kab. Banjarnegara dan Kab/kota sekitar

Berdasarkan Tabel 3.40 menunjukkan bahwa realisasi kinerja persentase peserta KB aktif di Kabupaten Banjarnegara merupakan capaian tertinggi dibandingkan kabupaten sekitar. Meskipun capaian KB aktif belum mencapa target, namun angka tersebut lebih tinggi dari kabupaten lainnya. Selain itu capaian Kabupaten Banjarnegara juga lebih tinggi dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 64,75 persen.

Semakin tinggi persentase peserta KB aktif, maka Program Keluarga Berencana semakin berhasil. Realisasi kinerja persentase KB aktif dibandingkan dengan target Provinsi Jawa Tengah disajikan pada Tabel 3.40.

Tabel 3.40. Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif dibandingkan dengan Target Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja	Target Provinsi Jawa Tengah	Realisasi 2022	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Persentase Peserta KB Aktif	64,76%	77,20%	119,21%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Realisasi kinerja persentase KB aktif dibandingkan dengan target Nasional disajikan pada sebagai berikut :

Tabel 3.41. Realisasi Kinerja Persentase Peserta KB Aktif dibandingkan dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi 2021	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Persentase Peserta KB Aktif	62,54%	77,20%	123,44%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3.42, menunjukkan bahwa realisasi kinerja persentase KB aktif sudah memenuhi target kinerja Renstra pada tahun berjalan bahkan capaian di atas target nasional dengan capaian 125,35 persen. Dengan demikian pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja bila dibandingkan dengan target nasional sangat memuaskan.

Permasalahan dalam pencapaian kinerja :

1. Masih adanya mitos di masyarakat terkait alat dan obat kontrasepsi, sehingga masyarakat takut untuk ber-KB;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan KB di daerah tertinggal dan terpencil;
3. Keyakinan dalam masyarakat untuk banyak anak banyak rejeki, sehingga PUS tidak ber -KB;
4. Belum optimalnya pelayanan KB pasca persalinan dan pasca keguguran, sehingga PUS tidak langsung ber -KB.

Solusi dalam mengatasi permasalahan :

1. Melaksanakan promosi, komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait melalui berbagai media dengan melibatkan mitra kerja tokoh masyarakat/tokoh agama;
2. Melaksanakan peningkatan kapasitas, monitoring dan fasilitasi pelayanan KB di daerah tertinggal dan terpencil

3. Mendorong pelayanan KB mandiri dan mendorong Praktek Mandiri Bidan (PMB) yang belum berjejaring dengan BPJS/Faskes Induk agar bisa menjadi K/0/KB dan aktif melayani KB;
4. Monitoring ketersediaan alat dan obat kontrasepsi di Fasilitas Kesehatan untuk mencegah *Stock Out* Alokon bersama dengan Tim Peningkatan Kualitas Rantai Pasok Alokon;
5. Penguatan kerjasama dengan *stakeholder* dan mitra kerja dalam rangka optimalisasi penggerakan KB terutama di wilayah dan sasaran khusus pada kegiatan momentum;

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator Persentase Peserta KB Aktif digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.42. Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Peserta KB Aktif

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.086.818.000	9	79,24%	2.052.406.250	9	77,20%	97,43	100%	96,55%
	Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.500.000			21.500.000					
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.065.668.000			2.030.906.250					

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Penghitungan analisis atas efisiensi sumberdaya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke i} / RVK_{ke i}}{PAK_{ke i} / TVK_{ke i}} \right) \times 100\%}{n}$$

Sumber : PMK Nomor 249 tahun 2011

Keterangan :

- E : Efisiensi
- RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran
- PAK : Pagu Anggaran per Keluaran
- RVK : Realisasi volume Keluaran
- TVK : Target volume Keluaran

N : Jumlah jenis keluaran

$$E = \frac{(1 - \frac{2.052.406.250/77,20}{2.068.818.000/79,24}) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - \frac{26585573,19}{26108253,41}) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - 1,0828) \times 100\%}{1}$$

$$E = -1,83\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terdapat belum efisiensi pemanfaatan sumber data sebanyak (-1,83) persen. Hal tersebut berarti dengan sumberdaya yang ada dibandingkan dengan capaian keluaran yang dicapai diperoleh efisiensi sebesar (-1,83) persen.

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 9 orang PNS yang terdiri dari Golongan IV (S2 : 1 orang, S1 : 1 orang), Golongan III (S1 : 4 orang), Golongan II (S1 : 1 orang), PTT (1 orang) dan THL (1 orang).

Selain aparat kabupaten dan penyuluh KB pelaksanaan Program KB juga dibantu oleh 278 orang Pembantu KB Desa (PPKBD), 1.343 orang Sub PPKBD (Tingkat RW) dan 513 Kelompok KB (Tingkat RT) dan keseluruhan pelaksana tersebut merupakan potensi sumberdaya dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung Persentase Peserta KB Aktif dicapai dengan 1 (satu) Program Pembinaan Keluarga Berencana dengan output kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya, dengan output Jumlah KKB yang menerima distribusi alat dan obat kontrasepsi sebanyak 52 KKB untuk 12 bulan (Januari - Desember 2022);
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB, dengan output :
 - 1) Jumlah kendaraan antar jemput akseptor/pendamping keluarga stunting (roda empat) sebanyak 1 Unit (BAST 5 Juli 2022)
 - 2) Jumlah kendaraan antar jemput akseptor/pendamping keluarga stunting (roda dua) sebanyak 22 unit (BAST tanggal 20 Mei 2022);
 - 3) Jumlah sarana prasarana SIGA (personal komputer dan printer) sebanyak 2 Paket (BAST tanggal 13 Juli 2022);

- 4) Jumlah kelengkapan balai yang diadakan sebanyak 10 Paket (10 Balai) terdiri dari :
 - a) Jumlah Genset yang diadakan sebanyak 10 unit (BAST 02 Juni 2022);
 - b) Jumlah AC yang diadakan sebanyak 16 Unit (BAST 07 Juli 2022);
 - c) Jumlah Lemari Arsip yang diadakan sebanyak 20 unit (BAST tanggal 11 Juli 2022);
 - d) Jumlah meja kerja yang diadakan sebanyak 30 unit (BAST tanggal 1 Juli 2022);
 - e) Jumlah kursi susun yang diadakan sebanyak 150 unit (BAST tanggal 1 Juli 2022).
- 5) Jumlah Balai yang mendapatkan rehabilitasi sebanyak 2 Balai terdiri dari :
 - a) Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Banjarmangu (BAST tanggal 15 Agustus 2022);
 - b) Rehabilitasi Balai Penyuluhan KB Kecamatan Madukara (BAST tanggal 15 Agustus 2022).

c. Persentase PUS peserta KB MKJP

Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah PUS yang menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang di Kabupaten Banjarnegara. Realisasi kinerja indikator Persentase PUS peserta KB MKJP pada tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.44.

Tabel 3.43. Persentase PUS peserta KB MKJP Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase PUS peserta KB MKJP	28,75%	32,42%	112,77%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Indikator Persentase PUS peserta KB MKJP dicapai berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur Pengguna KB MKJP}}{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}} \times 100\%$$

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 061/1071 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Banjarnegara

$$= \frac{45.699}{140.967} \times 100\%$$

$$= 32,42\%$$

Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) adalah kontrasepsi yang dapat dipakai dalam jangka waktu lama, lebih dari 2 tahun, efektif dan efisien untuk tujuan pemakaian menjarangkan kelahiran lebih dari 3 tahun atau mengakhiri kehamilan pada pasangan yang sudah tidak ingin menambah anak lagi. MKJP memiliki tingkat keefektian yang

tinggi dengan tingkat kegagalan yang rendah serta komplikasi dan efek samping yang lebih rendah dibandingkan metode kontrasepsi yang lain. Terdapat berbagai jenis MKJP seperti kontrasepsi dalam rahim (AKDR) atau *Intra Uterine Device* (IUD), implan, Medis Operatif Wanita (MOW) dan Medis Operasi Pria (MOP). Persentase PUS peserta KB MKJP Tahun 2022 sebesar 32,42 persen sudah melampaui target yang ditetapkan dengan kategori capaian sangat baik sebesar 112,77 persen. Capaian tersebut merupakan kontribusi dari capaian wilayah kecamatan sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.44. Realisasi Kinerja Persentase PUS peserta KB MKJP Per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Jumlah Peserta KB MKJP	Jumlah Peserta KB Aktif	Persentase KB MKJP
1	2	3	4	5
1.	Susukan	2.224	7.934	28,03
2.	Purwareja Klampok	1.643	4.495	36,55
3.	Mandiraja	2.688	10.573	25,42
4.	Purwanegara	2.654	9.693	27,38
5.	Bawang	3.640	9.440	38,56
6.	Banjarnegara	3.383	7.560	44,75
7.	Sigaluh	1.704	3.999	42,61
8.	Madukara	2.558	6.016	42,52
9.	Banjarmangu	2.696	7.335	36,76
10.	Wanadadi	1.484	4.257	34,86
11.	Rakit	1.985	7.777	25,52
12.	Punggelan	3.937	12.570	31,32
13.	Karangkoobar	3.412	4.910	36,52
14.	Pagentan	2.464	7.846	43,49
15.	Pejawaran	2.464	6.537	37,69
16.	Batur	1.359	5.869	23,16
17.	Wanayasa	1.926	8.286	23,24
18.	Kalibening	1.588	6.657	23,85
19.	Pandanarum	1.225	3.813	32,13
20.	Pagedongan	1.336	5.400	24,74
		45.699	140.967	32,42

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Realisasi Persentase PUS peserta KB MKJP tahun 2022 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.45. Realisasi Kinerja Persentase PUS peserta KB MKJP Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase PUS peserta KB MKJP	29,69%	30,06%	31,64%	32,08%	32,42%

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2021



Gambar 3.16. Persentase PUS peserta KB MKJP Tahun 2018-2022

Pemerintah mensosialisasikan dan memberikan pelayanan kontrasepsi sebagai salah satu langkah untuk mengendalikan angka kelahiran total. Hal tersebut untuk mengurangi dampak negatif bonus demografi, seperti tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya lapangan kerja, pengangguran, efek sosial yang buruk, hilangnya momentum untuk mengumpulkan tabungan sehingga akhirnya menyebabkan kemiskinan. Jika pengendalian tidak dilakukan maka akan berdampak pula pada kesehatan ibu dan anak. Semakin banyak yang menggunakan MKJP, penurunan angka kelahiran semakin efektif. Berdasarkan gambar di atas, persentase PUS peserta KB MKJP mengalami kecenderungan meningkat, sehingga diharapkan akan semakin bisa mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Realisasi kinerja Persentase PUS peserta KB MKJP dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 3.47.

Tabel 3.46. Realisasi Kinerja Persentase PUS peserta KB MKJP Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2021	Capaian $(4/3) \times 100$
1	2	3	4	5
1	Persentase PUS peserta KB MKJP	28,75%	32,42%	112,77%

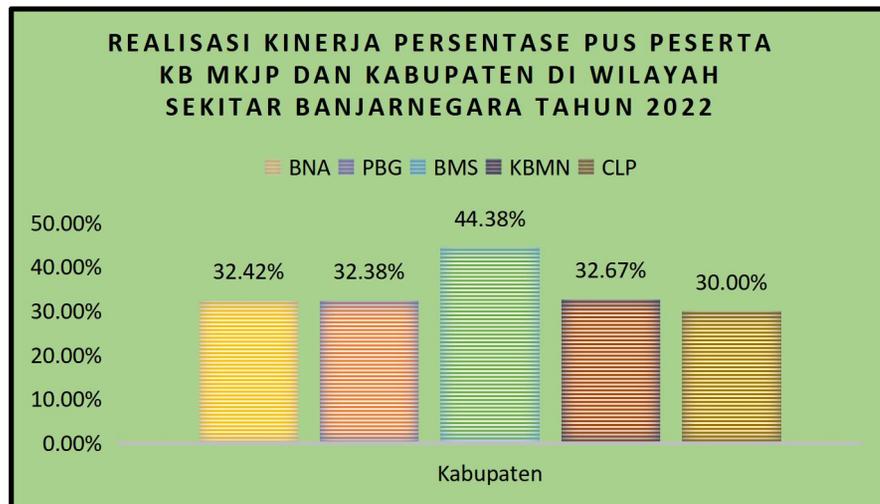
Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir Renstra yang juga merupakan tahun realisasi target jangka menengah. Berdasarkan tabel di atas, capaian persentase Peserta KB MKJP telah mencapai target dengan sangat baik yaitu capaian 112,77%. Semakin besar pemakaian MKJP, maka semakin efektif pelayanan Keluarga Berencana. Realisasi Kinerja Persentase peserta KB MKJP Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten di Wilayah Sekitar Banjarnegara ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.47. Realisasi Kinerja Persentase peserta KB MKJP Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten di Wilayah Sekitar Banjarnegara

No	Indikator Kinerja	Banjarnegara	Purbalingga	Banyumas	Kebumen	Cilacap
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase PUS peserta KB MKJP	32,42	32,38%	44,38%	32,67%	30%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022



Gambar 3.17. Persentase PUS Peserta KB MKJP di Kab. Banjarnegara dan Kab/kota sekitar

Berdasarkan data di atas, capaian MKJP Kabupaten Banjarnegara menempati urutan ketiga dibandingkan kabupaten sekitar. Persentase MKJP tertinggi dicapai oleh Kabupaten Banyumas yang disusul Kabupaten Purbalingga.

Hal-hal yang mendukung pencapaian indikator :

1. Terfasilitainya kebutuhan alat dan obat kontrasepsi sesuai dengan permintaan masyarakat pada 56 Fasilitas Kesehatan di 20 Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara;
2. Terselenggaranya KB Momentum dengan mitra kerja dalam rangka penggerakkan KB terutama diarahkan untuk KB MKJP;
3. Melaksanakan pemetaan pelayanan MKJP per wilayah keamatan, sehingga prioritas penanganan MKJP lebih tepat sasaran;
4. Optimalisasi dana penggerakkan MKJP ada dengan sasaran utama daerah dengan KB MKJP rendah dan *Unmet Need* tinggi;

Upaya mempertahankan capaian :

1. Bersama dengan BKKBN Pusat melaksanakan fasilitasi penyediaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi MKJP
2. Melakukan penguatan Faskes Pemerintah, Faskes Swasta dan Peran UKB dalam meningkatkan pelayanan MKJP;

3. Penyediaan dan penyebarluasan informasi serta pelayanan terutama keunggulan, efektivitas dan manfaat MKJP dengan prioritas wilayah dengan tingkat kepesertaan MKJP rendah;
4. Mengoptimalkan peran tim jaga mutu baik untuk mejamin kualitas pelayanan dan meminimalisir kasus komplikasi kegagalan MKJP; pada 56 Fasilitas Kesehatan di 20 Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator Persentase PUS peserta KB MKJP digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.48. Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase PUS peserta KB MKJP

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.075.039.400	9	28,75%	1.059.853.300	9	32,42%	98,59	112,7	96,55
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.072.039.400			1.056.853.300					
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	3.000.000			3.000.000					

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Penghitungan analisis atas efisiensi sumberdaya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke i} / RVK_{ke i}}{PAK_{ke i} / TVK_{ke i}} \right) \times 100\%}{n}$$

Sumber : PMK Nomor 249 tahun 2011

Keterangan :

- E : Efisiensi
- RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran
- PAK : Pagu Anggaran per Keluaran
- RVK : Realisasi volume Keluaran
- TVK : Target volume Keluaran
- N : Jumlah jenis keluaran

$$E = \frac{(1 - \frac{1.059.853.300/32,42}{1.075.039.400/28,75}) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - \frac{32691341,76}{37392674,78}) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - 0,8743) \times 100\%}{1}$$

$$E = 12,57\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terdapat efisiensi pemanfaatan sumber data sebanyak 12,57 persen. Hal tersebut berarti dengan sumberdaya yang ada dibandingkan dengan capaian keluaran yang dicapai diperoleh efisiensi sebesar 12,57 persen.

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 3 orang yang terdiri dari Golongan IV (S2 : 1 orang), Golongan III (S1 : 1 orang) dan THL (1 orang). Selain aparat kabupaten dan penyuluh KB pelaksanaan Program KB juga dibantu oleh 278 orang Pembantu KB Desa (PPKBD), 1.343 orang Sub PPKBD (Tingkat RW) dan 513 Kelompok KB (Tingkat RT) dan keseluruhan pelaksana tersebut merupakan potensi sumberdaya dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung Persentase Peserta KB Aktif dicapai dengan 1 (satu) Program Pembinaan Keluarga Berencana melalui Kegiatan Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota. Output kegiatan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dengan output :
 - a. Jumlah peserta IUD Implant yang difasilitasi sebanyak 4.049 orang (1.040 IUD dan 3.009 Implant);
 - b. Jumlah peserta KB MOW yang difasilitasi (BOKB) sebanyak 3 orang.;
 - c. Jumlah peserta KB yang difasilitasi pencabutan Implant sebanyak 86 orang.;
2. Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP, dengan output Jumlah peserta mengalami komplikasi berat/kegagalan akibat pemakaian KB MKJP yang mendapat ayoman sebanyak 0 peserta karena tidak terdapat akseptor yang mengalami kegagalan KB.

d. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*)

Indikator cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) untuk mengetahui jumlah PUS yang ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi dan tidak menggunakan alat kontrasepsi di Kabupaten Banjarnegara. Realisasi kinerja indikator Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) pada tahun 2021 disajikan pada Tabel 3.48.

Tabel 3.49. Capaian Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	6,99%	6,99%	100%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2021

Indikator Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) dicapai berdasarkan perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah (Pasangan Usia Subur tidak KB) ial + tial}}{\text{Jumlah PUS (usia 15 - 49)}} \times 100\%$$

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 061/1071 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Banjarnegara

$$= \frac{5.926 + 6.838}{182.602} \times 100\%$$

$$= \frac{12.764}{182.609} \times 100\%$$

$$= 6,99\%$$

Pada tahun 2022, sebanyak 6,99 persen pasangan usia subur yang ingin ber KB tidak mendapatkan pelayanan kontrasepsi. Kebutuhan ber KB yang tidak terlayani tersebut terjadi pada wanita yang ingin menjarangkan (*spacing*) kelahiran sebanyak 3,25 persen dan sisanya pada wanita kawin yang ingin membatasi (*limiting*) anak sebesar 3,74 persen.

Berdasarkan data di atas, realisasi kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) sudah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan capaian baik sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, realisasi *Unmet Need* mengalami sedikit kenaikan (melemah) meskipun sudah memenuhi target kinerja. Menurunnya *Unmet Need* KB diharapkan akan meningkatkan prevalensi kontrasepsi, meningkatkan peserta KB Aktif, menurunkan kehamilan yang tidak diinginkan yang berdampak pada menurunnya angka kelahiran total. Capaian *Unmeet Need* merupakan kontribusi capaian kecamatan yang digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.50. Realisasi Kinerja *Unmeet Need* Per Kecamatan Tahun 2022

No	Kecamatan	Ingin Anak Tunda (IAT)	Tidak Ingin Anak Lagi (TIAL)	Jumlah PUS	<i>Unmet Need</i>
1	2	3	4	5	6=(3+4)/5
1.	Susukan	324	394	10.623	6,76
2.	Purwareja Klampok	424	420	7.195	11,73
3.	Mandiraja	572	586	13.398	8,64
4.	Purwanegara	590	593	13.899	8,51
5.	Bawang	487	371	11.674	7,35
6.	Banjarnegara	354	316	10.472	6,40
7.	Sigaluh	202	178	5.439	6,99
8.	Madukara	219	365	7.734	7,55
9.	Banjarmangu	207	379	8.827	6,64
10.	Wanadadi	202	210	5.840	7,05
11.	Rakit	284	273	9.788	5,69
12.	Punggelan	387	351	16.240	4,54
13.	Karangkobar	156	220	6.060	6,20
14.	Pagentan	360	362	9.554	7,56
15.	Pejawaran	201	104	7.953	3,84
16.	Batur	192	261	7.385	6,13
17.	Wanayasa	343	356	9.685	7,22
18.	Kalibening	103	556	8.609	7,65
19.	Pandanarum	101	241	4.719	7,25
20.	Pagedongan	218	302	7.508	6,93
		13.042	6.838	182.602	6,99

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.51.

Tabel 3.51. Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	7,188%	6,84%	6,91%	6,98%	6,99%

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Gambar 3.18. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Tahun 2018-2022

Berdasarkan Tabel 3.49, menunjukkan realisasi cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) memiliki kecenderungan meningkat mulai tahun 2019. setelah sebelumnya turun cukup signifikan di 2019 dibanding 2018. Memperhatikan trend yang terus meningkat selama empat tahun terakhir, maka perlu dipersiapkan langkah antisipasi di tahun berikutnya agar tidak semakin meningkat lagi. Semakin tinggi unmet need, maka potensi kehamilan yang tidak diinginkan semakin besar yang berdampak pada meningkatnya angka kelahiran total. Hal-hal yang mempengaruhi PUS ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi tidak ber-KB diantaranya : (1) suami untuk sementara waktu tidak berada ditempat (bekerja di luar kota/pulau), (2) persepsi PUS bahwa sudah tidak subur lagi sehingga tidak perlu ber-KB. Realisasi kinerja cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 3.52.

Tabel 3.52. Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2022	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	6,99%	6,99%	100%

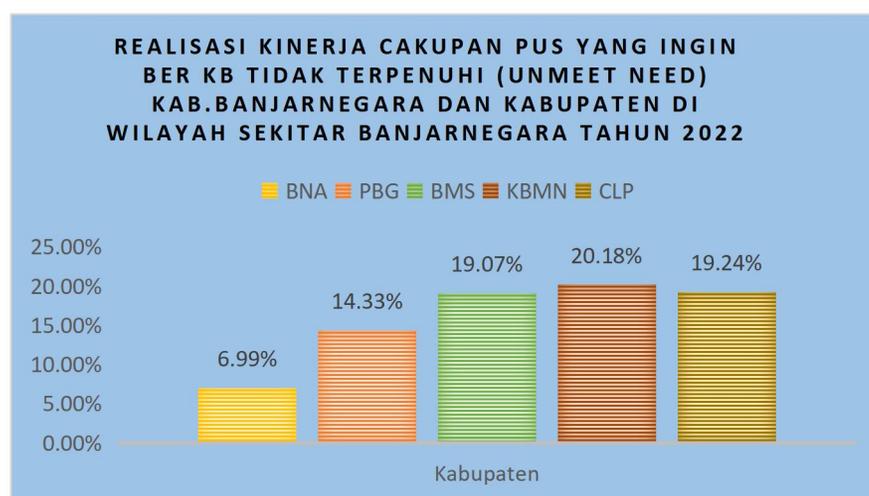
Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3.50, menunjukkan bahwa capaian kinerja cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) berhasil mencapai target akhir Renstra dengan capaian baik. Rendahnya angka *Unmeet Need* berarti kesadaran berKB semakin tinggi dan semakin baik bagi pengendalian angka kelahiran total. Realisasi cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Kabupaten Banjarnegara dibandingkan dengan Kabupaten lain di wilayah sekitar disajikan pada Tabel 3.53.

Tabel 3.53. Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Kabupaten Banjarnegara dibandingkan Kabupaten di Wilayah Sekitar Banjarnegara

No	Indikator Kinerja	Banjarnegara	Purbalingga	Banyumas	Kebumen	Cilacap
1	2	3	4	5	6	6
1	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	6,99	14,33	19,07	20,18	19,24

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022



Gambar 3.19. Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Kabupaten Banjarnegara dibandingkan Kabupaten di Wilayah Sekitar

Berdasarkan data di atas, capaian *unmetneed* Kabupaten Banjarnegara paling baik dibanding kabupaten sekitarnya. Capaian *unmetneed* berbanding terbalik dengan KB aktif, artinya semakin kecil *unmetneed* maka semakin besar persentase KB Aktif. Demikian halnya capaian *Umet Need*, capaian persentase KB Aktif Kabupaten Banjarnegara juga lebih baik dari kabupaten sekitarnya. Realisasi kinerja cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) dibandingkan dengan Target Provinsi disajikan pada Tabel 3.54.

Tabel 3.54. Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Dibandingkan dengan Target Provinsi

No	Indikator Kinerja	Target Prov. Jateng	Realisasi 2022	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	5,86%	6,99%	83,83%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja Dispermades PPKB masih dibawah mencapai target Provinsi Jawa Tengah dengan capaian 83,83%. Realisasi kinerja cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) dibandingkan dengan Target Nasional disajikan pada dibawah ini.

Tabel 3.55. Realisasi Kinerja Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) Dibandingkan dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi 2022	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (<i>Unmeet Need</i>)	8,00%	6,99%	114,45%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 3.53, menunjukkan bahwa realisasi kinerja cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) sudah memenuhi target nasional dengan capaian sangat baik sebesar 114,45 persen. Hal tersebut menggambarkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sudah baik karena mampu melebihi target nasional.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Promosi, KIE dan penggerakan Pelayanan KB oleh Petugas KB dan tenaga lini lapangan dengan prioritas pada wilayah *Unmet need* tinggi dan KB aktif rendah;
2. Besama dengan BKKBN Provinsi Jawa Tengah melaksanakan fasilitasi penyediaan alat dan obat kontrasepsi pada setiap faskes, sehingga kebutuhan selalu terpenuhi dan tidak terjadi *stock out*;
3. Pembinaan pelayanan KB bersama dengan Fasilitas Kesehatan dengan membentuk kelas *Unmet need* sehingga lebih efektif dan tepat sasaran;
4. Pembinaan dan pelaksanaan KIE KB pasca persalinan dan pasca keguguran melalui pembentukan kelas ibu hamil;
5. Perluasan jangkauan layanan KB terutama untuk daerah terpencil dan tertinggal sehingga menjangkau seluruh sasaran.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Pengadaan sarana dan prasarana Promosi dan KIE Pelayanan KB sehingga informasi lebih cepat sampai kepada kelompok sasaran;
2. Penguatan koordinasi serta penyusunan rencana kebutuhan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan;
3. Melaksanakan pendataan, pemetaan dan penetapan kelompok sasaran secara berkala dan *up to date* serta menyeluruh terhadap kelompok yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi;
4. Meningkatkan pendampingan dan pembinaan dan konseling terhadap kelompok yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi, serta kelompok pasca persalinan dan keguguran;
5. Penguatan dan perluasan kerjasama dengan fasilitas kesehatan dan mitra kerja lainnya dalam menjangkau sasaran *Unmet need*;

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.56. Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Cakupan PUS yang Ingin Ber-KB Tidak Terpenuhi (*Unmeet Need*)

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program Keluarga Berencana	21.900.000	3	6,99%	21.900.000	3	6,99%	100%	100%	100%
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di	19.900.000			19.900.000					

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya									
	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	2.000.000			2.000.000					

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Penghitungan analisis atas efisiensi sumberdaya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (1 - \frac{RAK_{ke\ i} / RVK_{ke\ i}}{PAK_{ke\ i} / TVK_{ke\ i}}) \times 100\%}{n}$$

Sumber : PMK Nomor 249 tahun 2011

Keterangan :

- E : Efisiensi
- RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran
- PAK : Pagu Anggaran per Keluaran
- RVK : Realisasi volume Keluaran
- TVK : Target volume Keluaran
- N : Jumlah jenis keluaran

$$E = \frac{(1 - \frac{21.900.000/6,99}{21.900.000/6,99}) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - \frac{3.133.047,21}{3.133.047,21}) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - 1) \times 100\%}{1}$$

$$E = 0$$

Berdasarkan perhitungan di atas, pada aspek pemanfaatan sumber data sebanyak tidak terdapat efisiensi. Hal tersebut berarti sumberdaya yang tersedia dimanfaatkan sebagaimana perencanaan.

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 3 orang yang terdiri dari Golongan IV (S2 : 1 orang), Golongan III (S1 : 1 orang) dan THL (1 orang). Selain aparat kabupaten dan penyuluh KB pelaksanaan Program KB juga dibantu oleh 278 orang Pembantu KB Desa (PPKBD), 1.343 orang Sub PPKBD (Tingkat RW) dan 513 Kelompok KB (Tingkat RT) dan keseluruhan pelaksana tersebut merupakan

potensi sumberdaya dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Sasaran kinerja cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*) dicapai melalui Program Pembinaan Keluarga Berencana melalui Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota. Output Kegiatan yang mendukung capaian indikator tersebut pada tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Program Pembinaan Keluarga Berencana - Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota, dengan output sebagai berikut :
 - a. Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya dengan output :
 - 1) Jumlah KKB yang dilaksanakan visitasi dan pembinaan sebanyak 47 Faskes (Juli 2022);
 - 2) Rapat Koordinasi Pembinaan oleh Petugas KB Kabupaten kepada 47 Petugas Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan KB pada tanggal 16 Juni 2022 di Aula Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara. Jumlah KKB yang mendapat registrasi visitasi dan pembinaan sebanyak 47 KKB.
 - b. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran, dengan output Jumlah tenaga kesehatan yang mendapatkan sosialisasi teknik KIE KBPP sebanyak 47 orang Pengelola Pelayanan KB Puskesmas se-Kabupaten Banjarnegara pada tanggal 09 Maret 2022 di Aula Dispermades PPKB.

e. Menurunnya PUS Usia 15-19 tahun (<20 tahun)

Indikator ini untuk mengetahui persentase PUS usia 15-19 tahun di Kabupaten Banjarnegara. Realisasi kinerja menurunnya PUS Usia 15-19 tahun (<20 tahun) pada tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.57.

Tabel 3.57. Realisasi Kinerja Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun)	2,87%	1,45%	197,93%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Indikator menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) dicapai berdasarkan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur } < 20 \text{ Th}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$$

$$= \frac{2.655}{182.602} \times 100\%$$

$$= 1,45\%$$

Berdasarkan data di atas, capaian menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) telah memenuhi target yang telah ditetapkan, dengan capaian kategori sangat baik sebesar 193,93 persen. Usia PUS kurang dari 20 tahun merupakan representasi fertilitas pada kelompok usia remaja. Menurunnya PUS kurang dari 20 tahun digunakan sebagai salah satu indikator utama dalam pengendalian angka kelahiran total serta kesehatan reproduksi. Semakin muda, maka akan semakin panjang pula masa reproduksinya, sehingga memungkinkan untuk mempunyai anak lebih banyak bila tidak dikendalikan dengan program KB.

Selain untuk mencegah kelahiran banyak anak karena fertilitas yang panjang, PUS kurang dari 20 tahun juga beresiko melahirkan stunting karena belum siap secara psikologis, kematangan mental dan biologis. Usia wanita yang baik untuk melahirkan yaitu 21 tahun sampai dengan 35 tahun. Usia menikah ideal untuk perempuan yaitu usia 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria.

Capaian kinerja di atas, tidak terlepas dari pembinaan dan pendampingan terkait Kesehatan Reproduksi Remaja kepada remaja, dan keluarga yang memiliki remaja, baik secara formal dan non formal, juga didukung oleh kegiatan percepatan penurunan stunting yang bersumber dari DAK Sub Bidang KB. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, OPD KB menjadi ketua pelaksana. Implementasi kegiatan berupa pendampingan kepada calon pengantin, ibu hamil dan pasca melahirkan melalui 784 Tim Pendamping Keluarga (2.352 orang). Realisasi Kinerja Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel 3.58.

Tabel 3.58. Realisasi Kinerja Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun)	3,31%	2,79%	1,724%	1,59%	1,45%

Sumber :Data Dispermades PPKB Diolah, 2022



Gambar 20. Realisasi Kinerja Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) Tahun 2018-2022

Berdasarkan data di atas, realisasi kinerja menurunnya PUS usia 15-19 tahun (< 20 tahun) memiliki kecenderungan menurun selama kurun waktu tahun 2018 sampai 2022. Artinya, program dan kegiatan yang dilaksanakan telah berhasil dengan baik dan tepat sasaran. Berdasarkan hasil pendataan, jumlah PUS kurang dari 20 tahun pada tahun 2021 sebesar 3.026 orang, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 2.655 orang sehingga terdapat penurunan sebesar 371 orang. Pada tahun 2022 jumlah dispensasi pengantin remaja yang kurang dari 19 tahun sebanyak 654 orang sedangkan jumlah kelahiran remaja sebanyak 776 orang. Realisasi kinerja Menurunnya PUS usia (< 20 tahun) dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 3.59.

Tabel 3.59. Realisasi Kinerja Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) Membandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2022	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun)	2,87%	1,45%	197,93%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan data di atas, realisasi menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) sudah memenuhi target renstra tahunan yang sekaligus merupakan akhir tahun renstra. Namun demikian Dispermades PPKB tetap terus melaksanakan evaluasi dan upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja untuk menunjang keberhasilan program pembangunan pemerintah khususnya Program Keluarga Berencana.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Promosi dan KIE pendewasaan usia perkawinan dan kesehatan reproduksi melalui pembinaan PIK Remaja, pembinaan rutin Saka Kencana maupun pemilihan Duta Generasi Berencana sebagai duta dalam pencegahan pernikahan dini di kalangan remaja serta mendukung percepatan penurunan stunting;

2. Pendampingan dan pembinaan keluarga yang memiliki remaja melalui kelompok kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR), sehingga baik remaja maupun keluarga yang memiliki remaja memiliki pemahaman yang sama terkait perencanaan keluarga berkualitas;
3. Pendampingan oleh 784 Tim Pendamping Keluarga kepada calon peengantin termasuk pengantin remaja terkait kesehatan reproduksi, pengenalan alat dan obat kontrasepsi, perencanaan keluarga serta perencanaan kehamilan. Selain itu dilaksanakan pendampingan juga kepada ibu hami dan pasca melahirkan. Tahun 2022 telah dilaksanakan pendampingan kepada calon pengantin sebanyak sebanyak 3.426 orang (6.851 pendampingan), pendampingan ibu hamil sebanyak 31.577 orang (63.154 pendampingan) dan pendampingan pasca salin sebanyak 7.953 orang (15.906 pendampingan).

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Mefasilitasi sarana dan prasarana promosi dan KIE melalui media cetak, elektronik maupun luar ruangan terkait perencanaan keluarga di kalangan remaja;
2. Pembentukan dan pematapan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja sebagai wadah pendidikan keluarga berencana bagi remaja;
3. Penguatan kerjasama dan sinergitas antar instansi/lembaga dalam pendidikan remaja.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.60. Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Menurunnya PUS Usia 15-19 tahun (<20 tahun)

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.513.580.000	4	2,87%	3.661.020.000	4	1,45%	81,11%	100%	197,93 %
	Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.509.580.000			3.657.020.000			85%		
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.000.000			2.000.000			100%		

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2.000.000			2.000.000			100%		

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2021

Penghitungan analisis atas efisiensi sumberdaya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke\ i} / RVK_{ke\ i}}{PAK_{ke\ i} / TVK_{ke\ i}}\right) \times 100\%}{n}$$

Sumber : PMK Nomor 249 tahun 2011

Keterangan :

- E : Efisiensi
- RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran
- PAK : Pagu Anggaran per Keluaran
- RVK : Realisasi volume Keluaran
- TVK : Target volume Keluaran
- N : Jumlah jenis keluaran

$$E = \frac{\left(1 - \frac{3.661.020.000/2,87}{4.513.580.000/1,75}\right) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{\left(1 - \frac{1275616724,74}{2579188571,43}\right) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - 0,4946) \times 100\%}{1}$$

$$E = 50,54\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terdapat efisiensi pemanfaatan sumber data sebanyak 50,54 persen. Hal tersebut berarti dengan sumberdaya yang ada dibandingkan dengan capaian keluaran yang dicapai diperoleh efisiensi sebesar 50,54 persen.

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 4 orang yang terdiri dari Golongan IV (S2 : 2 orang), Golongan II (SLTA : 1 orang) dan THL (1 orang). Selain itu dalam pelaksanaan penggerakan dan pelayanan KB di lapangan, Dispermades PPKB didukung oleh petugas Penyuluh KB sebanyak 31 orang yang tersebar di 20 kecamatan se-Kab. Banjarnegara.

Selain aparat kabupaten dan penyuluh KB pelaksanaan Program KB juga dibantu oleh 278 orang Pembantu KB Desa (PPKBD, 1.360 orang Sub PPKBD (Tingkat RW) dan 5.084 orang Kelompok KB (Tingkat RT) dan keseluruhan pelaksana tersebut merupakan potensi sumberdaya dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (<20 tahun) dicapai didukung oleh Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) melalui Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Output Kegiatan yang mendukung capaian indikator tersebut pada tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan output :
 - a. Jumlah anggota TPK yang difasilitasi pengisian paket data/pulsa sebanyak 2.352 orang sebanyak 12 kali pengisian pulsa;
 - b. Jumlah calon pengantin yang di dampingi sebanyak 3.426 orang (6.851 pendampingan);
 - c. Jumlah ibu hamil yang didampingi sebanyak 31.577 orang (63.154 pendampingan);
 - d. Jumlah ibu pasca persalinan yang didampingi sebanyak 7.953 orang (15.906 pendampingan).
2. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan output Jumlah anggota PIK Remaja yang difasilitasi sebanyak 60 orang pd tgl. 26 Maret 2022 di Aula Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara.
3. Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga), dengan output :
 - a. Jumlah anggota sakaencana yang dibina sebanyak 3 kegiatan pd tgl. 11 Juni 2022 (25 orang), 2 Juli 2022 (20 orang) dan 27 Agustus 2022 (15 orang);
 - b. Jumlah konselor sebaya yang difasilitasi 60 orang.

Sasaran 8 : Meningkatkan cakupan kesertaan Tribina dan UPPKS

Sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintahan desa, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu sebagai berikut :

a. Persentase Kesertaan Anggota Tribina

Indikator Persentase kesertaan anggota tribina dipilih untuk mengetahui persentase kepesertaan anggota tribina di Kabupaten Banjarnegara. Tribina merupakan kelompok kegiatan sebagai wadah pembinaan keluarga berencana yang terdiri dari BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja), BKL (Bina Keluarga Lansia). Melalui pembinaan tribina diharapkan pembangunan keluarga terencana dengan baik dan berkesinambungan mulai dari sasaran balita, remaja sampai dengan lanjut usia sehingga terwujud ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Realisasi Kinerja Persentase Kesertaan Anggota Tribina Tahun 2022 disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.61. Realisasi Kinerja Persentase Kesertaan Anggota Tribina Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase kesertaan anggota tribina	44,12%	44,17%	100,11%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Indikator Persentase kesertaan anggota tribina dicapai berdasarkan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah anggota keluarha bina keluarga balita, remaja dan lansia}}{\text{Jumlah sasaran anggota tribina}} \times 100\%$$

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 061/1071 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Banjarnegara

$$= \frac{20.224 + 13.700 + 12.607}{34.618 + 40.482 + 30.251} \times 100\%$$

$$= \frac{46.531}{105.301} \times 100\%$$

$$= 44,17\%$$

Berdasarkan data di atas, realisasi persentase kesertaan anggota tribina tahun 2022 sebesar 44,17 persen dan sudah memenuhi target yang ditetapkan. Semakin besar keluarga yang menjadi anggota tribina maka pengendalian pembangunan keluarga berdasarkan segmentasi/kelompok kegiatan akan dapat lebih optimal.

Sasaran Bina Keluarga Balita merupakan orang tua yang memiliki balita usia berusia 0 - 5 tahun. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan wawasan orang tua untuk mempersiapkan pendidikan anak usia 0-5 tahun dalam rangka menumbuhkembangkan kecerdasan anak. Bina Keluarga Remaja merupakan kelompok kegiatan dengan sasaran orang tua yang memiliki remaja usia 6 - 21 tahun dan belum menikah. Dalam pembinaan BKR, para orang tua akan mendapatkan informasi dalam

meningkatkan bimbingan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja secara baik dan terarah. Sedangkan bina keluarga lansia sasarannya keluarga yang memiliki lansia, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan keluarga yang memiliki lansia (> 60 tahun) untuk meningkatkan kualitas hidup lansia dan mewujudkan lansia tangguh. Realisasi Persentase kesertaan anggota tribina dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada dibawah ini.

Tabel 3.62. Realisasi Kinerja Persentase Kesertaan Anggota Tribina Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase kesertaan anggota tribina	33,69%	35,65%	38,83%	41,55%	44,17%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kesertaan tribina memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun sehingga tingkat ketahanan keluarga diharapkan akan semakin meningkat. Realisasi Persentase kesertaan anggota tribina tahun 2018 sampai dengan 2022 digambarkan dalam gambar sebagai berikut.



Gambar 21. Realisasi Kinerja Persentase kesertaan anggota tribina Tahun 2018-2022

Realisasi kinerja Persentase kesertaan anggota tribina dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada Tabel 3.63.

Tabel 3.63. Realisasi Kinerja Persentase kesertaan anggota tribina Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2022	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Persentase kesertaan anggota tribina	44,12%	44,17%	100,11%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Promosi dan KIE tentang terkait pembangunan keluarga melalui tribina;
2. Tersedianya tenaga lini lapangan yang sangat membantu dalam program keluarga berencana yaitu 278 orang Pembantu KB Desa (PPKBD, 1.360 orang Sub PPKBD (Tingkat RW) dan 5.084 orang Kelompok KB (Tingkat RT);
3. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan dan pembangunan keluarga;

Tantangan dalam pencapaian indikator :

1. Jangkauan sasaran secara geografis terlalu luas karena Kelompok Tribina yang terbentuk berada di salah satu RW/dusun sehingga tidak semua sasaran mengikuti karena jauh dari tempat tinggal;
2. Kesibukan ibu/sasaran sehingga tidak bisa mengikuti kegiatan tribina;

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Meningkatkan promosi dan KIE terhadap keluarga yang memiliki Balita, Remaja dan Lansia tentang pentingnya menjadi anggota kelompok BKB, BKR dan BKL;
2. Pelaksanaan kegiatan memperhatikan kesibukan ibu-ibu anggota tribina sehingga bisa mengikuti kegiatan dengan baik;
3. Pembinaan kelompok tribina dioptimalkan melalui media sosial sehingga lebih bisa menjangkau sasaran lebih banyak tanpa harus melewati pertemuan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator Persentase kesertaan anggota tribina digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.64. Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Persentase Kesertaan Anggota Tribina

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	332.000.000	4	44,12 %	317.956.800	4	44,17%	95,77	100%	100,11 %
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	330.000.000			315.956.800					
	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	2.000.000			2.000.000					

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)									

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Penghitungan analisis atas efisiensi sumberdaya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (1 - \frac{RAK_{ke i} / RVK_{ke i}}{PAK_{ke i} / TVK_{ke i}}) \times 100\%}{n}$$

Sumber : PMK Nomor 249 tahun 2011

Keterangan :

- E : Efisiensi
 RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran
 PAK : Pagu Anggaran per Keluaran
 RVK : Realisasi volume Keluaran
 TVK : Target volume Keluaran
 N : Jumlah jenis keluaran

$$E = \frac{(1 - \frac{317.956.800/44,17}{332.000.000/44,12}) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - \frac{7198478,61}{7524932,00}) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - 0,9566 \times 100\%)}{1}$$

$$E = 4,34\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terdapat efisiensi pemanfaatan sumber data sebanyak 4,34 persen. Hal tersebut berarti dengan sumberdaya yang ada dibandingkan dengan capaian keluaran yang dicapai diperoleh efisiensi sebesar 4,34 persen.

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 4 orang yang terdiri dari Golongan IV (S2 : 2 orang), Golongan II (SLTA : 1 orang) dan THL (1 orang). Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 4 orang yang terdiri dari Golongan IV (S2 : 2 orang), Golongan II (SLTA : 1 orang) dan THL (1 orang). Selain itu dalam pelaksanaan pergerakan dan pelayanan KB di lapangan, Dispermades PPKB didukung oleh petugas Penyuluh KB sebanyak 31 orang yang tersebar di 20 kecamatan se-Kab. Banjarnegara.

Selain aparat kabupaten dan penyuluh KB pelaksanaan Program KB juga dibantu oleh 278 orang Pembantu KB Desa (PPKBD), 1.343 orang Sub PPKBD (Tingkat RW) dan 513 Kelompok KB (Tingkat RT) dan keseluruhan pelaksana tersebut merupakan potensi sumberdaya dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung Persentase kesertaan anggota tribina dicapai didukung oleh Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) melalui Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga -

a. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan output sebagai berikut :

- 1) Jumlah BKB KIT yang diadakan sebanyak 10 Paket ,dengan No Kontrak : 027/233/DISPERMADESPPKB/IV/2022, oleh PT. Mahkota Amelia Mandiri dengan alamat Jl. raya Kalisari Lapan No.137 RT 013 RW 002 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo, DKI Jakarta Timur (Drs. H. Yusri H Nasution);
- 2) Jumlah KIT Siap Nikah Anti Sunting yang diadakan sebanyak 10 Paket, dengan No Kontrak : 027/233/DISPERMADESPPKB/IV/2022 PT. Mahkota Amelia Mandiri. Jl. raya Kalisari Lapan No.137 RT 013 RW 002 Kel. Kalisari Kec. Pasar Rebo, DKI Jakarta Timur (Drs. H. Yusri H Nasution).

b. Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan output :

- a. Jumlah anggota kelompok BKR yang dilatih sebanyak 12 orang (pada tanggal 27 Juni 2022 di Kecamatan Mandiraja).;
- b. Jumlah anggota kelompok BKL yang dilatih sebanyak 12 orang (pada tanggal. 27 Juni 2022 di Kecamatan Mandiraja).;
- c. Jumlah anggota kelompok BKL yang dilatih sebanyak 12 orang (pada tanggal tgl. 27 Juni 2022 di Kecamatan Mandiraja).

b. Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera

Indikator Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera dipilih untuk mengetahui persentase kepesertaan anggota UPPKS di Kabupaten Banjarnegara. Pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan upaya memperkuat fungsi ekonomi keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendukung pengentasan kemiskinan. Realisasi Kinerja Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera Tahun 2022 disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.65. Realisasi Kinerja Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera	25,36%	25,47%	100,43%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Indikator Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera dicapai berdasarkan formulasi perhitungan sebagai berikut :

$$= \frac{\text{Jumlah anggota UPPKS}}{\text{Jumlah sasaran UPPKS}} \times 100\%$$

Sumber : Keputusan Bupati Nomor 061/1071 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah kabupaten Banjarnegara

$$= \frac{9.390}{36.870} \times 100\%$$

$$= 25,47 \%$$

Berdasarkan data di atas, realisasi PUS yang menjadi anggota UPPKS Tahun 2021 sebesar 22,83 persen telah memenuhi target dengan capaian sangat baik sebesar 100,43 persen. Sesuai dengan Peraturan Kepala BKKBN Nomo 17 Tahun 2020, nomenklatur Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) diubah menjadi Usaha Peningkatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas yang mandiri secara ekonomi, maka perlu menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro keluarga khususnya keluarga akseptor melalui UPPKA. Untuk selanjutnya perlu dikembangkan dalam kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga agar lebih bermanfaat bagi masyarakat luas dalam mendukung program pembangunan keluarga. Realisasi cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.66. Realisasi Kinerja Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera	13,85%	15,53%	18,72%	22,83%	25,47%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, tingkat kesertaan anggota UPPKS semakin meningkat dari tahun sebelumnya, sehingga diharapkan semakin banyak keluarga yang mandiri secara ekonomi. Realisasi Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera tahun 2018 sampai dengan 2022 dijelaskan dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 22. Realisasi Kinerja Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS Tahun 2018-2022

Berdasarkan tabel di atas, cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan semakin banyak keluarga yang mempunyai potensi kemandirian keluarga secara ekonomi. Realisasi kinerja cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.67. Realisasi Kinerja Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2022	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera	25,36%	25,47%	100,43%

Sumber :Data Dispermades PPKB Diolah, 2021

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Terlaksananya sosialisasi dan orientasi pemberdayaan ekonomi keluarga melalui wadah kelompok UPPKS;
2. Kerjasama lintas sektor serta mitra kerja lainnya dalam pembinaan dan pemberdayaan ekonomi keluarga;
3. Komitmen pemerintah agar pembangunan dan pemberdayaan ekonomi keluarga termasuk dalam prioritas pembangunan daerah sehingga mendapat dukungan dari APBD.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Memfasilitasi promosi dan KIE pada kelompok sasaran UPPKS;
2. Penguatan kerjasama dengan dinas/instansi lain serta mitra kerja lainnya dalam rangka mendukung modal dan jaringan usaha anggota UPPKS;
3. Perluasan cakupan pembinaan tribina terutama daerah terpencil dengan dibantu tenaga lini lapangan.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator Persentase kesertaan anggota tribina digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.68. Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Cakupan Sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS Keluarga Sejahtera

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.000.000	4	25,36 %	2.000.000	4	25,47%	100%	100%	100,43 %
	Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.000.000			2.000.000					

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Penghitungan analisis atas efisiensi sumberdaya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n (1 - \frac{RAK_{ke i} / RVK_{ke i}}{PAK_{ke i} / TVK_{ke i}}) \times 100\%}{n}$$

Sumber : PMK Nomor 249 tahun 2011

Keterangan :

- E : Efisiensi
- RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran
- PAK : Pagu Anggaran per Keluaran
- RVK : Realisasi volume Keluaran
- TVK : Target volume Keluaran
- N : Jumlah jenis keluaran

$$E = \frac{(1 - \frac{2.000.000/25,47}{2.000.000/25,36}) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - \frac{78523,75}{78864,35}) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - 0,9957) \times 100\%}{1}$$

$$E = 0,43\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terdapat efisiensi pemanfaatan sumber data sebanyak 0,43 persen. Hal tersebut berarti dengan sumberdaya yang ada dibandingkan dengan capaian keluaran yang dicapai diperoleh efisiensi sebesar 0,43 persen.

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 4 orang yang terdiri dari Golongan IV (S2 : 2 orang), Golongan II (SLTA : 1 orang) dan THL (1 orang). Keseluruhan pelaksana tersebut merupakan sumberdaya manusia yang sangat potensial dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja. Selain itu dalam pelaksanaan penggerakan dan pelayanan KB di lapangan, Dispermades PPKB didukung oleh petugas Penyuluh KB sebanyak 33 orang yang tersebar di 20 kecamatan se-Kab. Banjarnegara.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung Persentase kesertaan anggota tribina dicapai didukung oleh Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) melalui Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS), dengan output :

- a. Jumlah kader kelompok UPPKS yang difasilitasi sosialisasi sebanyak 20 orang (7 orang x 3 kecamatan) pada tanggal 25 Mei 2022 di Aula Dispermades PPKB);

- b. Jumlah kelompok UPPKS yang difasilitasi pembentukan UPPKS sebanyak 1 kelompok dalam rangka pengentasan kemiskinan di Desa Pingit Kecamatan Rakit pada tanggal 12 Agustus 2022.

Sasaran 8 : Meningkatnya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu nilai survey kepuasan masyarakat. Indikator ini dipilih untuk mengetahui persentase peningkatan nilai hasil survey kepuasan masyarakat.

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, survei dapat dilakukan secara tetap dengan jangka waktu (periode) tertentu. Survei dapat dilakukan setiap 3 bulanan (triwulan), 6 bulanan (Semester) atau 1 (satu) tahun. Penyelenggara pelayanan publik setidaknya minimal melakukan survei 1 (satu) tahun sekali. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3.69. Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	2	3	4	5
1.	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	TIDAK BAIK
2.	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	KURANG BAIK
3.	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	BAIK
4.	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	SANGAT BAIK

Sumber : Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, secara umum kualitas pelayanan pada Dispermades PPKB dipersepsikan **BAIK** oleh masyarakat pengguna. Adapun realisasi indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dispermades PPKB Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 3.70. Realisasi Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai survey kepuasan masyarakat	79	82,865	104,89%

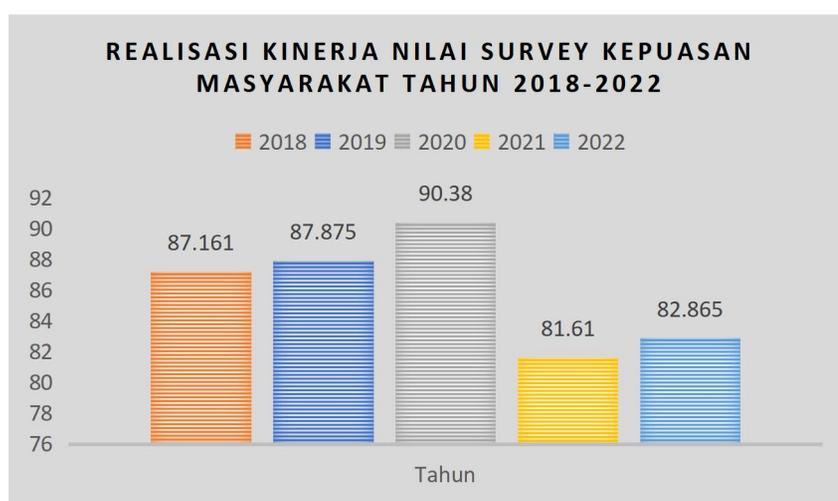
Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, realisasi nilai survey kepuasan masyarakat telah tercapai sangat baik dengan capaian 104,89 persen. Pelayanan yang diberikan Dinas Pembedayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipersepsikan baik oleh masyarakat penggunanya. Hal ini terlihat dari indeks kepuasan masyarakat (IKM) berkisar diantara 76,61 - 88,30 nilai IKM yang diperoleh dari 9 (sembilan) unsur pelayanan sebesar 82,865. namun demikian, Dispermades PPKB perlu untuk terus melakukan evaluasi guna peningkatan layanan publik di tahun berikutnya. Realisasi nilai survey kepuasan masyarakat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.71. Realisasi Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2018-2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai survey kepuasan masyarakat	87,161	87,875	90,38	81,61	82,865

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022



Gambar 3.23. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Dispermades PPKB

Berdasarkan data di atas, realisasi nilai survey kepuasan masyarakat turun cukup signifikan pada tahun 2021 dan mulai meningkat kembali pada tahun 2022 walaupun tidak sebaik pada tiga tahun pertama. Artinya walaupun nilai tahun ini meningkat tapi masih tidak

lebih baik dari tiga tahun pertama yang pernah dicapai. Penurunan yang signifikan pada tahun 2021 perlu untuk dievaluasi lebih mendalam agar bisa diambil kebijakan yang tepat guna peningkatan pelayanan publik selanjutnya. Realisasi kinerja persentase nilai survey indeks kepuasan masyarakat dibandingkan dengan target jangka menengah disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.72. Realisasi Kinerja Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2022	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Nilai survey kepuasan masyarakat	79	82,865	104,89%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan pada tabel diatas, realisasi nilai survey kepuasan masyarakat dibandingkan dengan target akhir Renstra maka sudah memenuhi target dengan kategori capaian sangat baik sebesar 104,89 persen. Namun demikian masih perlu untuk ditingkatkan karena masih terdapat banyak potensi untuk meningkatkan layanan agar lebih baik lagi.

Responden survey pelayanan Dispermades adalah penerima layanan Dispermades PPKB yang pada saat pencacahan berada di lokasi unit pelayanan atau yang pernah menerima pelayanan Dispermades PPKB. Survei dilaksanakan terhadap 101 responden. Berdasarkan perhitungan, nilai survey indeks kepuasan masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2022 diperoleh nilai 82,865 dengan pencapaian masing-masing unsur pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3.73. Nilai Masing-masing Unsur Pelayanan Indeks Kepuasan Masyarakat

No	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-rata
1	2	3
1	Persyaratan	3,307
2	Prosedur	3,307
3	Waktu Pelayanan	3,238
4	Biaya / Tarif	3,386
5	Produk Layanan	3,020
6	Kompetensi Pelaksanaan	3,307
7	Perilaku Pelaksanaan	3,267
8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,842
9	Sarana dan Prasarana	3,188

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dilihat bahwa unsur yang memiliki nilai tertinggi adalah unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (3,842), artinya Dispermades PPKB telah melaksanakan tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut dengan sangat baik. Sedangkan unsur dengan nilai rata-rata rendah yaitu unsur Produk Layanan (3,020). Keseluruh unsur tercapai penilaian yang baik, namun demikian perlu untuk melaksanakan evaluasi secara berkala guna perbaikan dan peningkatan layanan.

Secara umum, mutu pelayanan adalah **B** dengan kinerja pelayanan dikategorikan **Baik**. Capaian nilai indek kepuasan masyarakat di atas target nilai 79.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Meningkatnya komitmen serta kualitas pelayanan aparatur penyelenggara Dispermades PPKB;
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik penyelenggaraan urusan Dispermades PPKB sesuai dengan standar pelayanan.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Evaluasi, pembinaan dan penguatan komitmen terkait pelayanan publik terhadap jajaran apatur penyelenggara Dispermades PPKB;
2. Penyediaan, pemeliharaan dan peningkatan terhadap sarana prasarana pelayanan publik.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.74. Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Nilai Survey Kepuasan Masyarakat

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.192.608.135	14	79	6.122.332.730	14	82,865	98,55%	100%	104,89 %
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.516.462.250			4.480.171.732					
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.415.322.250			4.379.031.732					
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	101.140.000			101.140.000					
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	499.129.800			492.367.304					
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.600.000			51.821.174					
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000			24.859.100					
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	416.529.800			415.687.030					
3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	57.431.000			57.250.000					

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Capaian		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana	SDM	Indikator
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.431.000			57.250.000					
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	904.823.485			881.121.194					
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	904.823.485			881.121.194					
5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.761.600			211.422.500					
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.940.000			79.553.000					
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.001.600			117.048.600					
	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.820.000			14.820.000					

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Penghitungan analisis atas efisiensi sumberdaya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut :

$$E = \sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke i} / RVK_{ke i}}{PAK_{ke i} / TVK_{ke i}} \right) \times 100\% / n$$

Sumber : PMK Nomor 249 tahun 2011

Keterangan :

- E : Efisiensi
- RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran
- PAK : Pagu Anggaran per Keluaran
- RVK : Realisasi volume Keluaran
- TVK : Target volume Keluaran
- N : Jumlah jenis keluaran

Berdasarkan rumus di atas, efisiensi untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai berikut :

$$E = \frac{(1 - \frac{6.122.332.730/82,865}{6.192.608.135/79}) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - \frac{73.883.216,44}{78.387.444,75}) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - 0,9425) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{0,05746 \times 100\%}{1}$$

$$E = 5,74$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terdapat efisiensi pemanfaatan sumber data sebanyak 5,74 persen. Hal tersebut berarti dengan sumberdaya yang ada dibandingkan dengan capaian keluaran yang dicapai diperoleh efisiensi sebesar 5,74 persen.

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 14 orang PNS yang terdiri dari Golongan IV (S2 : 1 orang) dan Golongan III (S1 : 3 orang, D3 : 1 orang, SLTA : 2 orang, SLTP : 2 orang) dan THL : 5 orang. Keseluruhan pelaksana tersebut merupakan sumberdaya manusia yang potensial dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Sasaran kinerja menurunnya nilai survey indeks kepuasan masyarakat dicapai melalui 1 (satu) Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Realisasi capaian program yaitu :

1. Persentase terlayannya administrasi perkantoran sebanyak 100% s.d Triwulan IV Tahun 2022;
2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur s.d Triwulan IV Tahun 2022 sebanyak 100%;

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung oleh lima kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan output Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN sebanyak 12 bulan (Januari - Desember 2022) untuk 36 ASN.
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan output Jumlah pembayaran honorarium pengelola keuangan sebanyak 12 bulan (Januari - Desember 2022) untuk 10 orang pengelola keuangan.

2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan output yaitu Jumlah pembayaran komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor) sebanyak 12 kali (Januari - Desember 2022).
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan output yaitu Jumlah Alat kebersihan dan pembersih kantor sebanyak 12 kali (Januari - Desember 2022).
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan output yaitu Jumlah bahan logistik kantor yang terpenuhi sebanyak 12 kali (Januari - Desember 2022).
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output Jumlah peralatan kantor yang dipenuhi sebanyak 2 Paket yaitu :

 - a. Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone (PABX);
 - b. Belanja Modal Unit Komputer Lainnya (Laptop) sebanyak 2 buah. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
4. Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan output yaitu Jumlah pembayaran jasa pelayanan kantor (PTT, THL, Tenaga Keamanan dan Tenaga Kebersihan) sebanyak 9 bulan (Januari - September 2022) untuk 1 orang TPP, 28 THL, 3 Tenaga Keamanan Kantor dan 20 Orang Petugas Kebersihan.
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan output yaitu Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara sebanyak 11 unit untuk 12 bulan (Januari - Desember 2022).
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan output yaitu Jumlah terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana sebanyak 12 bulan (Januari - Desember 2022).
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, dengan output yaitu Jumlah terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung sebanyak 12 bulan (Januari - Desember 2022).

Sasaran 9 : Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Untuk mencapai sasaran tersebut, diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja yaitu nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Penyusunan Dokumen SAKIP mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Secara umum, tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauhmana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientas hasil. Penyelenggaraan Sistem AKIP meliputi (1) Rencana strategis, (2) Perjanjian kinerja, (3) Pengukuran kinerja, (4) Pengelolaan data kinerja, (5) Pelaporan kinerja dan (6) Reviu dan evaluasi kinerja.

Reviu dan evaluasi kinerja terhadap dokumen AKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Banjarnegara selaku evaluator. Berdasarkan Surat dari Inspektorat Kabupaten Banjarnegara tanggal 29 Juli 2022 Nomor : 700/45.d/LHE/Insp/2021 Perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Dispermades PPKB memperoleh nilai sebesar 77,42 dengan kategori BB atau sangat baik dengan interpretasi akuntabel, berkinerja baik dan memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Realisasi target indikator kinerja pada tahun 2022 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.75. Realisasi Kinerja Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (66)	BB (77,42)	117,30%

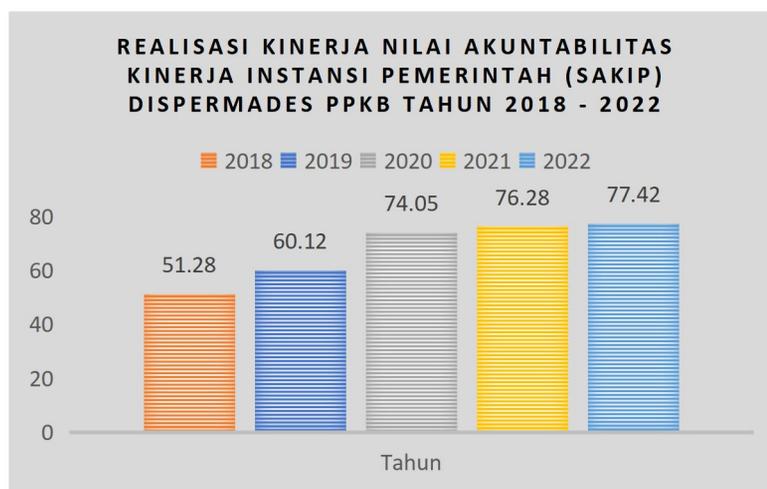
Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel di atas, realisasi Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah memenuhi target dengan capaian 113,85 persen. Hasil tersebut menandakan akuntabilitas kinerja Dispermades PPKB sangat baik dan akuntabel. Secara umum, nilai evaluasi SAKIP lebih tinggi dari tahun sebelumnya yaitu naik sebesar 1,14. berdasarkan lima komponen nilai penyusun, dua komponen mengalami kenaikan yaitu Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal, satu komponen tetap yaitu Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi sedangkan dua komponen lainnya mengalami penurunan yaitu Perencanaan Kinerja dan Pengukuran Kinerja. Realisasi Nilai Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2022 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.76. Realisasi Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2018 - 2022

No	Indikator Kinerja	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	CC (51,28)	B (60,12)	BB (74,05)	BB (76,28)	BB (77,42)

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022



Gambar 3.24. Nilai SAKIP Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara Tahun 201-2022

Berdasarkan Tabel 3.76, nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengalami peningkatan nilai dari tahun 2018 sampai dengan 2018. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi SAKIP serta capaian kinerja Dispermades PPKB semakin baik dan akuntabel. Realisasi kinerja meningkatnya nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibandingkan dengan Target Jangka Menengah disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.77. Realisasi Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dibandingkan dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Target Renstra 2022	Realisasi 2022	Capaian (4/3)*100
1	2	3	4	5
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	B (66,00)	BB (77,42)	117,30%

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Berdasarkan tabel di atas, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sudah memenuhi target akhir Renstra bahkan melampaui target Renstra dengan capaian 113,85 persen.

Sasaran Meningkatkan Kinerja Instansi Pemerintah didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD yang terdiri dari dua sub kegiatan yaitu (1).Penyusunan Dokumen

Perencanaan Perangkat Daerah dan (2).Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP di lingkungan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 memperoleh nilai 77,42 dengan kategori BB. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja yang terdiri dari :

Tabel 3.78. Nilai Sistem AKIP Dispermades PPKB Kab.Banjarnegara Tahun 2018 - 2022

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perencanaan Kinerja	30%	14,87	19,41	23,76	23,65	23,25
2	Pengukuran Kinerja	25%	14,07	15,31	16,56	17,81	17,50
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,09	9,99	12,31	12,68	13,56
4	Evaluasi Internal	10%	2,92	6,04	5,36	6,10	7,06
5	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20%	8,33	9,37	10,05	16,04	16,04
Penilaian		100%	51,28	60,12	74,05	76,28	77,42

Sumber : Data Dispermades PPKB Diolah, 2022

Nilai SAKIP Dispermades PPKB sudah memenuhi bahkan melampaui target, namun masih harus tetap meningkatkan akuntabilitas masih terdapat kekurangan pada keseluruhan dokumen yang disusun. Penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen manajemen kinerja diuraikan sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap indikator-indikator yang terdapat dalam komponen perencanaan kinerja adalah sebesar **23,25** dari bobot **30%**. Evaluasi atas perencanaan kinerja terdiri dari 2 (dua) sub komponen dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.79. Penilaian Komponen Perencanaan Kinerja pada Dokumen SAKIP 2022

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
I	Perencanaan Strategis	10%	8,40
II	Perencanaan Kinerja Tahunan	20%	14,85
Penilaian		30%	23,25

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dispermades PPKB Tahun 2021, 2022

Penilaian terhadap komponen perencanaan kinerja meliputi penilaian terhadap pemenuhan, kualitas serta implementasi Renstra dan Perencanaan Kinerja tahunan (RKT dan PK). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan seluruh proses perencanaan kinerja secara memadai baik dalam pemenuhan, kualitas serta

implementasinya. Namun demikian masih terdapat kelemahan dan perlu sedikit perbaikan atas perencanaan kinerja, yaitu :

1. Sasaran dalam Renstra belum sepenuhnya berorientasi hasil, belum sepenuhnya memuat ukuran keberhasilan (indikator) serta target keberhasilan tujuan;
2. Rencana Kinerja (RKT) belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

2. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pengukuran Kinerja memperoleh nilai **17,50** dari bobot penilaian sebesar **25%**. Evaluasi atas pengukuran kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.80. Penilaian Komponen Pengukuran Kinerja pada Dokumen SAKIP 2022

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
I	Pemenuhan pengukuran	5%	4,38
II	Kualitas pengukuran	12,5%	9,38
III	Implementasi pengukuran	7,5%	3,75
Penilaian		25%	17,50

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dispermades PPKB Tahun 2021, 2022

Komponen yang dinilai dalam pengukuran kinerja mencakup pemenuhan, kualitas serta implementasi IKU yang telah diformalkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara telah melaksanakan proses pengukuran kinerja dengan cukup memadai baik dalam pemenuhan, kualitas dan implementasi pengukuran kinerja. Namun demikian, masih terdapat kelemahan sebagai berikut :

1. Hasil pengukuran kinerja tingkat eselon IV keatas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward & punishment*;
2. Ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV belum sepenuhnya menjadi turunan kinerja atasannya;
3. Dokumen penganggaran belum mencantumkan IKU sebagai ultimate *outcome* atau *impact*.

3. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja memperoleh nilai **13,56** dari bobot penilaian sebesar **15%**. Evaluasi atas laporan kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.81. Penilaian Komponen Pelaporan Kinerja pada Dokumen SAKIP 2022

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
I	Pemenuhan pelaporan	3%	3,00
II	Penyajian informasi kinerja	7,5%	6,96
III	Pemanfaatan informasi kinerja	4,5%	3,60
Penilaian		15%	13,56

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dispermades PPKB Tahun 2021, 2022

Hasil evaluasi untuk komponen ini meliputi penilaian terhadap dokumen LKjIP. Dokumen LKjIP Tahun 2021 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara telah disusun. Dokumen LKjIP menyajikan sebagian informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dan perbandingan realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya baik target kinerja maupun keuangan.

Hal yang perlu mendapat perhatian dan perbaikan atas pelaporan kinerja bahwa laporan kinerja telah menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, namun belum sepenuhnya bersifat *outcome* dan belum sepenuhnya menyajikan pencapaian IKU.

4. Evaluasi Internal

Hasil penilaian terhadap Evaluasi Kinerja memperoleh nilai **7,05** dari bobot penilaian sebesar **10%**. Evaluasi atas Evaluasi Kinerja meliputi penilaian atas 3 (tiga) sub komponen sebagai berikut :

Tabel 3.82. Penilaian Komponen Evaluasi Internal pada Dokumen SAKIP 2022

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
I	Pemenuhan evaluasi	2,00	1,88
II	Kualitas evaluasi	5,00	3,68
III	Pemanfaatan evaluasi	3,00	1,50
Penilaian		10,00	7,06

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dispermades PPKB Tahun 2021, 2022

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara telah mengimplementasikan evaluasi internal atas pencapaian kinerja, baik dalam bentuk pemantauan/monitoring atas pencapaian kinerja beserta hambatannya, evaluasi program dan evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi. Namun demikian masih terdapat kelemahan atas evaluasi internal yaitu :

1. Evaluasi atas program belum sepenuhnya memberikan kesimpulan terkait keberhasilan/kegagalan serta dukungan program terhadap pencapaian kinerja;

2. Monitoring/kegagalan serta pelaksanaan rencana aksi belum sepenuhnya memberikan rekomendasi/alternatif saran perbaikan untuk peningkatan kinerja, dan belum berdampak pada perbaikan capaian kinerja setiap periode.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Hasil evaluasi atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi memperoleh nilai **16,05** dari bobot penilaian sebesar **20%**. Evaluasi atas pencapaian sasaran / kinerja organisasi meliputi penilaian atas 2 (dua) sub komponen sebagai berikut :

Tabel 3.83. Penilaian Komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Dokumen SAKIP 2022

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Hasil Penilaian
I	Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>)	7,5%	5,63
II	Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>)	12,5%	10,42
Penilaian		20%	16,05

Sumber : Laporan Hasil Evaluasi AKIP Dispermades PPKB Tahun 2021, 2022

Berdasarkan informasi yang disajikan dalam LKjIP, Informasi capaian *output* dan *outcome* telah memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan.

Capaian kinerja yang berhasil tersebut diatas karena didukung dengan :

1. Pendokumentasian data realisasi kegiatan secara tepat waktu sehingga pelaporan kinerja lebih mudah dilaksanakan;
2. Penyempurnaan penyusunan dokumen kinerja berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya sehingga hasil penyusunan dokumen lebih akurat;
3. Sinergitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan sehingga dokumen kinerja lebih akuntabel dan terukur;
4. Komitmen pimpinan beserta jajaran Dispermades PPKB untuk secara konsisten mewujudkan capaian kinerja yang telah ditetapkan.

Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian :

1. Terus menerus melaksanakan perbaikan dan penyempurnaan terhadap pengumpulan data kinerja sehingga data tersaji secara lengkap, tepat waktu dan akurat;
2. Perbaikan secara terus menerus dalam penyusunan seluruh dokumen kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Dokumen akuntabilitas kinerja merupakan satu kesatuan sistem sehingga penyusunan dokumen untuk selalu memperhatikan sinergitas / benang merah antar dokumen sehingga keseluruhan proses kinerja terdokumentasi secara utuh;

4. Secara berkala melaksanakan pertemuan/rapat koordinasi dalam rangka evaluasi dan monitoring di lingkup Dispermades PPKB agar target kinerja yang telah ditetapkan tercapai dengan baik.

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya :

Tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya yang mendukung pencapaian indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.84. Efisiensi Sumber Daya pada Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

No	Program dan Kegiatan	Target			Realisasi			Analisis		
		Dana (Rp)	SDM	Indikator	Dana (Rp)	SDM	Indikator	Indeks Biaya Target	Indeks Biaya Realisasi	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000	4	B (68)	20.000.000	4	BB (77,42)	294.118	258.331	12,167
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	7.500.000			7.500.000					
	Sub Kegiatan Koordinasi dan laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.500.000			12.500.000					

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Penghitungan analisis atas efisiensi sumberdaya dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_{ke i} / RVK_{ke i}}{PAK_{ke i} / TVK_{ke i}} \right) \times 100\%}{n}$$

Sumber : PMK Nomor 249 tahun 2011

Keterangan :

- E : Efisiensi
- RAK : Realisasi Anggaran per Keluaran
- PAK : Pagu Anggaran per Keluaran
- RVK : Realisasi volume Keluaran
- TVK : Target volume Keluaran
- N : Jumlah jenis keluaran

Berdasarkan rumus di atas, efisiensi untuk indikator SAKIP sebagai berikut :

$$E = \frac{\left(1 - \frac{20.000/77,42}{20.000/68} \right) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{\left(1 - \frac{258.331,180}{294.117,65} \right) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{(1 - 0,8783) \times 100\%}{1}$$

$$E = \frac{0,12167 \times 100\%}{1}$$

$$E = 12,167$$

Berdasarkan perhitungan di atas, terdapat efisiensi pemanfaatan sumber data sebanyak 12,167 persen. Hal tersebut berarti dengan sumberdaya yang ada dibandingkan dengan capaian keluaran yang dicapai diperoleh efisiensi sebesar 12,67 persen.

Sumberdaya manusia yang mendukung pelaksanaan program sebanyak 4 orang PNS yang terdiri dari Golongan IV (S2 : 1 orang), Golongan III (S2 : 1 orang), Golongan III (S1 : 1 orang) dan THL : 1 orang. Keseluruhan pelaksana tersebut merupakan sumberdaya manusia yang potensial dan telah melaksanakan tugas dengan optimal dilihat dari tercapainya target kinerja.

Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dicapai melalui Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui 2 Sub Kegiatan yaitu :

1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan output Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun sebanyak 12 dokumen;
 - a. Perjanjian Kinerja Thn 2022;
 - b. Perjanjian Kinerja Perubahan Thn. 2022;
 - c. Rencana Aksi Tahun 2022;
 - d. Pakta Integritas Tahun 2022;
 - e. RKO Tahun 2022;
 - f. RKAP Tahun 2022;
 - g. DPAP Tahun 2022;
 - h. Renstra Tahun 2023-2026;
 - i. Renja Tahun 2023;
 - j. RKT Tahun 2023;
 - k. RKA Tahun 2023;
 - l. DPA Tahun 2023.
2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan output Jumlah pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang disusun sebanyak 5 Dokumen :
 - a. LKJIP Tahun 2021;

- b. LKPJ-LPPD Tahun 2021;
- c. POK s.d Bulan Desember 2022;
- d. Pengukururan Kinerja s.d TW IV;
- e. Evaluasi Kinerja s.d TW IV.

B. REALISASI ANGGARAN

Dukungan anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Murni Tahun 2022 adalah sebesar Rp21.537.630.120,00. Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding pagu anggaran TA 2021 sebesar Rp18.230.369.900,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp3.307.261.220,00 yang terdiri dari penambahan pagu DAK Sub Bidang KB, Belanja Jaminan Sosial Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Gaji dan Tunjangan ASN.

Kenaikan anggaran Tahun 2022 terjadi pada APBD Perubahan dengan penambahan sebesar Rp986.318.370,00 sehingga menjadi Rp22.523.948.490,00. Kenaikan anggaran tersebut mendatangkan konsekuensi bagi Dispermades PPKB untuk melaksanakan tambahan kinerja dan anggaran secara optimal dan daam waktu yang relatif singkat agar tercapai target yang telah ditetapkan mengingat dokumen anggaran perubahan ditetapkan pada Bulan Oktober 2022.

Berdasarkan sumber dana, anggaran Dispermades PPKB TA 2022 terdiri dari APBD Kabupaten dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang KB. Anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten sebesar Rp10.691.966.090,00 dan DAK Sub Bidang KB sebesar Rp11.831.982.400,00. Anggaran Sub Bidang KB terbagi menjadi 1).DAK Non Fisik (BOKB) sebesar Rp9.462.966.090,00, 2).DAK Fisik Reguler sebesar Rp2.065.039.400,00 dan 3).DAK Fisik Penugasan sebesar Rp330.000.000,00. Adapun realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp21.375.703.760,00 yang terdiri dari APBD Kabupaten sebesar Rp10.533.590.794,00, DAK Non Fisik sebesar Rp8.495.249.916,00, DAK Fisik Reguler sebesar Rp2.030.906.250,00 dan DAK Fisik Penugasan sebesar Rp315.956.800,00.

Pengukuran penyerapan Anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan alokasi anggaran (pagu dalam DPA terakhir). Pengukuran Penyerapan Anggaran dengan rumus sebagai berikut :

$$P = \frac{RA}{AA} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Penyerapan Anggaran

RA : Realisasi Anggaran

AA : Alokasi Anggaran

Penyerapan Anggaran Dispermades PPKB Tahun 2022 sebagai berikut :

$$P = \frac{22.523.948.490}{21.375.703.760} \times 100\%$$

$$P = 94,90\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, penyerapan anggaran Dispermades PPKB sebesar 94,90 persen. Penyerapan tersebut menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu 95,08 persen. Secara rinci alokasi anggaran dan realisasi per program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.85. Rincian Program dan Kegiatan, Pagu serta Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.212.608.135,00	6.142.332.730,00	100,00
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.500.000,00	16.500.000,00	100,00
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00
	2. Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.516.462.250,00	4.480.171.732,00	99,19
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.415.322.250,00	4.379.031.732,00	99,18
	2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SPKD	101.140.000,00	101.140.000,00	100,00
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	499.129.800,00	492.367.304,00	98,65
	1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	57.600.000,00	51.821.174,00	89,97
	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	24.859.100,00	99,44
	3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	416.529.800,00	415.687.030,00	99,80
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	57.431.000,00	57.250.000,00	99,68
	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.431.000,00	57.250.000,00	99,68
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	904.823.485,00	881.121.194,00	97,38
	1. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	904.823.485,00	881.121.194,00	97,38
5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	214.761.600,00	211.422.500,00	98,45
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.940.000,00	79.553.900,00	99,52
	2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120.001.600,00	117.048.600,00	97,54
	3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.820.000,00	14.820.000,00	100,00
B.	Program Penataan Desa	22.500.000,00	9.750.000,00	99,33
6.	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	22.500.000,00	9.750.000,00	99,33
	1. Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	22.500.000,00	22.350.000,00	99,33
C.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	10.000.000,00	9.750.000,00	97,50
	Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	10.000.000,00	9.750.000,00	97,50
	1. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10.000.000,00	9.750.000,00	97,50

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
D.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	4.025.207.955,00	3.942.205.164	97,94
7.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	4.025.207.955,00	3.942.205.164	97,94
	1. Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	500.000,00	500.000,00	100,00
	2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	3.000.000,00	2.994.000,00	99,80
	3. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	10.000.000,00	9.900.000,00	99,00
	4. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.485.127.955,00	3.408.826.664,00	97,81
	5. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	278.000.000,00	277.977.800,00	99,99
	6. Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	19.500.000,00	19.050.000,00	97,69
	7. Fasilitasi Pengangkatan dan Peberhentian Perangkat Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	8. Fasilitasi Pengusunan Profil Desa	196.080.000,00	190.076.700,00	94,94
	9. Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5.000.000,00	4.972.000,00	99,44
	10. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00
	11. Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	12. Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
	13. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.000.000,00	9.908.000,00	99,08
E.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	393.150.000,00	391.452.900,00	99,57
8.	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	393.150.000,00	391.452.900,00	99,57
	1. Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RT, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	108.000.000,00	107.562.900,00	99,60
	2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10.000.000,00	9.979.000,00	99,79
	3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan	14.000.000,00	13.690.000,00	97,79

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Asli Desa			
	4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Teknologi Tepat Guna	110.000.000,00	109.571.000,00	99,56
	5. Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong	-	-	-
	6. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	151.150.000,00	150.700.000,00	99,70
F.	Program Pengendalian Penduduk	301.230.000,00	280.989.776,00	93,28
9.	Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
10.	Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	298.230.000,00	264.609.495,00	88,73
	1. Perumusan Parameter Kependudukan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
	2. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	27.630.000,00	27.630.000,00	100,00
	3. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian apangan dan Pelayanan KB	267.600.000,00	247.359.776,00	92,44
G.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	6.711.672.400,00	6.605.646.390,00	98,42
11.	Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.262.015.000,00	1.236.806.840,00	98,00
	1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholder dan Mitra Kerja	4.375.000,00	4.374.000,00	100,00
	2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000,00	24.995.900,00	99,98
	3. Promosi dan KIE Program KKBPK melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	70.640.000,00	70.590.000,00	99,93
	4. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	312.000.000,00	307.380.000,00	98,52
	5. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KB	810.000.000,00	792.116.040,00	97,79
	6. Pengendalian Program KKBPK	40.000.000,00	37.350.000,00	93,38
12.	Kegiatan Pendayagunaan Teaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.334.400.000,00	1.334.400.000,00	100,00
	1. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.334.400.000,00	1.334.400.000,00	100,00

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
H.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.847.580.000,00	3.980.976.800,00	82,12
13.	Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Keutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.183.757.400,00	3.130.809.550,00	98,34
	1. Pengendalian Pendistribusian Aat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.150.000,00	21.500.000,00	100,00
	2. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangk panjang (MKJP)	1.072.039.000,00	1.056.853.300,00	98,58
	3. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan KB	3.000.000,00	0,00	0,00
	4. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.065.668.000,00	2.030.906.250	98,32
	5. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Keshatan reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.900.000,00	19.900.000,00	100,00
	6. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
14.	Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daserah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	931.500.000,00	903.990.000,00	97,05
	1. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	931.500.000,00	903.990.000,00	97,01
15.	Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.847.580.000,00	3.978.266.800,00	82,07
	1. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	330.000.000,00	315.956.800,00	95,74
	2. Orientasi dan pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluraga/UPPKS)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	3. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
	4. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.509.580.000	3.657.020.000,00	81,09

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
5.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
6.	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
Jumlah		22.523.948.490,00	21.375.703.760,00	94,90

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Secara umum pengelolaan anggaran Tahun 2022 telah terlaksana dengan baik. Pada tahun 2022 belanja sebesar Rp21.375.703.760,00 atau (94,90%). terdapat efisiensi belanja sebesar Rp1.148.244.730,00 (5,10%) dengan rincian sebagai berikut :

1. Sisa belanja pengadaan DAK Non Fisik Sub Bidang KB sebesar Rp941.064.084,00
2. Sisa belanja pengadaan DAK Fisik Reguler Sub Bidang KB sebesar Rp34.761.750,00;
3. Sisa belanja pengadaan DAK Fisik Penugasan Sub Bidang KB sebesar Rp14.043.200,00
4. Sisa belanja pengadaan APBD Kabupaten (lainnya) sebesar Rp207.180.646,00.

Selain penyerapan anggaran, pengukuran lainnya yaitu terhadap konsistensi penyerapan anggaran. Tingkat konsistensi penyerapan anggaran dilakukan dengan memeperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan setiap bulan. Sedangkan konsistensi pada suatu bulan merupakan rata-rata tingkat konsistensi per bulan dari Januari sampai dengan bulan tertentu. Tabel penghitungan konsistensi penyerapan anggaran sebagai berikut :

Tabel 3.86. Rekapitulasi Penghitungan Konsistensi Penyerapan Anggaran Dispermades PPKBTahun 2022

Bulan	RPD (Rp)	Realisasi Anggaran (RA) (Rp)	RPD Kumulatif (Rp)	RA Kumulatif (Rp)	Tingkat Konsistensi (%)	Konsistensi per bulan (%)
1	2	3	4	5	6	7
Januari	2.419.739.737	-	2.419.739.737	-	0	0
Februari	1.658.859.159	1.574.465.957	4.078.598.896	1.574.465.957	38,60	19,30
Maret	1.695.662.884	930.535.428	5.774.261.780	2.505.001.385	43,38	27,33
April	2.883.543.809	2.710.208.426	8.657.805.589	5.215.209.811	60,24	35,56
Mei	3.876.220.759	845.788.991	12.534.026.348	6.060.998.802	43,46	38,12
Juni	1.904.563.084	2.498.009.030	14.438.589.432	8.559.007.832	59,28	41,64
Juli	2.241.884.673	2.522.862.627	16.680.474.105	11.081.870.459	66,44	45,18
Agustus	1.609.702.875	1.871.591.730	18.290.176.980	12.953.462.189	70,82	48,39
September	1.272.451.442	2.027.767.992	19.562.628.422	14.981.230.181	76,58	51,52
Oktober	1.015.605.280	2.198.501.146	20.578.233.702	17.179.731.327	83,48	54,72

Bulan	RPD (Rp)	Realisasi Anggaran (RA) (Rp)	RPD Kumulatif (Rp)	RA Kumulatif (Rp)	Tingkat Konsistensi (%)	Konsistensi per bulan (%)
1	2	3	4	5	6	7
November	1.557.927.151	1.779.125.629	22.136.160.853	18.958.856.956	85,86	57,53
Desember	382.787.637	2.416.846.804	22.518.948.490	21.375.703.760	94,92	60,65

Sumber : Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, 2022

Berdasarkan perhitungan di atas, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan bulan Desember sebesar 60,65 persen. Perbandingan Pagu Anggaran /ALokasi Anggaran dengan Realisasi Anggaran Tahun 2019-2022 ditunjukkan pada gambar sebagai berikut :



Gambar 3.25. Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2019 - 2022

Berdasarkan gambar di atas, alokasi anggaran Dispermades PPKB semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan yang cukup besar pada tahun 2021 dimana terdapat penambahan anggaran untuk pembayaran Sosial Jaminan Kesehatan untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa yang sebelumnya anggarantersebut melekat pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kab. Banjarnegara.

Beberapa permasalahan penyerapan anggaran Tahun 2022 diantaranya sebagai berikut :

1. Perbedaan aturan/kebijakan pemerintah dengan implementasi di tingkat lini lapangan. Khususnya yang terkait dengan program penurunan stunting pada pendampingan calon pengantin, ibu hamil dan pasca melahirkan. Sasaran pemerintah untuk pendampingan calon pengantin yaitu pendampingan dilakukan dua kali dalam kurun waktu tiga bulan. Pada realisasi di lapangan, calon pengantin umumnya mendaftarkan diri ke KUA pada saat mendekati pernikahan sehingga pendampingan tidak bisa dilaksanakan sesuai ketentuan. Selain itu terdapat juga pengantin dengan status numpang nikah sehingga tidak bisa dilaksanakan pendampingan;
2. Realisasi belanja pegawai khususnya yang berkaitan dengan tambahan penghasilan pegawai pada tiga bulan pertama tidak bisa direalisasikan tiap bulan sebagaimana

perencanaan anggaran. Hal tersebut berkaitan dengan jabatan Kepala Daerah selaku Pejabat pengelola keuangan Daerah (PPKD) diampu oleh Pelaksana Harian (Plh), dimana Plh tidak mempunyai kewenangan mengambil keputusan dan atau tindakan salah satunya yang berkaitan dengan anggaran, sehingga untuk proses pencairan harus melalui ijin dari Kementerian Dalam Negeri;

3. Proses penetapan anggaran perubahan agak terlambat bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, anggaran perubahan ditetapkan pada bulan Oktober 2022 sedangkan tahun-tahun sebelumnya anggaran ditetapkan bulan September tahun berjalan;
4. Beberapa kegiatan merupakan sinkronisasi dengan kegiatan/kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga pelaksanaannya menunggu instruksi/kebijakan dari Provinsi. Pada sub Kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat, pada anggaran perubahan dialihkan untuk mendukung sub kegiatan yang lain karena di Tingkat Provinsi Jawa Tengah tidak dilaksanakan Bulan Bhakti Gotong Royong yang sedianya dilaksanakan serentak seluruh Kabupaten se-Provinsi Jawa Tengah.

Beberapa upaya Dispermades PPKB dalam mengefektifkan penggunaan anggaran diantaranya :

1. Melaksanakan rapat koordinasi, monitoring serta pemantauan secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan agar pelaksanaan sesuai dengan jadwal perencanaan;
2. Mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa terutama yang bersumber dana dari DAK Fisik sedini mungkin agar bisa dilaksanakan secara optimal;
3. Melaksanakan pemetaan dan pergeseran anggaran terhadap sisa lebih anggaran yang memungkinkan untuk menutup kebutuhan pembiayaan kegiatan lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian target kegiatan;
4. Melaksanakan pemetaan pencairan keuangan terutama menjelang akhir tahun untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran;
5. Mempercepat proses pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Selain melaksanakan sasaran kinerja utama, Dispermades PPKB juga berpartisipasi aktif dalam program/kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran nasional. Beberapa prestasi yang diperoleh pada Tahun 2022 diantaranya :

1. Juara 1 Program era Terbak Forum Gere Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah;
2. Juara 2 Ide dan Inovasi Rancangan Program Kerja Terbaik Forum Gere Kabupaten/Kota se- Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Kinerja Dispermades PPKB Tahun 2022 merupakan ikhtisar singkat yang diharapkan bisa dipahami dengan mudah oleh stakeholder dan masyarakat yang membutuhkan. Selain itu laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja, bahan evaluasi serta acuan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan di masa yang akan datang terutama sebagai upaya meningkatkan kinerja.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, maka seluruh program dan kegiatan dalam rangka dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi telah berhasil dilaksanakan. Rata-rata capaian kinerja sebesar 121,93 persen, artinya rata-rata realisasi kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan. Berdasarkan skala pengukuran kinerja maka capaian kinerja dari 14 (empat belas) indikator kinerja yaitu 11 (sebelas) indikator kinerja melebihi 100 persen (sangat baik), 3 (tiga) indikator dalam skala 75 - 100 persen (baik). Rincian capaian kinerja berdasarkan skala pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Kategori sangat baik yaitu : 1). Persentase tingkat perkembangan desa, 2). Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD, 3). Persentase tingkat perkembangan BUMDes, 4). Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat, 5). Angka Kelahiran Total (TFR), 6). Persentase PUS peserta KB MKJP, 7). Menurunnya PUS usia 19 tahun (<20 Tahun), 8). Persentase kesertaan anggota tribina, 9). Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera, 10). Nilai survey kepuasan masyarakat, 11). Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Kategori baik yaitu : 1). Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun, 2). Persentase peserta KB aktif, 3). Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (*Unmeet Need*).

Secara umum, kinerja Dispermades PPKB Tahun 2022 telah berhasil dengan baik, namun demikian perlu untuk terus melaksanakan peningkatan kinerja agar semakin bisa bermanfaat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara ini disusun. Semoga dokumen ini dapat memberikan informasi kepada seluruh pihak yang terkait, serta saran dan masukan diharapkan demi perbaikan kinerja pada periode yang akan datang.

Banjarnegara, 28 Januari 2023
KEPALA DISPERMADES PPKB
KABUPATEN BANJARNEGARA

HENDRO CAHYONO, SE., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP. 19681130 199703 1 007



2022 Perjanjian Kinerja Perubahan

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Jl. S Parman No. 7 Banjarnegara Telp. (0286) 594442
email : dispermadesppkb.bna@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Alamat : Jln. S. Parman No.7 Telp. (0286) 594442 Banjarnegara 53412
e-mail: dispermaespkb.bna@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDRO CAHYONO, SE, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH

Jabatan : Pj. BUPATI BANJARNEGARA

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kegiatan yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banjarnegara, Oktober 2022

Pihak Kedua

Pj. BUPATI BANJARNEGARA

TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH

Pihak Pertama

KEPALA DINAS

HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19681130 199703 1 007

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengelolaan pemerintah desa	Persentase tingkat perkembangan desa	3%	3%	-
2.	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga pemerintahan desa	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	90%	90%	-
3.	Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat	Persentase tingkat perkembangan BUMDes	70%	70%	-
4.	Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan Masyarakat	Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	30%	30%	-
5.	Meningkatnya kualitas data dan informasi serta data mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap desa/kelurahan tiap tahun	100%	100%	-
6.	Meningkatnya kesertaan KB	a. Angka kelahiran total (TFR)	2,30%	2,30%	-
		b. Persentase peserta KB aktif	79,24%	79,24%	-
		c. Persentase PUS peserta KB MKJP	28,75%	28,75%	-
		d. Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	6,99%	6,99%	-
		e. Menurunnya PUS usia 15 sampai 19 tahun (<20 tahun)	2,87%	2,87%	-
7.	Meningkatnya kesertaan Tribina dan UPPKS	a. Persentase kesertaan anggota Tribina	44,12%	44,12%	-
		b. Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera	25,36%	25,36%	-

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Sebelum Perubahan	Target Sesudah Perubahan	Bertambah / Berkurang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai survey kepuasan masyarakat	79	79	-
9.	Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	B	-

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang	Ket.
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp5.934.439.765	Rp6.212.608.135	Rp278.168.370	APBD Kab
2.	Program Penataan Desa	Rp22.500.000	Rp22.500.000	-	APBD Kab
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp10.000.000	Rp10.000.000	-	APBD Kab
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp3.445.207.955	Rp4.025.207.955	Rp580.000.000	APBD Kab
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp265.000.000	Rp393.150.000	Rp128.150.000	APBD Kab
6.	Program Pengendalian Penduduk	Rp301.230.000	Rp301.230.000	-	APBD Kab dan DAK
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp6.711.672.400	Rp6.711.672.400	-	APBD Kab dan DAK

No	Program	Anggaran Sebelum Perubahan	Anggaran Setelah Perubahan	Tambah/ Kurang	Ket.
8.	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp4.847.580.000	Rp4.847.580.000	-	APBD Kab dan DAK
	Jumlah	Rp21.537.630.120	Rp22.523.948.490	Rp986.318.370	

Banjarnegara, Oktober 2022

Pihak Kedua


 Bp. BUPATI BANJARNEGARA

TRI HARSO WIDIRAHMANTO, SH

Pihak Pertama


 KEPALA DINAS

HENDRO CAHYONO, SE, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19681130 199703 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA



Rencana Aksi TAHUN 2022

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BANJARNEGARA**

Alamat : Jl. S Parman No. 7, Telp/Fax (0286) 594442 Banjarnegara 53412
website: dispermadesppkb.banjarnegarakab.go.id,
email : dispermadesppkb.bna@gmail.com

RENCANA AKSI PENCAPIAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2022	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN				PENANGGUNGJAWAB
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV					TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga pemerintahan desa	Persentase tingkat perkembangan desa	3%	25%	50%	100%	100%									Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif
		Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat dan anggota BPD	90%	35%	60%	80%	100%	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif
										Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	
										Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
										Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5.000.000	-	2.650.000	5.000.000	5.000.000	
										Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	3.185.127.955	1.139.495.200	2.279.807.400	3.112.389.355	3.185.127.955	
										Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
										Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	10.000.000	9.455.800	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
										Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	196.080.000	-	196.080.000	196.080.000	196.080.000	
										Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	5.000.000	4.515.400	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
										Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	3.000.000	2.100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
										Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	3.000.000	1.689.600	2.400.000	3.000.000	3.000.000	
2	Meningkatnya pendapatan ekonomi masyarakat	Persentase tingkat perkembangan BUMDes	70%	25%	50%	80%	100%	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	18.000.000	3.623.200	18.000.000	18.000.000	18.000.000	Kepala Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
										Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2022	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN				PENANGGUNGJAWAB
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV					TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	14.000.000	5.261.600	14.000.000	14.000.000	14.000.000	
										Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	10.000.000	-	-	10.000.000	10.000.000	
3	Meningkatnya partisipasi kemandirian dan keberdayaan masyarakat	Persentase swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	30%	15%	40%	80%	100%	Penataan Desa	Penyelenggaraan Penataan Desa	Fasilitasi Sarana Prasarana Desa	22.500.000	6.254.400	13.568.100	21.600.000	22.500.000	Kepala Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan & Tata Ruang Perdesaan
								Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	10.000.000	5.274.500	8.932.700	8.990.000	10.000.000	
								Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	108.000.000	107.712.600	108.000.000	108.000.000	108.000.000	
										Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat)	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	
										Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	
										Fasilitasi Tim Pengerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	118.000.000	27.850.000	69.671.000	114.996.200	118.000.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2021	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN				PENANGGUNGJAWAB
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV					TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	Meningkatnya Kualitas data dan informasi serta Data Mikro keluarga secara berjenjang, diperbaharui dan berkesinambungan	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/ kelurahan tiap tahun	100%	40%	65%	85%	100%	Pengendalian Penduduk	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal	3.000.000	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Advokasi
									Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten.Kota	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	267.600.000	109.606.875	171.474.375	227.820.000	267.600.000	
										Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	27.630.000	6.907.500	13.815.000	20.722.500	27.630.000	
										Perumusan Parameter Kependudukan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
5	Meningkatnya kesertaan KB	Angka kelahiran total (TFR)	2,30%	20%	45%	65%	100%	Pembinaan Keluarga Berencana	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	4.375.000	-	4.375.000	4.375.000	4.375.000	Kepala Bidang Keluarga Berencana
										Komunikasi, Invmormasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	25.000.000	15.100.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
										Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	70.640.000	20.640.000	70.640.000	70.640.000	70.640.000	
										Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	312.000.000	82.975.000	180.275.000	287.675.000	312.000.000	
										Pengelolaan operasional dan sarana di balai penyuluhan KKBPK	810.000.000	186.440.000	415.840.000	672.760.000	810.000.000	
										Pengendalian Program KKBPK	40.000.000	10.095.000	23.385.000	36.675.000	40.000.000	
									Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	931.500.000	219.937.500	465.765.000	834.506.250	931.500.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2021	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN				PENANGGUNGJAWAB
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV					TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1.334.400.000	333.600.000	778.400.000	1.112.000.000	1.334.400.000	
		Persentase Peserta KB Aktif	79,24%	10%	40%	75%	100%		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	21.150.000	7.466.000	14.508.000	21.150.000	21.150.000	
										Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.065.668.000	77.125.000	2.063.630.000	2.065.668.000	2.065.668.000	
		Persentase PUS peserta KB MKJP	28,75%	20%	50%	85%	100%			Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	1.072.039.400	464.669.400	840.879.400	1.072.039.400	1.072.039.400	
										Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
		Persentase PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet need)	6,99%	15%	45%	80%	100%			Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	19.900.000	12.400.000	19.900.000	19.900.000	19.900.000	
										Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
		Menurunnya PUS usia 15-19 tahun (< 20 tahun)	2,87%	30%	65%	85%	100%	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	330.000.000	6.137.500	329.372.500		330.000.000	
										Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	4.509.580.000	1.352.874.000	2.705.748.000	2.000.000	4.509.580.000	
										Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	4.227.340.000	2.000.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2021	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN				PENANGGUNGJAWAB
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV					TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	2.000.000	1.100.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
8	Meningkatnya kesertaan Tribina dan UPPKS	Persentase kesertaan anggota Tribina	44,12%	20%	50%	80%	100%			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	330.000.000	2.000.000	Kepala Bidang Keluarga Berencana
		Cakupan sasaran PUS yang menjadi anggota UPPKS keluarga sejahtera	25,36%	20%	50%	80%	100%			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
9	Meningkatnya nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	79	25%	60%	85%	100%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.352.003.880	970.827.468	2.591.922.468	3.560.591.476	4.352.003.880	Sekretaris
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	101.140.000	25.900.000	50.980.000	76.060.000	101.140.000	
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	932.813.485	237.974.237	469.696.489	701.441.241	932.813.485	
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	57.600.000	16.400.000	30.800.000	45.200.000	57.600.000	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.150.000	4.500.000	9.500.000	15.000.000	18.150.000	
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	329.529.800	157.401.400	248.401.400	310.321.400	329.529.800	
									Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan sarana dan Parasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	25.431.000	25.431.000	25.431.000	25.431.000	25.431.000	
									Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.740.000	29.795.000	58.710.000	71.225.000	72.740.000	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.001.600	18.791.600	20.001.600	20.001.600	20.001.600	
										Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.030.000	6.700.000	10.030.000	10.030.000	10.030.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2021	TARGET KINERJA				PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET KEUANGAN				PENANGGUNGJAWAB
				TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV					TRIWULAN I	TRIWULAN II	TRIWULAN III	TRIWULAN IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	Meningkatnya nilai evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B	50%	65%	80%	100%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.500.000	5.902.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	Sekretaris
									Koordinasi dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		7.500.000	3.833.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	
											21.537.630.120	5.554.324.280	13.972.824.432	18.726.122.172	21.537.630.120	

Banjarnegara, 28 Januari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Banjarnegara



[Signature]

HENDRO GAHYONO, SE, M.Si
NIP. 19681130 199703 1 007



TNI Manunggal membangun Desa



Foto Kegiatan TNI Manunggal membangun Desa





Pelayanan KB



Penurunan Stunting



Kegiatan Lini lapangan



Rapat Pengendalian Intern